

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

KOTA PEKALONGAN

Tahun 2021 - 2025



Disusun atas kerja sama
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
dengan
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI



**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 - 2025**

Tema :

***“Pengembangan Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan
berbasis Potensi Unggulan Daerah”***

Disusun oleh

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

bekerja sama dengan

**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PUSAT TEKNOLOGI KAWASAN SPESIFIK DAN SISTEM INOVASI**

Tim Pendamping

Iwan Sudrajat, Atang Sulaeman, Suhandoyo,
Abd. Azis Wasil, Dimas Januar Rizki

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111
Telp. (0285) 423223 Fax. (0285) 423223 ext.303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id>,
<http://jarlitbangnov.pekalongankota.go.id/>
Email: pekalongankota.bappeda@gmail.com



TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA, DAN SEKRETARIAT

(Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 071.05/725 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2025)

- Tim Pengarah**
- Walikota Pekalongan
 - Wakil Walikota Pekalongan
- Tim Pelaksana**
- Sekretaris Daerah
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Asisten Administrasi Umum
 - Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Kepala Badan Keuangan Daerah
 - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
 - Kepala Dinas Pendidikan
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kota Pekalongan
 - Ketua Dewan Riset Daerah
 - Rektor Universitas Pekalongan
 - Ketua Relawan TIK
- Sekretariat**
- Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Sub Bidang Penelitian pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Sub Bidang Data dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan
 - Fungsional Umum Bappeda Kota Pekalongan

- Kelompok Kerja Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah**
- Dr. Ir. Iwan Sudrajat, M.SEE (BPPT)
 - Sekretaris Bappeda
 - Sekretaris Dinas Pendidikan
 - Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Kepala Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah
 - Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan pada Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- Kelompok Kerja Pengembangan Klaster Industri**
- Dimas Januar Rizki, ST., M.S.Ak (BPPT)
 - Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
- Kelompok Kerja Pengembangan Jaringan Inovasi**
- Ir. Abd. Aziz Wasil (BPPT)
 - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan
- Kelompok Kerja Pengembangan Teknopreneur**
- Ir. Atang Sulaeman, M.Si (BPPT)
 - Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Kepala Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata pada Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
- Kelompok Kerja Pengembangan Tematik Daerah**
- Ir. Suhandoyo, M.Si (BPPT)
 - Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan bekerja sama dengan Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyelenggarakan sebuah kegiatan penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 dengan tema “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan berbasis Potensi Unggulan Daerah”.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan ini memaparkan enam hal pokok, yaitu (1) Kondisi saat ini Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan; (2) Tantangan dan peluang Kota Pekalongan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah; (3) Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang diinginkan pada tahun 2021-2025; (4) Strategi dan arah kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan untuk lima tahun mendatang; (5) Fokus dan program prioritas Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan untuk periode 2021-2025, serta; (6) Rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025.

Semoga Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 nantinya dapat menjadi pedoman dan panduan arah bagi semua *stakeholder* dalam upaya mendorong inovasi guna meningkatkan daya saing Kota Pekalongan.

Pekalongan, Desember 2020

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,
selaku Ketua Tim Koordinasi
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kota Pekalongan



SRI RUMININGSIH, SE., M.Si

KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSAT TEKNOLOGI KAWASAN SPESIFIK DAN SISTEM INOVASI

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan-Nya penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan Tahun 2021-2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Roadmap Penguatan SIDa berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa perlu disusun dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian dokumen ini. Besar harapan kami agar dokumen ini dapat dijadikan acuan setiap Perangkat Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Akhir kata semoga Roadmap Penguatan SIDa Kota Pekalongan tahun 2021-2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, Desember 2020

Direktur Pusat Teknologi Kawasan
Spesifik dan Sistem Inovasi

Dr. Ir. Iwan Sudrajat, MSEE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA, DAN SEKRETARIAT	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Legal	8
1.3. Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekalongan dengan <i>Roadmap</i> SIDA	10
1.4. Keterkaitan <i>Roadmap</i> SIDA dan Dokumen Strategis Daerah	11
1.5. Sistematisa <i>Roadmap</i>	11
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH DAN SIDA SAAT INI	12
2.1. Kondisi Umum Kota Pekalongan	12
2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	13
2.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah	17
2.2.3. Aspek Demografi	30
2.2.4. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	34
2.2. Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan	62
2.2.1. Pelaksanaan Lingkup SIDA	62
2.2.2. Pelaksanaan Program Iptek dan Inovasi Daerah	65
2.2.3. Tema Penguatan SIDA	79
2.2.4. Kondisi SIDA Saat Ini	80
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA	120
3.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan ..	120
3.2. Isu Strategis Pembangunan Kota Pekalongan	120
3.3. Tantangan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	122
3.4. Peluang Kota Pekalongan	123
3.4.1. Berkembangnya Pembangunan yang Berorientasi pada Globalisasi	123
3.4.2. Potensi Ekonomi Berbasis Kreatif	124
3.4.3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengatasi hambatan jarak serta waktu	125
3.4.4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah	125
BAB IV KONDISI YANG DIINGINKAN	127
4.1. Pilar Ekosistem Inovasi (KKI 1-6)	127
4.2. Pilar Klaster Industri (KKI 1-6)	138

4.3.	Pilar Jaringan Inovasi (KKI 1-6)	143
4.4.	Pilar Teknoprener (KKI 1-6)	154
4.5.	Pilar Tematik Daerah (KKI 1-6)	156
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	159
5.1.	Strategi	159
5.2.	Arah Kebijakan	162
BAB VI	FOKUS PROGRAM PRORITAS PENGUATAN SIDA	166
6.1.	Fokus Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan	166
6.1.1.	Fokus Pilar 1 Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	166
6.1.2.	Fokus Pilar 2 Klaster Industri	166
6.1.3.	Fokus Pilar 3 Jaringan Inovasi	167
6.1.4.	Fokus Pilar 4 Teknoprener	167
6.1.5.	Fokus Pilar 5 Tematik Daerah	168
6.2.	Program Prioritas Penguatan SIDA Kota Pekalongan	168
6.2.1.	Program Prioritas pada Pilar Ekosistem Inovasi Daerah	168
6.2.2.	Program Prioritas pada Pilar Klaster Industri	170
6.2.3.	Program Prioritas pada Pilar Jaringan Inovasi	171
6.2.4.	Program Prioritas pada Pilar Teknoprener	171
6.2.5.	Program Prioritas pada Pilar Tematik	172
BAB VII	RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA	173
7.1.	Pilar Ekosistem Inovasi	173
7.2.	Pilar Klaster Industri	179
7.3.	Pilar Jaringan Inovasi	188
7.4.	Pilar Teknoprener	197
7.5.	Pilar Tematik Daerah	202
7.6.	Ilustrasi Program Kolaborasi / <i>Cross Cutting</i> melalui Program Pengembangan Kriya Batik dan Kuliner Olahan Ikan	206
BAB VIII	PENUTUP	209
DAFTAR	PUSTAKA	210

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan	16
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019	30
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019	31
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019	31
Tabel 2.5	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2015-2019	32
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)	33
Tabel 2.7	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (persen)	36
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2015-2019	43
Tabel 2.9	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (%)	44
Tabel 2.10	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2014-2018	45
Tabel 2.11	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	47
Tabel 2.12	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019	57
Tabel 2.13	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019	59
Tabel 2.14	Judul Penelitian Berdasarkan Kegiatan Litbang Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	66
Tabel 2.15	Judul Artikel Jurnal Litbang Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	69
Tabel 2.16	Pagu Anggaran Belanja Litbang Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021	77
Tabel 2.17	Kondisi Pilar Ekosistem Inovasi Saat Ini	81
Tabel 2.18	Kondisi Pilar Klaster Industri Saat Ini	92
Tabel 2.19	Kondisi Pilar Jaringan Inovasi Saat Ini	97
Tabel 2.20	Kondisi Pilar Teknopreneur Saat Ini	109
Tabel 2.21	Kondisi Pilar Tematik Daerah Saat Ini	115
Tabel 4.1	Kondisi SIDA yang Ingin Dicapai pada Pilar Ekosistem Inovasi	127
Tabel 4.2	Kondisi SIDA yang Ingin Dicapai pada Pilar Klaster Industri	138
Tabel 4.3	Kondisi SIDA yang Ingin Dicapai pada Pilar Jaringan Inovasi	143
Tabel 4.4	Kondisi SIDA yang Ingin Dicapai pada Pilar Teknopreneur	154
Tabel 4.5	Kondisi SIDA yang Ingin Dicapai pada Pilar Tematik Daerah	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Roadmap di Antara Dokumen Strategis Daerah	11
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kota Pekalongan	15
Gambar 2.2	Peta Administratif Kota Pekalongan	16
Gambar 2.3	Peta Rencana Pola Ruang	19
Gambar 2.4	Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan	29
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	33
Gambar 2.6	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019	34
Gambar 2.7	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2015 - 2019	35
Gambar 2.8	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2019 (%)	44
Gambar 2.9	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019	47
Gambar 2.10	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 (000 jiwa)	48
Gambar 2.11	Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019	49
Gambar 2.12	Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	50
Gambar 2.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019	51
Gambar 2.14	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019	52
Gambar 2.15	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019	53
Gambar 2.16	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019	54
Gambar 2.17	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019	55
Gambar 2.18	Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019	56
Gambar 2.19	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2015-2019 (%)	58
Gambar 2.20	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	59
Gambar 2.21	Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019	60
Gambar 2.22	Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019	61
Gambar 2.23	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2015-2019	62
Gambar 7.1	Ilustrasi Program Kolaborasi/Cross Cutting Program Pengembangan Kriya Batik dan Kuliner Olahan Ikan	207

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Kuesioner Kota Pekalongan Tahun 2020: Kondisi SIDA Saat Ini dan Kondisi Sida Yang Akan Dicapai	212
----------	---	-----



**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 - 2025**

Tema :

***“Pengembangan Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan
berbasis Potensi Unggulan Daerah”***



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan yang semakin tinggi dan adil bagi masyarakat merupakan cita-cita semua pihak. Setiap pengelola pemerintahan daerah pada dasarnya selalu menetapkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari perwujudan pembangunan. Perjalanan sejarah pembangunan menunjukkan bahwa walaupun banyak keserupaan yang dijumpai dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, namun setiap daerah dihadapkan kepada kekhasan tantangan dan faktor multidimensional.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Selanjutnya dinyatakan bahwa sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah negara atau daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya dan tidak dapat dalam ruang kosong, melainkan harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, itulah sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Peranan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan pengembangannya yang berbasis kesisteman, telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Visi misi maupun arah pembangunan di dalam undang-undang tersebut menekankan tentang pentingnya inovasi dalam membangun daya saing.

Visi Pembangunan nasional jangka panjang tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” yang salah satu implementasinya di tuangkan ke dalam Misi ke – 2 yaitu “mewujudkan Bangsa yang berdaya saing” dengan salah satu arahan kebijakannya adalah “...penguatan sistem inovasi dalam rangka pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan....”.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing Daerah.

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah.

Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Sistem Inovasi Daerah di Kota Pekalongan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kota Pekalongan sebagai salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah, memerlukan proses percepatan pembangunan ekonomi, agar dapat membangun kesejahteraan masyarakatnya serta tidak tertinggal dari daerah lainnya.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan

dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan dibangunnya interchange jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (Jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan Kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sector primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang, perekonomian Kota Pekalongan tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan sebesar 5,69%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,32%. Distribusi PDRB tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan disumbang oleh sektor perdagangan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,70%, penyumbang terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yaitu

sebesar 21,24% dan di urutan ketiga adalah sektor Konstruksi sebesar 14,57%. Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Pekalongan, dengan memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah perlu disusun dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSiDa) yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif.

Roadmap atau Peta Rencana adalah salah satu alat perencanaan berorientasi masa depan atau foresight yang merupakan perencanaan dinamis yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan. Foresight melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan di masa kini untuk mencapainya. (BPPT, 2013).

Roadmap merupakan salah satu alat efektif dalam mekanisme beragam elemen organisasi (tatanan kelembagaan tertentu) secara kolaboratif, dalam merencanakan penguatan sistem inovasi secara sistematis.

Dari perspektif berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*) yang ada di Kota Pekalongan, roadmap sangat berguna terutama dalam kerangka mekanisme koordinasi dan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menginisiasi tindak lanjut serta sebagai katalis untuk melaksanakan langkah-langkah pembangunan yang disepakati.

Substansi dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Pekalongan dikembangkan dari Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2021-2024.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Kota Pekalongan akan mencerminkan 6 (enam) Agenda-agenda atau Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) dalam bentuk indikator-indikator yang terukur dan saling berkaitan. Keenam KKI tersebut adalah :

1. ***Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis***, menggambarkan kondisi dasar yang diperlukan untuk mendukung atau sebagai syarat bisa berkembangnya bisnis dan inovasi. Antara lain terdiri atas reformasi kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dan bisnis (termasuk dokumen perencanaan pembangunan, penyederhanaan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan bisnis dan investasi, pengembangan basis data inovasi, infrastruktur dasar inovasi (termasuk laboratorium, pusat pelayanan inovasi, pengembangan inkubator bisnis, infrastuktur TIK, ruang publik kreatif), pembiayaan inovasi (termasuk insentif), perlindungan HKI, pengembangan sistem retribusi dan perpajakan, pengawasan persaingan bisnis.
2. ***Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung IPTEKIN/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)***; menggambarkan kelembagaan yang harus dibangun untuk memperkuat sumber penghasil inovasi dan memperkuat pengguna IPTEKIN, khususnya UMKM. Antara lain terdiri atas pengembangan kelembagaan inovasi (termasuk revitalisasi kelembagaan IPTEKIN, pengembangan organisasi profesi dan bisnis), pengembangan daya dukung IPTEKIN (termasuk pengembangan SDM IPTEKIN, pengembangan teknologi, pengembangan sumber pendanaan IPTEKIN), pengembangan absorpsi/daya serap IPTEKIN UMKM (modernisasi UMKM).
3. ***Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi adalah keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa); menggambarkan kelembagaan kerjasama antara penghasil dan***

pengguna. Antara lain terdiri atas penguatan kelembagaan kolaborasi (termasuk kelembagaan strategis dan program kemitraan strategis inovasi), peningkatan difusi IPTEKIN dan praktik baik hasil litbangyasa (termasuk diseminasi hasil litbang, peningkatan transaksi bisnis dan non bisnis, pemanfaatan kepakaran bagi pemanfaatan litbang, alih teknologi).

4. ***Elemen 4: Budaya inovasi.*** Menggambarkan kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Antara lain terdiri atas penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan (termasuk pendididn dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, kampanye kepedulian inovasi), peningkatan perusahaan pemula berbasis IPTEKIN (termasuk inkubasi tekno-bisnis, insentif pembiayaan usaha pemula), bantuan teknis peningkatan kapasitas pelaku bisnis, reformasi bidang publik (termasuk peningkatan kapasitas pelaku kewenangan publik) penguatan kohesi sosial (termasuk pengelolaan teknologi tradisional, inventarisasi dokumen pengetahuan masyarakat)
5. ***Elemen 5: Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah.*** Menggambarkan kondisi fokus pembangunan serta koherensi kebijakan penguatan inovasi. Antara lain terdiri atas prakarsa pengembangan klaster industri (termasuk pengembangan klaster indfustri berbasis unggulan daerah), koordinasi kebijakan daerah-daerah dan daerah-pusat (termasuk kerjasama antar daerah dan kerjasama antara daerah dan pusat).
6. ***Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global.*** Menggambarkan kondisi kesiapan dalam menghadapi perkembangan dunia yang menyangkut isu-isu lingkungan, HAM, standar, HKI, dan gender. Antara lain terdiri atas fasilitasi peningkatan standar produk (Measurement, Standard, Testing and Quality), audit teknologi di badan-badan usaha, perbaikan teknologi bisnis, penguatan kerjasama internasional.

Agenda-agenda atau Kerangka Kebijakan Inovasi tersebut diimplementasikan kedalam 5 (lima) pilar prakarsa inovasi, yakni ***Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Penguatan Klaster Industri, Penguatan Jaringan Inovasi, Penguatan Teknopreneur dan Pengembangan Tematik Daerah.***

Kelima pilar prakarsa tersebut akan mengerucut ke dalam serangkaian kegiatan pendampingan teknis, pengkajian kebijakan (*action research*) dan intermediasi. Memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 lingkup SIDA terbagi 3 aspek utama; Kebijakan SIDA, Penataan Unsur dan Pengembangan SIDA. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan dibentuk Tim Koordinasi dan selanjutnya disusun Roadmap yang diintegrasikan atau diselaraskan dengan RPJMD.

Dokumen *Roadmap* PSIDA Kota Pekalongan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan RKPD yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh program dan kegiatan kolaboratif di Kota Pekalongan yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing.

1.2 Dasar Legal

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
13. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 071.05/725 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan Tahun 2021-2025;

1.3 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekalongan dengan Roadmap SIDA

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan bertujuan untuk mempercepat proses pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024 melalui terobosan inovatif, khususnya yang terkait tema pembangunan inovasi Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025, dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan yaitu “**Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera**” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

1. Mewujudkan Kondisi Perikehidupan Bermasyarakat dan Berpemerintahan yang Agamis, Berbudaya, Tertib, Aman, dan Demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Berbasis pada, Profesionalisme, Kepercayaan, Komitmen, Partisipatif dan Teknologi Informasi;
3. Mewujudkan Kemajuan Daerah Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Sinergitas Dalam Pengelolaan Kawasan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam;
4. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Didukung Inovasi dan Kreativitas.

Penguatan Sistem Inovasi Kota Pekalongan saat ini merupakan periode baru, setelah periode tahun 2016-2020 berakhir. Untuk itu telah dibentuk Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan Tahun 2021-2025.

Roadmap Penguatan SIDa 2021-2025 diharapkan sebagai dokumen acuan pelaksanaan penguatan SIDa Kota Pekalongan, di samping sebagai salah satu dokumen rujukan penyusunan RPJMD 2021-2024 Kota Pekalongan.

1.4 Keterkaitan *Roadmap SIDA* dan Dokumen Strategis Daerah



Gambar 1.1 Roadmap di Antara Dokumen Strategis Daerah

1.5 Sistematika *Roadmap*

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, maka sistematika terdiri dari muatan-muatan:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya *roadmap*, dasar legal, keterkaitan RPJMD dan *roadmap* dan sistematika.

BAB 2 : Kondisi Penguatan SIDA Saat ini

Bab ini menyajikan profil dayaasaing daerah, capaian penguatan PSIDA, penataan unsur, kebijakan dan pengembangan SIDA.

BAB 3 : Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA

Bab ini menguraikan tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam Penguatan SIDAa di masa datang, di mana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

BAB 4 : Kondisi SIDA yang akan dicapai

Bab ini berisi kondisi SIDA yang akan dicapai dalam beberapa tahun kedepan (misalkan 5 tahun yang akan datang) berdasarkan hasil analisis kondisi SIDA saat ini serta hasil analisis tantangan dan peluang Penguatan SIDA.

BAB 5 : Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA

Bab ini menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi penguatan SIDA digambarkan melalui pilar-pilar atau lima prakarsa strategis. Arah kebijakan Penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalammen capai tujuan dan sasaran penguatan SIDA.

BAB 6 : Indikator dan Program

Fokus program prioritas merupakan uraian rinci dari setiap elemen KKI yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta program yang harus dijalankan.

BAB 7 : Program dan Rencana Aksi

Rencana aksi Penguatan SIDA merupakan wujud implementasi strategi Penguatan SIDA dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas, dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan SIDA, pendanaan, dan penanggungjawab.

BAB 8 : Penutup

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH DAN SIDA SAAT INI

2.1. Kondisi Umum Kota Pekalongan

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan dibangunnya *interchange* jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (Jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografisalami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan,

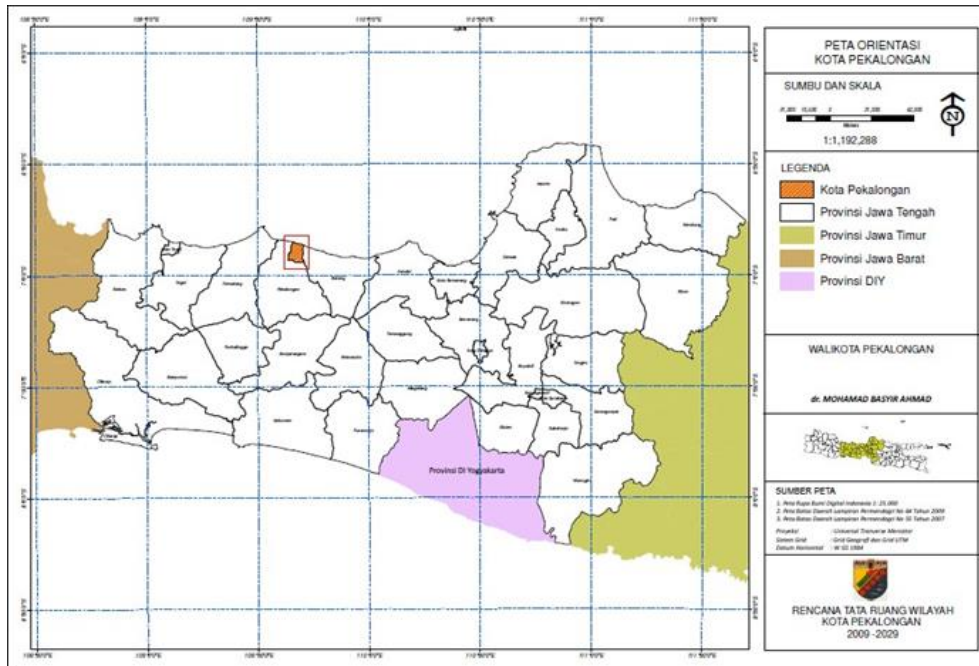
sejalan dengan akan selesainya pembangunan tanggul rob oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Di samping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Program Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, di mana Kota Pekalongan menjadi salah satu sasaran program tersebut khususnya dalam hal penanganan masalah banjir rob.

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 6° 50' 42"-6° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang, perekonomian Kota Pekalongan tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan sebesar 5,69%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,32%. Distribusi PDRB tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan disumbang oleh sektor perdagangan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,70%, penyumbang terbesar

kedua adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 21,24% dan di urutan ketiga adalah sektor Konstruksi sebesar 14,57%. Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

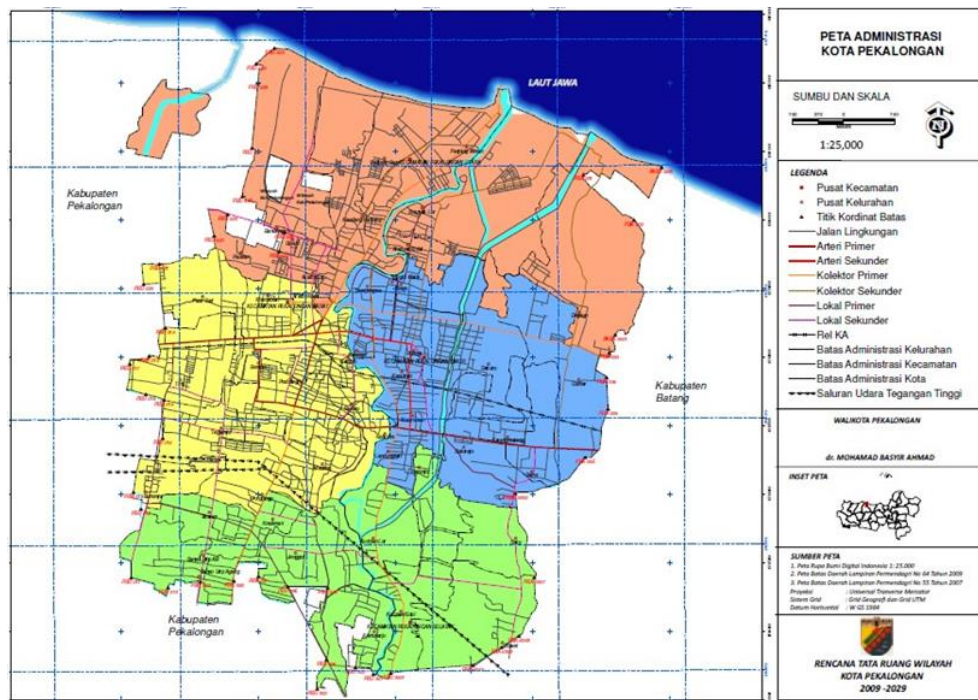
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,

secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1.	Kecamatan Pekalongan Barat	10,5	22
2.	Kecamatan Pekalongan Timur	9,52	21
3.	Kecamatan Pekalongan Selatan	10,80	24
4.	Kecamatan Pekalongan Utara	14,88	33
	TOTAL	45,25	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirta dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan

industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 menjadi salah satu pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan pembangunan tahunan (RKPD).

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas sistem pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana kota. Sistem Pusat Pelayanan Kota dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Pusat pelayanan kota meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan pusat pelayanan peribadatan skala regional yang ada di wilayah Kelurahan Kauman. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai pusat pelayanan pendidikan skala regional, pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kota, pusat pelayanan pendidikan skala regional dan pusat perdagangan-jasa skala kota. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, sebagai pusat perdagangan-jasa skala kota. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagai pusat perdagangan-jasa skala kecamatan. Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi pusat perdagangan-jasa skala lingkungan, pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat

pengembangan agama Islam skala kota, pusat pelayanan pemerintahan skala kota dan pusat pelayanan pendidikan skala kota.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang

Untuk rencana sistem jaringan prasarana kota terdiri atas sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Gambaran lebih detil dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (pada saat ini sedang dilakukan proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029 sehingga jika perubahan RTRW telah ditetapkan maka akan berimplikasi terhadap beberapa perubahan substansi pada RTRW Kota Pekalongan, termasuk rencana pola ruang) :

a) Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai memiliki luas ± 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas ± 120 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggung dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremini. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak dan Degayu.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi Syawalan di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah Kota Pekalongan) dan RTH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas wilayah Kota Pekalongan). RTH publik

terdiri dari taman kota, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan jalan, RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

4) Kawasan Rawan Bencana Alam

Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banjir, dan rawan bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

5) Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah (CAT) Pemalang-Pekalongan. Hal ini diatur

oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18' 45,31" - 1090 51' 52,35" Bujur Timur dan 060 46' 33,52" - 070 13' 24,20" Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan.

b) Kawasan Budidaya

1) Kawasan Peruntukan Pertanian

Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono, Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkratonkramat, Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran Kradenan dan Banyurip.

2) Kawasan Peruntukan Perikanan

Terdiri atas kawasan-kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan layang. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan Krapyak, Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Bandeng; serta kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di Polder Bandengsari

seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Nila. Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan.

3) Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan tinggi, perumahan berkepadatan sedang, dan perumahan berkepadatan rendah. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan kepadatan 251 jiwa/ha dengan luas lahan kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar.

4) Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan di kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo,

Jl. Gatot Subroto, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun- Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar.

5) Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan Bendan Kergon, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl. Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda Kelurahan Bendan Kergon, kawasan Jl. Imam Bonjol dan kawasan Jl. Diponegoro Kelurahan Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

6) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya, diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan mikro seluas

kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi : a) industri batik dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip; dan c) industri pengeringan ikan diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu.

7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari : pengembangan dermaga kapal wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai di antara dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak. Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer.

8) Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal

Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas : kawasan alun-alun; kawasan Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen; kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan Monumen; kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto; kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini; kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan Jalan dr. Soetomo.

9) Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banjir; ruang evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa : lapangan sepakbola di Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

10) Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas: polder Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan tambak/rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat. Ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota.

11) Kawasan Peruntukan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

c) Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai

dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk lanskap pesisir.

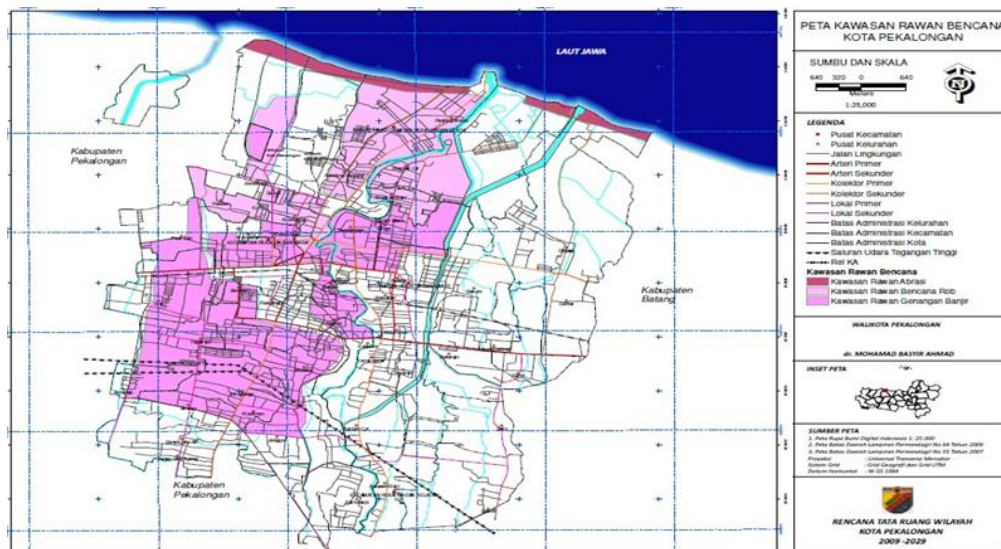
Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisikobesar.

Bencana alam yang telah dan risiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambahintensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya

yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini. Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi juga akibat rob yang lebih dominan.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.4 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di kawasan tersebut, abrasi bahkan

telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi risiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah *alluvial*, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

2.1.3. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2019 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.097 jiwa, terdiri dari 153.778 jiwa laki-laki dan 153.319 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex ratio sebesar 99,94 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,95 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2015	148.295	148.238	296.533
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.778	153.319	307.097

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sekitar 2.641 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sebesar 0,86%.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2015	0,96
2016	0,95
2017	0,94
2018	0,96
2019	0,86

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Tabel 2.3 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2015- 2019. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,86%. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,86%.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2015	6.553,22
2016	6.612,64
2017	6.671,16
2018	6.729,00
2019	6.786,67

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2019, pendidikan SD ke bawah sebanyak 56.934 jiwa (35,89%), diikuti

SMP sebanyak 35.203 jiwa (22,19%) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 66.498 jiwa (41,92%) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2019 berjumlah 158.635 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2015, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) keatas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan komposisi pekerja pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu 56.934 jiwa (35,89%) dan tingkat SLTP 35.203 jiwa (22,19) serta tingkat pendidikan SM (sekolah menengah) ke atas yaitu 66.498 jiwa (41,92%). Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤ SD		SLTP		≥ SM		
	Orang	%	orang	%	orang	%	
2015	58.503	40,80%	30.951	21,59%	53.922	37,61%	143.376
2016	58.503	40,80%	30.951	21,59%	53.922	37,61%	143.376
2017	61.346	41,03%	30.055	20,11%	58.086	38,86%	149.487
2018	61.358	40,47%	31.072	20,50%	59.167	39,03%	151.597
2019	56.934	35,89%	35.203	22,19%	66.498	41,92%	158.635

Sumber: diolah dari Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengan tahun 2015

Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat *trendnya* selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2015 berjumlah 53.922 jiwa atau setara 37,61% dari jumlah pekerja, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 66.498 jiwa atau setara 41,92%. Secara garis besar selama lima tahun terakhir jumlah pekerja untuk tingkat SD, SMP dan SM mengalami fluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 158.635 jiwa.

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2019 paling banyak berada pada rentang usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 30.157 jiwa, diikuti rentang usia 15- 19 tahun sebanyak 27.822 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak

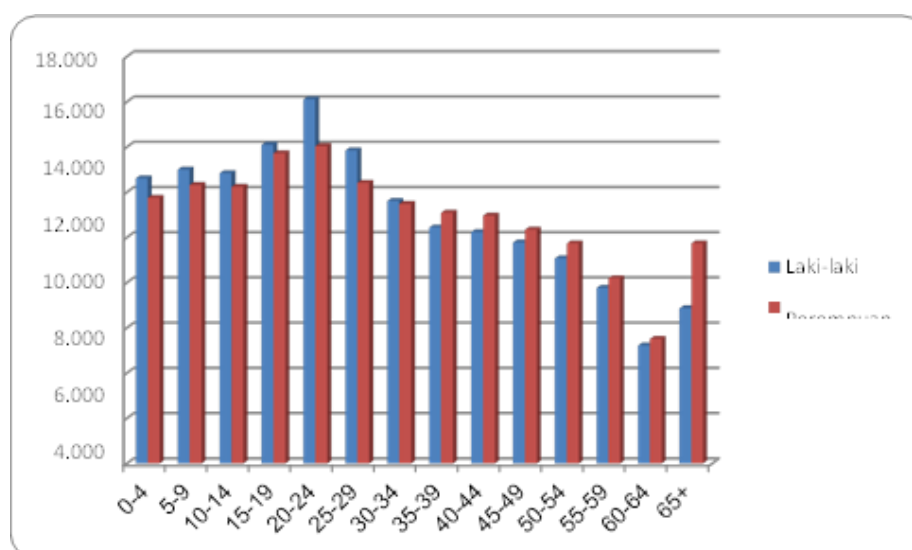
27.336 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.616	11.755	24.371
5-9	13.005	12.322	25.357
10-14	12.842	12.240	25.082
15-19	14.098	13.724	27.822
20-24	16.113	14.044	30.157
25-29	13.849	12.418	26.267
30-34	11.613	11.484	23.097
35-39	10.439	11.095	21.534
40-44	10.238	10.968	21.206
45-49	9.776	10.346	20.122
50-54	9.075	9.740	18.815
55-59	7.767	8.194	15.916
60-64	5.220	5.509	10.729
65+	6.867	9.740	16.607
Jumlah	153.518	153.579	307.097

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

Dan disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.

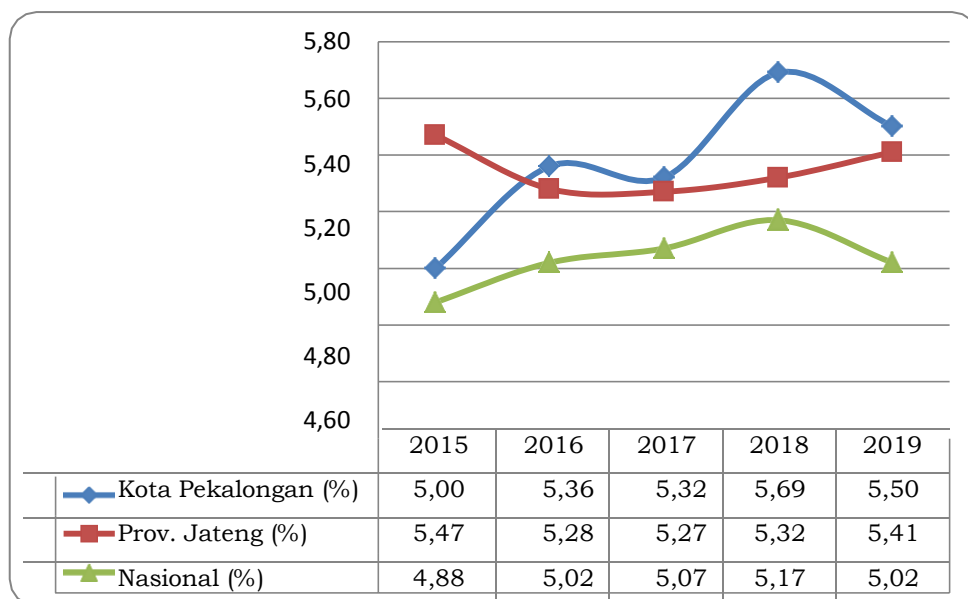


Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 (diolah), 2020

Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

2.1.4. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2015-2019.



Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 (diolah), 2020

Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

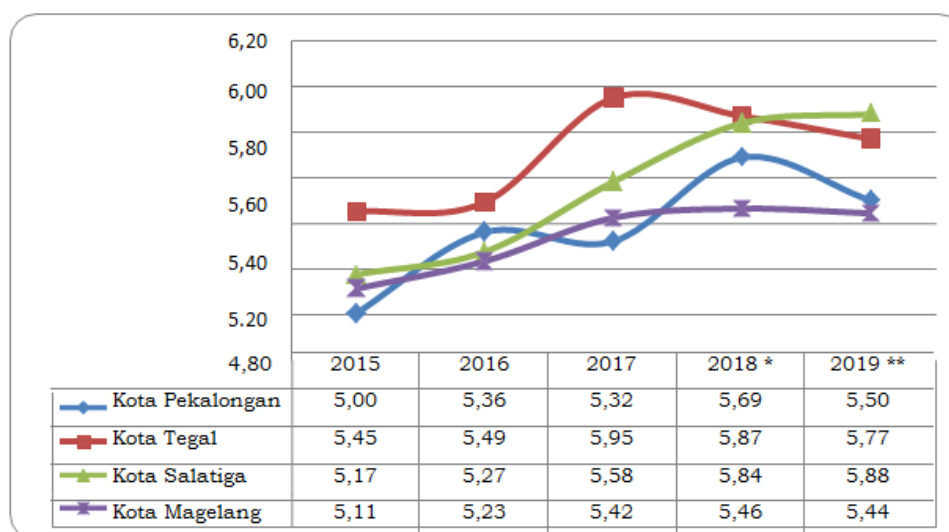
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,00% hingga 5,69%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, hanya pada tahun 2015 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Selebihnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kota Pekalongan selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,69%, dan posisi terendah pada tahun 2015 sebesar 5,00%.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah di antara ketiga Daerah tersebut.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih di bawah Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Namun tahun 2017 berada di bawah ketiga Daerah setara tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang namun masih di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2015 – 2019

2.1.4.1. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun.

Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2019 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 21,79% dan ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yakni 21,76%, kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,88% dan ini turun dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 20,94% dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,63% dan ini naik dibandingkan tahun 2018 yakni 14,60%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada table 2.7.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,32	5,26	4,72	4,67	4,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,56	21,43	21,13	20,94	20,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	14,33	14,36	14,39	14,60	14,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,87	21,72	21,78	21,76	21,79
H	Transportasi dan Pergudangan	6,23	6,05	6,32	6,28	6,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,28	5,42	5,39	5,42	5,44
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	3,88	4,15	4,21	4,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	6,14	6,26	6,27	6,13
L	Real Estat	2,66	2,68	2,68	2,71	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,75	4,72	2,58	4,47
P	Jasa Pendidikan	4,52	4,58	4,67	4,75	4,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,25	1,25	1,26	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,77	1,82	1,84	1,87	1,90
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

***Angka sangat-sangat sementara

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2019, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,66%. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi meskipun cenderung semakin lemah. Tahun 2015, peranan kategori ini sebesar 5,32%, kemudian menguat tahun 2016 sebesar 5,26%, dan semakin menurun tahun 2017 sebesar 4,74%, tahun 2018 sebesar 4,67% dan 4,66% di tahun 2019.

b) Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri

Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 20,88% pada tahun 2019.

Peran kategori ini mengalami pelemahan dibandingkan perannya selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni pada tahun 2015 sebesar 21,56% persen hingga pada tahun 2019 makin kuat menjadi 20,88 persen.

c) *Pengadaan Listrik dan Gas*

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16% terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2019, sama seperti tahun 2018 yaitu 0,16%. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cukup stabil. Tahun 2016 hingga tahun 2019 peran kategori ini sebesar 0,16%. Hanya pada tahun 2015, perannya menurun sebesar 0,15%.

d) *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang*

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan stabil selama 2015-2018 yaitu sebesar 0,11% dan menurun 0,10% pada tahun 2019.

e) *Konstruksi*

Pada tahun 2019 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 14,63% terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2015 sebesar 14,33%, tahun 2016 sebesar 14,36%, tahun 2017 sebesar 14,39%, tahun 2018 sebesar 14,60% dan tahun 2019 sebesar 14,63%. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju

pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan besarnya adalah 5,89% pada tahun 2015 pertumbuhannya 5,64%. Pertumbuhan konstruksi di tahun 2016 besarnya 4,52%, 5,51% pada tahun 2017, 5,59% pada tahun 2018 dan 4,71% pada tahun 2019.

f) Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20%. Pada tahun 2019, peranan kategori ini sebesar 21,79% lebih kecil dibandingkan peranan di tahun 2015 yang sudah mencapai 21,87% terhadap PDRB Kota Pekalongan.

g) Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 6,40% di tahun 2019. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari 2015 – 2019 peran kategori ini berfluktuatif. Tahun 2015 sebesar 6,23%, tahun 2016 turun menjadi 6,05%, tahun 2017 naik menjadi 6,32%. Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 6,28%, namun tahun 2019 kembali meningkat menjadi 6,40%.

h) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,44%. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan tahun 2019 merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sebesar 5,28%, tahun 2016 sebesar 5,42%, tahun 2017 sebesar 5,39% dan tahun 2018 sebesar 5,42%.

i) Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah,

terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 3,88%, tahun 2017 sebesar 4,15%, tahun 2018 sebesar 4,21%, dan tahun 2019 sebesar 4,36%. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2015 sebesar 8,58%, tahun 2016 sebesar 8,47%, tahun 2017 sebesar 11,94%, tahun 2018 sebesar 10,43%, dan tahun 2019 sebesar 10,57%.

j) Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2019, perannya sebesar 6,13% terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, selama empat tahun terakhir peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2015 sebesar 5,95%, tahun 2016 sebesar 6,14%, tahun 2017 sebesar 6,26%, dan tahun 2018 sebesar 6,27%.

k) Real Estate

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,6%. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2015-2019 sebesar 2,66%, 2,68%, 2,68%, 2,71% dan 2,71%. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 5%. Laju pertumbuhan dari tahun 2015-2019 adalah tahun 2015 sebesar 7,47%, pada tahun 2016 sebesar 6,54%, pada tahun 2017 5,84%, dan 5,97% di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5,62%.

l) Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peran dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,39% pada tahun 2015, tahun 2016 menjadi sebesar 0,40%, tahun 2017 sebesar 0,41%, tahun 2018 sebesar 0,42% dan tahun 2019 naik menjadi 0,44%. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan sangat fluktuatif dari tahun

2015 sampai tahun 2019. Laju pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 8,94%, tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 10,28%, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 7,85%, ditahun 2018 tumbuh sebesar 7,95 dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 8,31%.

m) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2015-2019 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2015 sebesar 4,75%, tahun 2016 sebesar 4,75%, tahun 2017 sebesar 4,72%, tahun 2018 sebesar 2,58% dan tahun 2019 sebesar 4,47%. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung melambat , yaitu dari sebesar 5,08% di tahun 2015 menjadi 2,58% di tahun 2016. Pertumbuhan pada 2017 sebesar 4,11%, 3,99% di tahun 2018 dan 3,82% di tahun 2019.

n) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2019, jasa pendidikan mempunyai peranan 4,65% dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2018 yang peranannya sebesar 4,75%. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada kurun waktu antara 2015-2018 yaitu tahun 2015 sebesar 4,52%, tahun 2016 sebesar 4,58%, tahun 2017 sebesar 4,67%, dan di tahun 2018 sebesar 4,75%. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada periode tahun 2015 – 2018, masing-masing yaitu 4,78% di tahun 2015, tahun 2016 tumbuh sebesar 7,49%, tahun 2017 tumbuh sebesar 6,43%, tahun 2018 tumbuh sebesar 7,59% dan pertumbuhannya melambat di tahun 2019 sebesar 2,63%.

o) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2015-2019 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar 1,22%, tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 1,25%, tahun 2018 sebesar 1,26%, dan tahun 2019 sebesar 1,29%. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi perlambatan ekonomi khususnya kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,65% melambat di tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar masing-masing 7,74%, 7,93% dan 7,84%.

p) Jasa Lainnya

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2015 sebesar 1,77%, tahun 2016 sebesar 1,82%, tahun 2017 sebesar 1,84%, tahun 2018 sebesar 1,87%, dan tahun 2019 sebesar 1,90%. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama tahun 2015-2019, yaitu tahun 2015 sebesar 3,20%, pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 7,23%, tahun 2017 naik menjadi 8,09%, tahun 2018 pertumbuhannya kembali naik menjadi 9,02% dan tahun 2019 turun menjadi 8,47%.

2.1.4.2. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5% pada tahun 2015 dan 5,50% pada tahun 2019. Pada tahun 2015, pertumbuhan tiga besar yakni Jasa Perusahaan sebesar 8,94%, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,58%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,78%. Pada tahun 2019, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar di antaranya adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 10,57%, Jasa Lainnya 8,47% dan Jasa Perusahaan sebesar 8,31%. Hal ini sesuai dengan Kota Pekalongan yang saat ini sedang menuju Pekalongan *SmartCity*.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,98	-4,80	3,03	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,99	4,16	4,35	4,46	4,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,71	5,69	4,93	5,29	3,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,54	2,16	5,86	5,16	4,21
F	Konstruksi	5,64	4,52	5,51	5,59	4,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	4,86	5,71	5,53	5,47
H	Transportasi dan Pergudangan	5,45	5,16	5,84	7,07	7,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	7,94	5,92	5,88	6,76
J	Informasi dan Komunikasi	8,58	8,47	11,94	10,43	10,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	9,03	7,35	5,12	3,76
L	Real Estat	7,47	6,54	5,84	5,97	5,62
M,N	Jasa Perusahaan	8,94	10,28	7,85	7,95	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	2,58	3,75	3,99	3,82
P	Jasa Pendidikan	4,78	7,49	6,82	7,59	2,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	9,65	7,74	7,93	7,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,20	7,23	8,09	9,02	8,47
Produk Domestik Regional Bruto		5,00	5,36	5,32	5,69	5,50

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2020

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

***Angka sangat sangat sementara

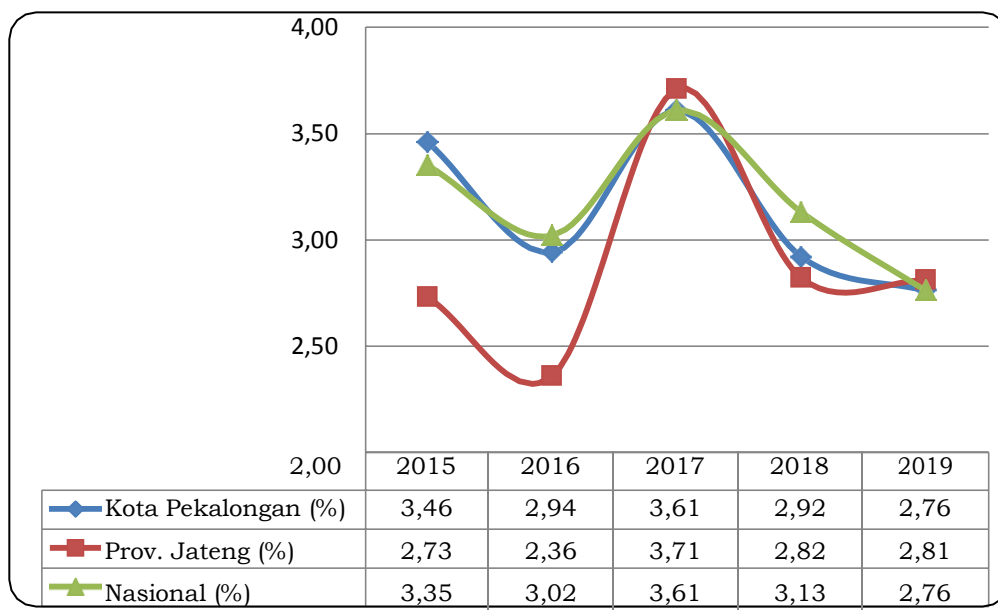
Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2015-2019 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2019 mayoritas adalah sektor Informasi dan Komunikasi.

2.1.4.3. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya

menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2015 – November 2019, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36% sampai 3,71%. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2015 dan 2016 sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah tetapi masih di bawah nasional.

Adapun perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik 2.12 berikut.



Sumber : www.bps.go.id, 2020

Gambar 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (%)

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport. Dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 (%)

Kelompok Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Umum	3,46	2,94	3,61	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,62	6,03	4,63	3,66	8,00
Makanan Jadi	5,73	5,85	2,46	3,05	1,60
Perumahan	2,79	0,88	4,02	3,47	0,40
Sandang	5,39	5,01	5,40	2,51	3,31
Kesehatan	3,70	1,99	1,15	0,54	4,75
Pendidikan	6,16	2,84	3,26	1,33	3,74
Transport	-1,66	-3,07	3,96	2,43	0,31

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

2.1.4.4. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,12 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 33,27 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp. 33,27 juta meningkat sebesar 8,20% dibanding PDRB per kapita tahun 2017 sebesar Rp. 30,75 juta.

Tabel 2.10 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016*	2017**	2018***
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	7.092,78	7.778,27	8.507,54	9.287,96	10.114,28
- ADHK (Miliar Rp)	5.755,28	6.043,10	6.367,27	6.706,27	7.087,92
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	24,122	26,188	28,452	30,752	33,270
- ADHK (Juta Rp)	19,575	20,347	21,294	22,205	23,316
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (%)	9,77	8,65	8,35	8,23	8,20
- ADHK (%)	4,41	3,94	4,65	4,28	5,00

Sumber : PDRB Kota Pekalongan 2014-2018, 2019

Keterangan :

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

2.1.4.5. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2013 sebesar 0,32 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,91% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,48% sehingga menaikkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,34. Mulai tahun 2015 BPS melakukan penghitungan indeks gini sampai tingkat provinsi, namun untuk kabupaten/kota tidak dilakukan penghitungan.

2.1.4.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.6.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

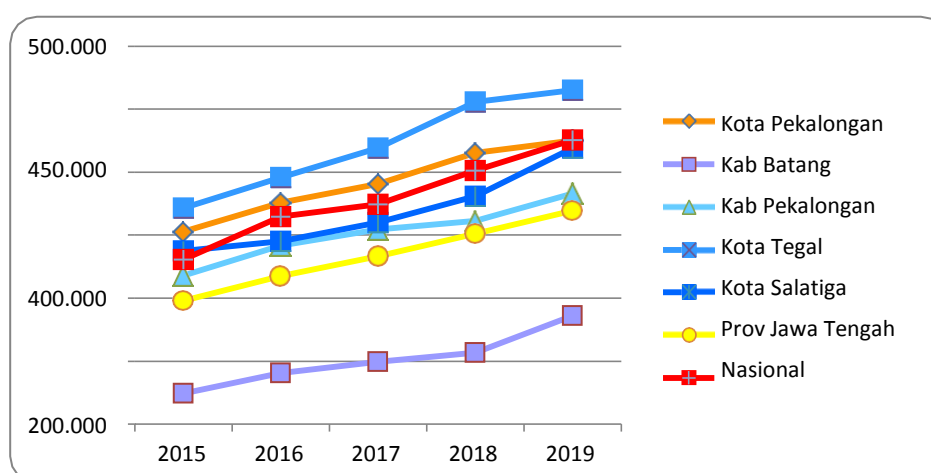
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan pada Maret 2019, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp.425.026/kapita/bulan. Angka ini sedikit di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.425.250. Sedangkan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.369.385,00.

Tabel 2.11 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GKProvinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2015	352.717	224.437	317.796	371.528	337.511	297.851	330.776
2016	375.600	240.541	341.648	395.631	345.146	317.348	364.527
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kota Pekalongan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2019 garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.369.385 dan garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesarRp.425.026.



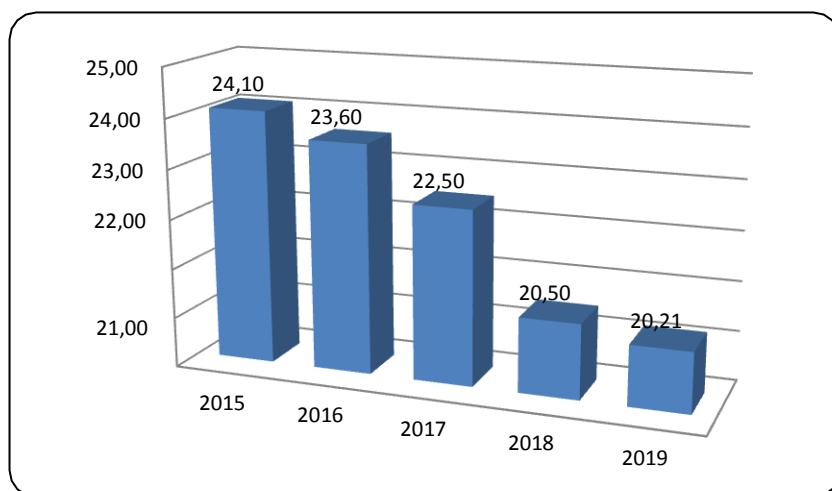
Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

Gambar 2.9 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

2.1.4.6.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan di antaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

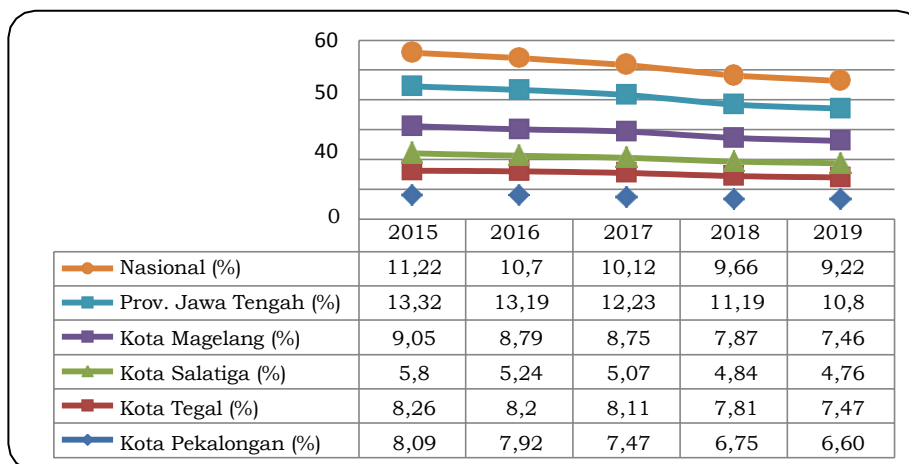


Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 (000 jiwa)

Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, hanya pada tahun 2015 sempat mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 24,1 ribu jiwa. Namun jika dibandingkan dengan Daerah yang setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2019 lebih tinggi dari Kota Salatiga dan lebih rendah dari Kota Tegal dan Kota Magelang, serta lebih

rendah dari Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menekan angka kemiskinan.



Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2020

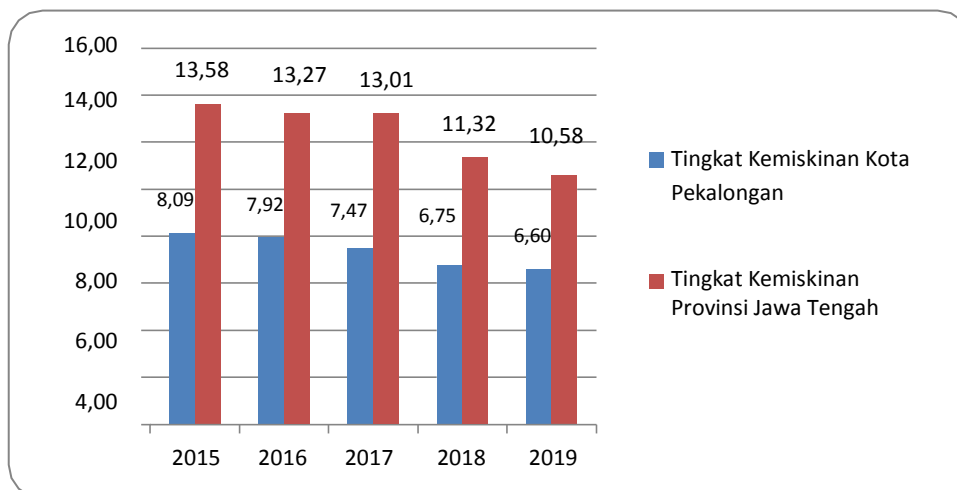
Gambar 2.11 Perbandingan Rasio Penduduk Miskin KotaPekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun2015-2019

Selama kurun waktu 2015 hingga tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Kota Pekalongan juga cenderung menurun. Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 angka ini terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan 8,09 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Jawa Tengah turun menjadi 13,27 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,17 persen sehingga menjadi 7,92 persen.

Tahun 2017 tingkat kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 13,01 persen, sedangkan Kota Pekalongan mencapai 7,47 persen. Kemudian pada tahun 2018 tingkat kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 11,32 persen, sedangkan Kota Pekalongan menduduki angka 6,75 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Jawa Tengah turun lagi menjadi 10,58 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,15 persen sehingga menjadi 6,6 persen.

Dengan demikian disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata provinsi Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan meski belum signifikan.



Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2020

Gambar 2.12 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

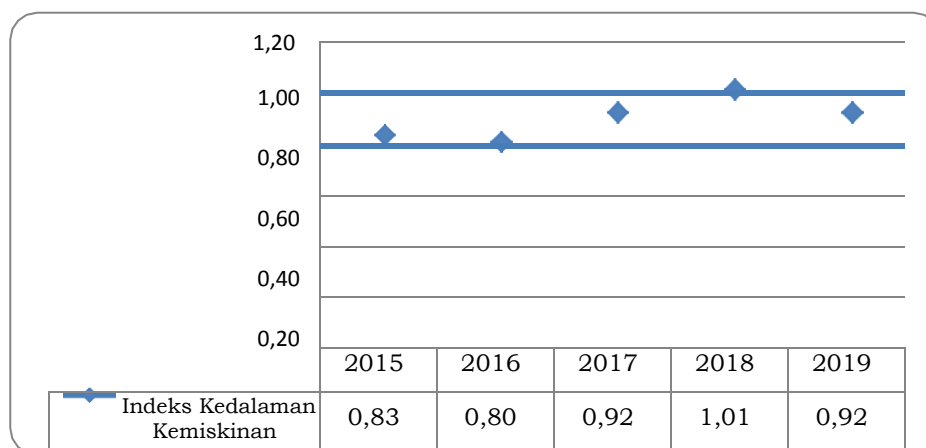
Kota Pekalongan merupakan salah satu kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada rata-rata provinsi, di mana tingkat kemiskinan rata-rata provinsi sebesar 11,32 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan jauh di bawahnya, yaitu 6,75 persen. Jika diurutkan, maka tingkat kemiskinan Kota Pekalongan berada pada urutan terendah ketiga di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.4.6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2015-2019 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, di mana pada tahun 2015 sebesar 0,83. Selanjutnya turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,8. Namun pada tahun 2017 indeks ini mengalami

kenaikan sebesar 0,12 yaitu menjadi 0,92. Dan pada tahun 2018 mencapai 1,01 serta mengalami penurunan kembali menjadi 0,92 di tahun 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

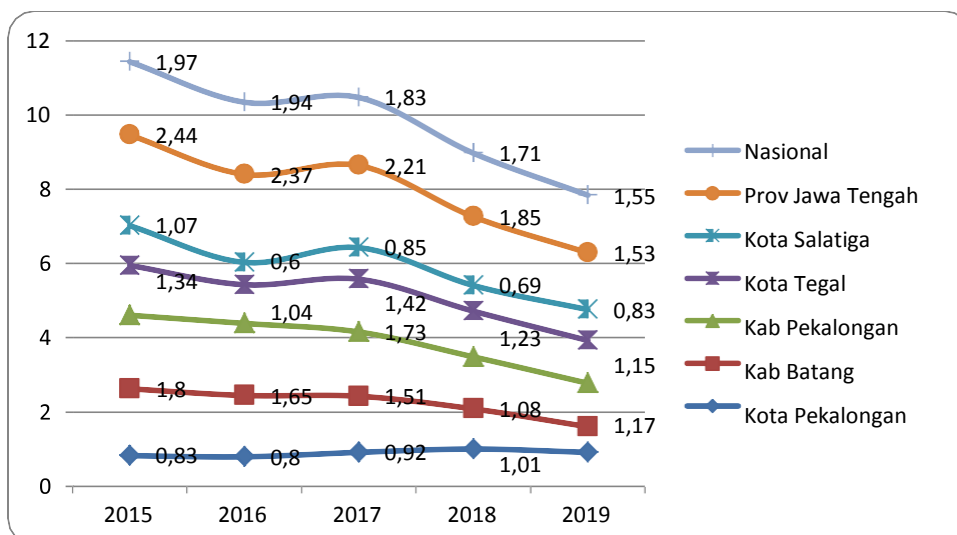


Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2020

Gambar 2.13 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung stagnan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan cenderung menurun. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



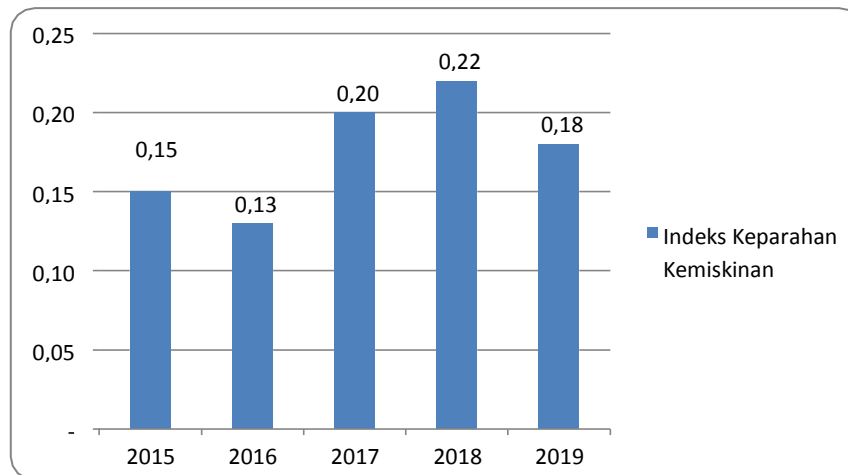
Sumber : Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

2.1.4.6.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2015 sebesar 0,15. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016 indeks ini mengalami penurunan lagi menjadi 0,13, yang berarti kondisi membaik. Kemudian indeks ini justru naik lagi pada 2017 menjadi 0,2 dan di tahun 2018 naik kembali mencapai 0,22. Namun indeks P2 ini menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 0,18 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2019 semakin berkurang dibanding tahun 2018.

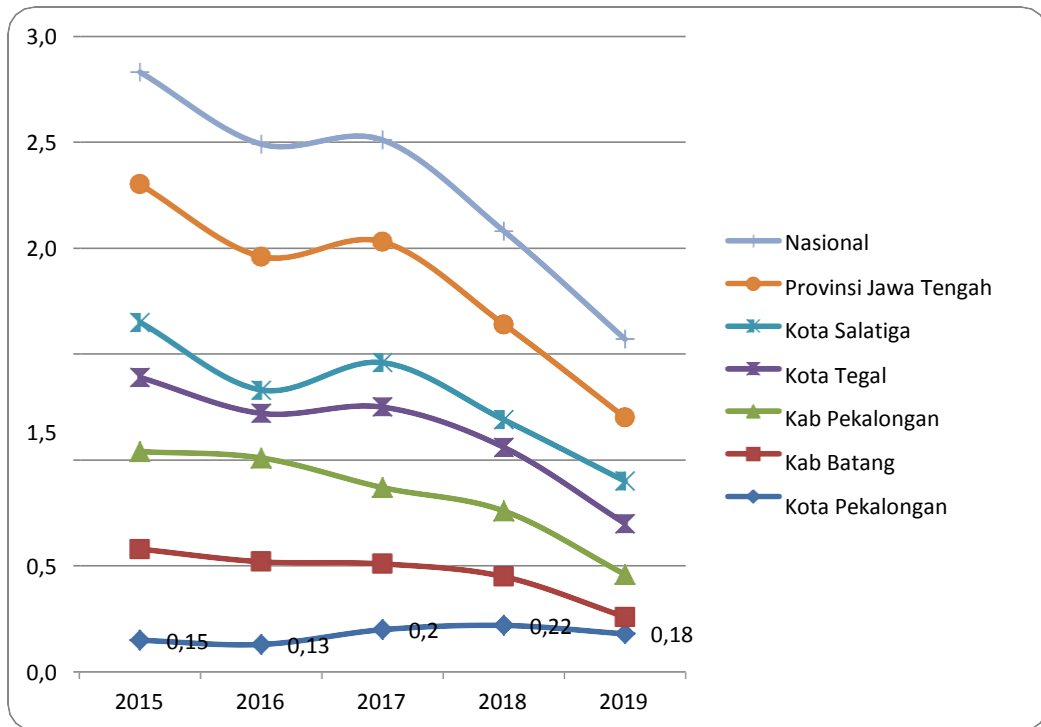


Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2020

Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung mengalami tren penurunan terus-menerus, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan justru cenderung naik. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Salatiga, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020

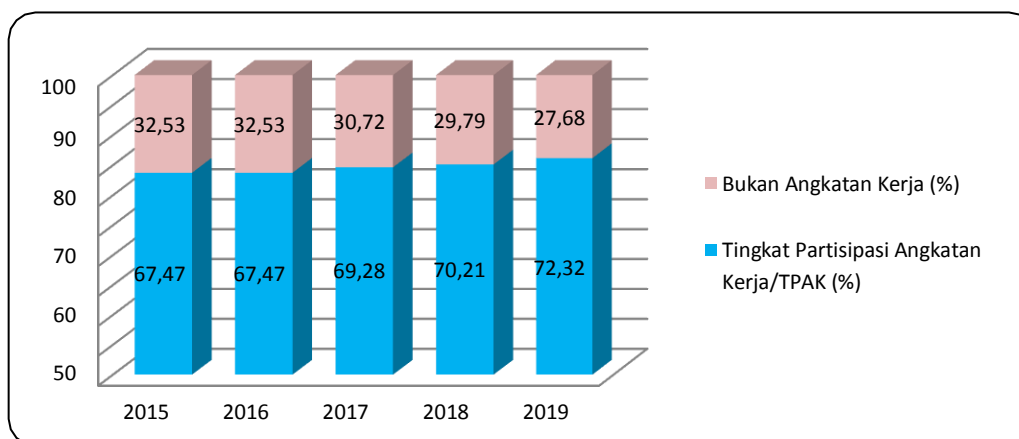
Gambar 2.16 Perbandingan Indeks Keperahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2015-2019

Pasca pandemi COVID-19, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di KotaPekalongan.

2.1.4.7. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2019 tercatat sekitar 230.027 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja meningkat dari 70,21% menjadi 72,32% atau naik 2,11 poin pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) meningkat. Sisanya, yaitu 27,68% adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Peningkatan TPAK pada tahun 2019 seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

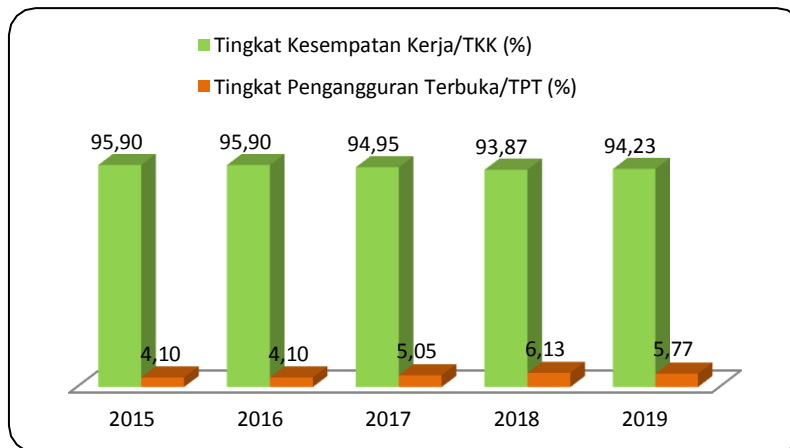


Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

*Keterangan : tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan

Gambar 2.17 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 94,23%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,77% atau menurun 0,36 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 6 orang yang benar-benar menganggur.



Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

*Keterangan : tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan

Gambar 2.18 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa musibah seperti kebakaran Pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Upaya yang telah dilakukan antara lain menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan.

2.1.4.8. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung meningkat. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, di mana pada tahun 2015 berada di angka 3,07 dan terus merangkak naik di angka 3,34 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 menurun tajam di angka 1,03 dan kembali melonjak hingga di tahun 2019 menjadi 3,78. Sepanjang lima tahun terakhir, rata-rata kasus tertinggi adalah pencurian.

Tabel 2.12 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Angka Kriminalitas
2015	3,07
2016	3,34
2017	1,03
2018	3,78
2019	4,59

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

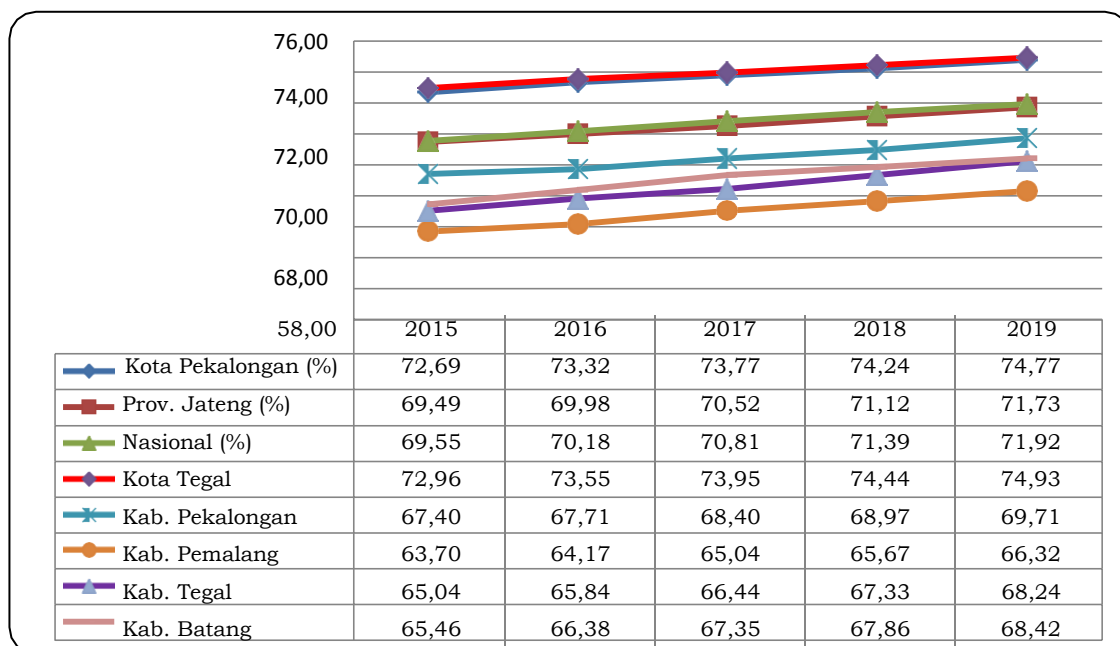
2.1.4.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar 72,69 menjadi 74,77 di tahun 2019. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2015 sampai 2019, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama

Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.



Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2020

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2015-2019 (%)

Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dari table 2.14.

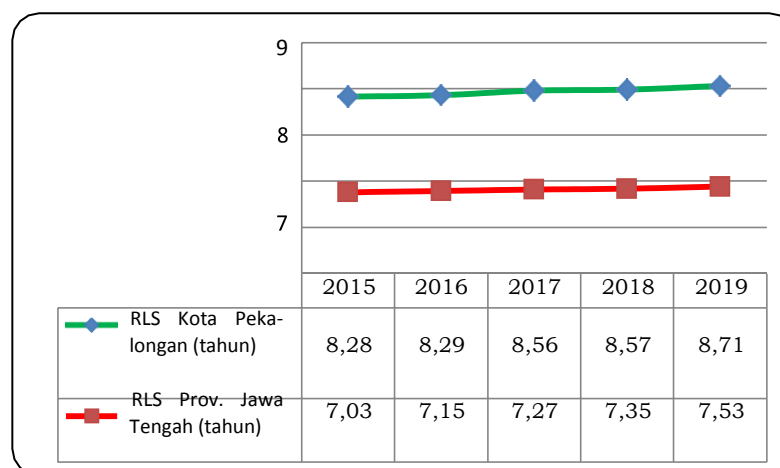
Tabel 2.13 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2015	8,28	12,59	74,11	11.253,00	72,69
2016	8,29	12,77	74,15	11.721,00	73,32
2017	8,56	12,78	74,19	11.800,00	73,77
2018	8,57	12,79	74,25	12.312,00	74,24
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77

Sumber : [BPS Kota Pekalongan, 2020](#)

2.1.4.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah hanya 8,28 tahun, pada tahun berikutnya, 2016 menjadi 8,29 tahun. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah menjadi 8,56 tahun, di tahun 2018 sebesar 8,57 tahun dan tahun 2019 menjadi 8,71 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2019 berada pada angka 7,53.



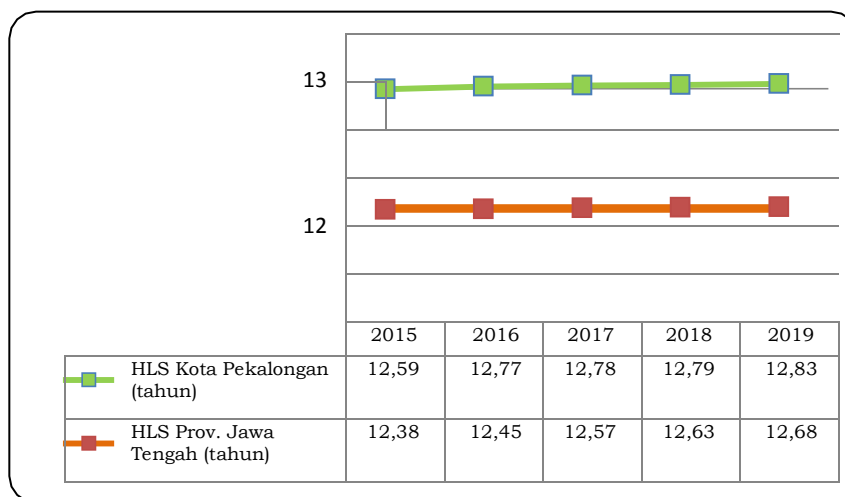
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2020

Gambar 2.20 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

2.1.4.11. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2020

Gambar 2.21 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung meningkat di tiap tahunnya.

Pada tahun 2019 angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 1.283 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

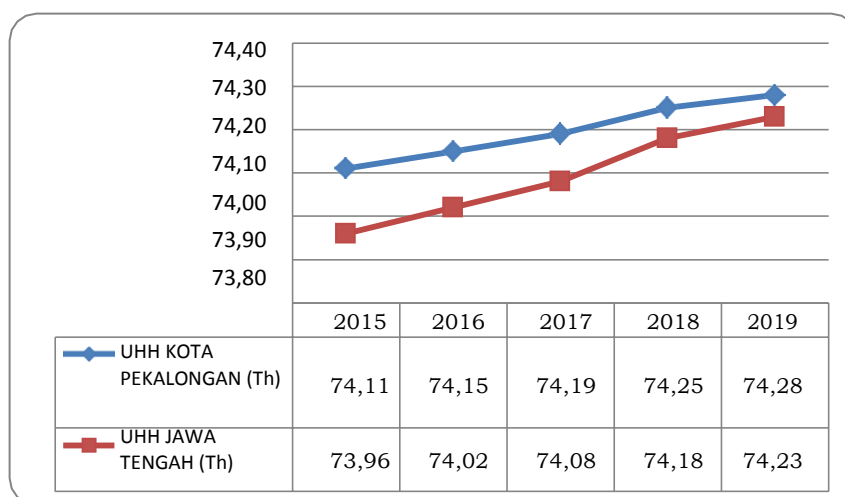
2.1.4.12. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2015 - 2019, Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,11 pada tahun 2015 menjadi 74.28 di tahun 2019, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek

lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).



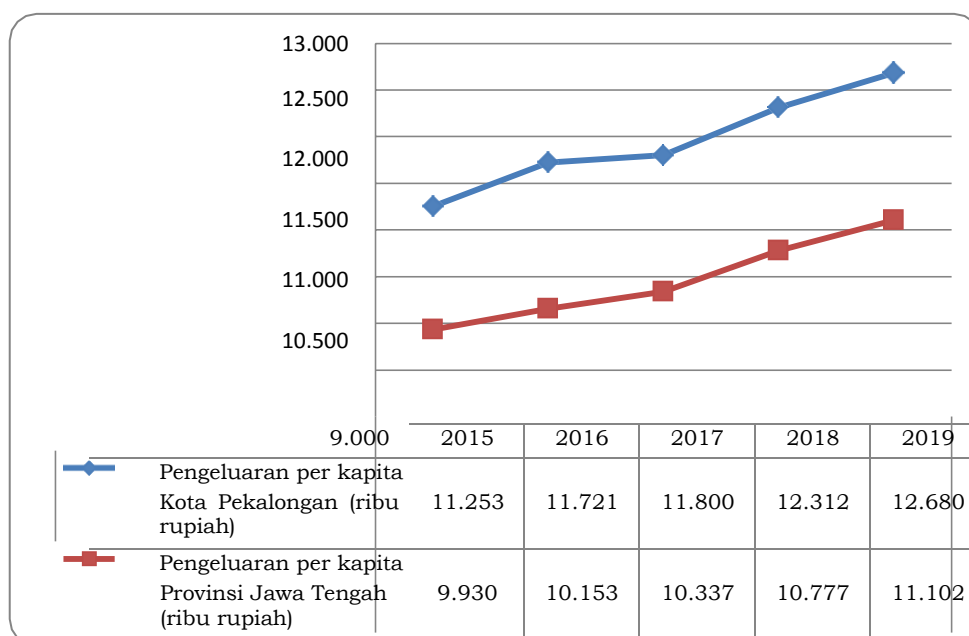
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2020

Gambar 2.22 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan angka Jawa Tengah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.19. Dari tahun 2015 - 2019, UHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.

2.1.4.13. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2015- 2019. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.253.000, kemudian meningkat menjadi Rp.11.721.000 pada tahun 2016. Di tahun 2017 berada di angka Rp.11.800.000, dan di tahun 2018 naik hingga Rp.12.312.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp.12.680.000.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.23 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2015-2019

2.2. Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

2.2.1. Pelaksanaan Lingkup SIDA

Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA), bahwa penyusunan Roadmap SIDA dilakukan oleh Tim Koordinasi SIDA yang dibentuk berdasarkan **Surat Keputusan Walikota**. Rancangan Roadmap SIDA yang mencakup strategi, kebijakan, prioritas dan rencana aksi akan

diimplementasikan dalam bentuk program sektoral dan lintas sektoral dan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD **Kota Pekalongan**.

2.2.1.1. Kebijakan Penguatan SIDA Kota Pekalongan

a) Implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Implementasi Penguatan SIDA di Kota Pekalongan tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan No 16A Tahun 2016 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Pekalongan 2016-2020. Salah satu pertimbangan implementasi SIDA adalah adanya kebutuhan terobosan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dasar legal yang diacu adalah Peraturan Bersama Mendagri dan Menristek, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 65 Tahun 2012 tentang SIDA Provinsi Jawa Tengah.

Implementasi Penguatan SIDA di Kota Pekalongan diharapkan mampu mempercepat pencapaian tema “Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah”

b) Pembentukan/ penguatan Tim Koordinasi SIDA Kota Pekalongan

Dalam rangka Penguatan SIDA telah dibentuk Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Penguatan SIDA Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2025, melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 071.05/725 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2025.

Kegiatan awal yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Rapat Paripurna Penguatan SIDA yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya:

- Menetapkan tema Penguatan SIDA dalam mempercepat pembangunan daerah
- Penyusunan dokumen roadmap Penguatan SIDA tahun 2020-2025.

c) SOP Tim Koordinasi dan Pokja

Untuk memperlancar tugas Tim Koordinasi dan Pokja, telah disusun *Standard Operating Procedur* (SOP) yang berisi prosedur operasional yang digunakan untuk memastikan setiap keputusan,

langkah atau tindakan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.2.1.2. Penataan Unsur SIDA

a. Kelembagaan

Terdapat 7 (tujuh) perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dalam bentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut maupun universitas. Keberadaan dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain IAIN Pekalongan, Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Keperawatan Pekalongan, Universitas Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, STMIK Widya Pratama, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan ini diharapkan dapat mendukung penguatan fungsi *Penta Helix* (birokrasi, bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan media);

b. Jaringan Sistem Inovasi Daerah

- Menjalinkan komunikasi secara intensif antar lembaga melalui forum komunikasi, penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, kerjasama Kelitbangan dan lain sejenisnya untuk memperkuat sistem inovasi di **Kota Pekalongan**;
- Mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten dibidangnya antara lain BPPT untuk meningkatkan kapasitas inovatif **Kota Pekalongan**;
- Mengembangkan kelembagaan jaringan inovasi melalui penyusunan konsep pengembangan ekonomi kreatif.

c. Sumber Daya Sistem Inovasi Daerah

- Kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan dan pengorganisasian dengan memanfaatkan keberadaan sejumlah perguruan tinggi seperti **Universitas Pekalongan, Politeknik Pusmanu, STIE Muhammadiyah Pekalongan, dan STMIK Widya Pratama, Pekalongan**
- Kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan dan pengorganisasian dengan memanfaatkan keberadaan 8 perguruan tinggi;

- Pengembangan kekayaan intelektual dan informasi melalui penyusunan basis data inovasi daerah;
- Pengembangan sarana dan prasarana Iptek dengan memanfaatkan Laboratorium baik yang dimiliki Pemerintah Kota ataupun Perguruan Tinggi, serta Kawasan Technopark dan Pusat Inovasi yang dimiliki oleh Kota Pekalongan.

d. Pengembangan SIDA

Dari hasil survey awal, Kota Pekalongan telah menghasilkan beberapa capaian yang terkait dengan pengembangan SIDA, khususnya terkait tema Ekonomi Kreatif yaitu Rencana Induk Kelitbang Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2021.

2.2.2. Pelaksanaan Program Iptek dan Inovasi Daerah

2.2.2.1. Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Litbang

Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Litbang di Kota Pekalongan tersaji dalam uraian berikut ini :

Nama Program 1 : Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

Kegiatan yang dilakukan :

1. Fasilitasi Sistem Inovasi Daerah
2. Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Nama Program 2 : Pengkajian dan Penelitian

Kegiatan :

1. Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
2. Riset Unggulan Daerah
3. Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
4. Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan

Kegiatan Litbang di Kota Pekalongan pada periode 2016 sampai dengan 2020 telah menghasilkan sejumlah penelitian dan artikel dengan judul sebagai berikut :

**Judul Penelitian berdasarkan Kegiatan Litbang Bappeda Kota
Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

**Tabel 2.14 Judul Penelitian Berdasarkan Kegiatan Litbang Bappeda Kota
Pekalongan Tahun 2016-2020**

Judul Penelitian	Institusi Peneliti	Kegiatan	Tahun
Pembuatan Film “Mendaki Langit” sebagai Media Edukasi Masyarakat Kota Pekalongan untuk Meningkatkan Angka Lama Sekolah	Universitas Pekalongan	Riset Tematik	2016
Pemanfaatan <i>Virtual Reality</i> untuk Pengembangan Kios Informasi Objek Wisata di Kota Pekalongan berbasis Mobile	STMIK Widya Pratama Pekalongan	Riset Tematik	2016
Analisis Existing dan Forecasting Puskesmas BLUD Kota Pekalongan : Upaya Menuju Kemandirian Pengelolaan Layanan Kesehatan Primer	Universitas Pekalongan	Riset Tematik	2016
Sistem Informasi Layanan Kesehatan Berbasis Mobile yang Mengintegrasikan Instansi Layanan Kesehatan di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2016
Pengembangan Buku Panduan Pola Asuh Orang Tua “Anak Sekolah Bapak Bungah” dengan Pendekatan Humanistik	Universitas Pekalongan	RUD	2016
Model Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata di Pusat Informasi Mangrove	STIE Muhammadiyah Pekalongan	RUD	2016
Penguatan Citra Pekalongan sebagai Kota Batik melalui Pembangunan Pusat Informasi UMKM Batik berbasis Mobile yang Mampu Meningkatkan Daya Saing UMKM Batik dalam Menghadapi Persaingan Era Masyarakat Ekonomi Asean	Kantor Ristekin Kota Pekalongan, STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD Provinsi	2016
Aplikasi Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Secara Online untuk Mendukung Smart Government Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	Riset Tematik	2017
Pemetaan Sentra Usaha Menengah Kecil Batik Menggunakan Aplikasi GIS berbasis Web di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	Riset Tematik	2017
Strategi Promosi Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan	Riset Tematik	2017
Pengembangan Makanan Lokal ‘Megono Laktagenik’ sebagai Diversifikasi Pangan untuk Meningkatkan Produksi ASI dan Memacu Pertumbuhan Bayi	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	RUD	2017
Prototipe E-Parkir untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2017
Analisa dan Desain Integrasi Data Pendidikan Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2017

Judul Penelitian	Institusi Peneliti	Kegiatan	Tahun
Kajian Pengembangan Smart Economy Kota Pekalongan melalui Penerapan e-Retribusi pada Pasar Tradisional sebagai Upaya Meningkatkan PAD Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	DRD	2017
Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	DRD	2017
Kajian Perumusan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemetaan Rantai Nilai Usaha Batik Kota Pekalongan	Universitas Diponegoro	Risber	2017
Laporan Hasil Pengukuran Elektrik Well Logging	CV. Budi Santoso	Risber	2017
Perancangan dan Implementasi Manajemen Strategi Pusat Inovasi dan Budaya Batik Kota Pekalongan (<i>Pekalongan Creative Hub</i>)	BPPT	Fas. Technopark	2017
Coklat Mangrove Sebagai Usaha Peningkatan Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir Kota Pekalongan	-	RUD	2018
Kemasan Makanan Kuliner Tradisional "Megono" sebagai Upaya Memperpanjang Waktu Simpan dan Daya Saing Produk	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	RUD	2018
Pengembangan Bahan Ajar Matematika SMP dengan Pendekatan <i>Realistic Mathematic Education</i> (RME) berbasis Budaya Lokal untuk Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Pekalongan	Universitas Pekalongan	RUD	2018
Pencegahan dan Edukasi Masyarakat dalam Penanganan Endemik Penyakit Menular berbasis Web untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2018
Model Pengelolaan Wisata Pasir Kencana Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	DRD	2018
Pra Revitalisasi Pasar Berorientasi pada Kesejahteraan, Kenyamanan, dan Keindahan (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	DRD	2018
Kajian Rencana Induk Kelitbangan Kota Pekalongan 2018-2021	Universitas Diponegoro	Fasjarlit	2018
Kajian Muara Sungai Pekalongan	PT. Indotama Mahesa Karya	Risber	2018
Kajian Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Kecamatan Pekalongan Utara	PT. Citra Pamungkas Mandiri	Risber	2018
Model Akselerasi Pencapaian <i>Open Defecation Free</i> (ODF) Kota Pekalongan melalui Penguatan Kelurahan (Sebuah Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Universitas Pekalongan	RUD	2019

Judul Penelitian	Institusi Peneliti	Kegiatan	Tahun
Kampung Batik Digital Berbasis <i>Virtual Tour</i> sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2019
Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Pasar Grosir Setono	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2019
Penggunaan Kembali Limbah Cair Batik Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Teknologi Membran	Universitas NU Purwokerto	RUD	2019
Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Memperkuat Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2019
Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan	Tim Peneliti Poltekkes	Risberjarlit	2019
Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru	CV. Monalisa Art	Risberjarlit	2019
<i>Road Map</i> Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan	CV. Tunas	Risberjarlit	2019
Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa	CV. Pijar Mulya Wasesa	Risberjarlit	2019
Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan <i>Exit</i> Jalan Tol	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	DRDPMBP	2019
Strategi Penurunan Angka Pengangguran	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	DRDPMBP	2019
Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis	Universitas Diponegoro	RUD	2020
Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 : Optimalisasi Peran <i>Pentahelix</i> di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah	Universitas Pekalongan	RUD	2020
Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam <i>Dashboard</i> Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2020
Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga guna Membangun Kemampuan <i>Problem Solving</i> Anak	Universitas Selamat Sri	RUD	2020
Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	RUD	2020

Judul Artikel Jurnal Litbang Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.15 Judul Artikel Jurnal Litbang Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
1	Analisis Faktor-faktor Penentu Kecurangan (<i>Fraud</i>) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan)	Moh. Risqi Kurnia Adi, Komala Ardiyani, Arum Ardianingsih	Universitas Pekalongan	2016
2	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pasien pada Pelayanan Pengobatan TB Paru di BKPM Kota Pekalongan	Sri Hidayati, Ahmad Baequny, Sumarni Sumarni	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
3	Hubungan antara Pengetahuan Ibu tentang Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dengan Sikap Ibu dalam Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Bendan Kota Pekalongan	Ta'adi Ta'adi, Zaenal Amirudin, Nur Fitriyah	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
4	Peran Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Ibu Nifas untuk Melakukan Praktik Pantang Makanan di Kota Pekalongan	Indar Widowati, Afiyah Sri Harnany, Zaenal Amirudin	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
5	Analisis Hubungan Tingkat Kecemasan dan Nyeri Persalinan Kala 1 Primipara di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Pekalongan	Agustina Rahmawati, Hartati Hartati, Sumarni Sumarni	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
6	Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kecemasan Ibu dari Anak yang Menderita Bronkopneumonia di BKPM Kota Pekalongan	Moh. Projo Angkasa, Isrofah Isrofah, Maslahatul Inayah, Indayah Dewi Tunggal	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
7	Gambaran Tingkat Pengetahuan Orangtua terhadap Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kelurahan Bendan Kota Pekalongan	Suryo Pratikwo, Sri Mawar, Sirly Amri Meilynda	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
8	Peran Bidan dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) pada Masa Kehamilan di Kota Pekalongan	Rosmiati Rosmiati, Tri Anonim, Supriyo Supriyo	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
9	Aplikasi Pencarian Tempat Wisata Kuliner di Kota Pekalongan Berbasis <i>Location Based Service</i> dan <i>Geotagging</i> pada <i>Android</i>	Taryadi	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2016

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
10	Penguatan Citra Pekalongan sebagai Kota Batik melalui Pembangunan Pusat Informasi UMKM Batik Berbasis Mobile yang Mampu Meningkatkan Daya Saing UMKM Batik dalam Menghadapi Persaingan Era Masyarakat Ekonomi Asean	Paminto Agung Christianto, Eko Budi Susanto, M. Faizal Kurniawan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2016
11	Pembuatan Film "Mendaki Langit" sebagai Media Edukasi Masyarakat Pekalongan untuk Meningkatkan Angka Lama Sekolah	Inayatul Ulya, Sarlita D. Matra, Muhamad Haryanto	Universitas Pekalongan	2016
12	Pemanfaatan <i>Virtual Reality</i> untuk Pengembangan Kios Informasi Objek Wisata di Kota Pekalongan Berbasis <i>Mobile</i>	Much. Rifqi Maulana, Christian Yulianto Rusli, Ichwan Kurniawan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2016
13	Analisis <i>Existing</i> dan <i>Forecasting</i> Puskesmas BLUD Kota Pekalongan : Upaya Menuju Kemandirian Pengelolaan Layanan Kesehatan Primer	Teguh Irawan, Rr. Vita Nur Latif, Wahyuningsih Wahyuningsih	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2016
14	Sistem Informasi Layanan Kesehatan Berbasis <i>Mobile</i> yang Mengintegrasikan Instansi Layanan Kesehatan di Kota Pekalongan	Eko Budi Susanto, Paminto Agung Christianto, M. Faizal Kurniawan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2016
15	Pola Asuh Orang Tua yang Memiliki Anak Putus Sekolah di Kampung Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Lor (<i>Parents' Parenting Toward Drop Out Children In Kampung Pabean Pekalongan</i>)	Pradnya Permanasari, Ida Ayu Panuntun, Amalia Fitri	Universitas Pekalongan	2016
16	Model Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata di Pusat Informasi Mangrove	Nurhikmah Esti Prastika, Djauhar Edi Purnomo, M. Fithrayudi Triatmaja	STIE Muhammadiyah Pekalongan	2016
17	Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Rumah Sakit yang Mendukung Kinerja Institusi (Studi Kasus di RSUD Bendan Kota Pekalongan)	Jamaludin al J Efendi	Universitas Pancasila Jakarta	2016
18	Hubungan Usia <i>Menarche</i> dengan Terjadinya Menopause di Wilayah Kerja Puskesmas Kusuma Bangsa Kota Pekalongan Tahun 2016	Ta'adi Ta' adi, Hartati Hartati, Millatin Puspaningtyas	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2016
19	Kesiapan Kota Pekalongan Menuju <i>Smart City</i>	P.A. Christianto, Siti Nuhayati, Mujiyono	DRD Kota Pekalongan	2016
20	Kajian Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan	Choliq Sabana, Benny Diah Madusari, Suryo Praktikwo	DRD Kota Pekalongan	2016

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
21	Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Tahap Pencapaian Tumbuh Kembang Balita Usia 4-5 Tahun di Kelurahan Medono Kota Pekalongan	Sudirman, Hartati, Ayu Wulansari	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2017
22	Pengaruh Merokok di dalam Rumah terhadap Kejadian ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) pada Balita	Supriyo, Sri Hidayati, Laila Magfirotun	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2017
23	<i>Related Knowledge Third Trimester Pregnant with Compliance in the Antenatal Care (ANC) in Health Inspection Community Health Centers Kusumabangsa City Pekalongan</i>	Mardi Hartono, Yulanda Sispita Sari, Miftachul Jannah, Tri Anonim	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2017
24	Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif dengan Praktik Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Pekalongan	Suryo Pratikwo, Millatin Puspaningtyas, Dyah Retnosukmaningrum	Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2017
25	Identifikasi Persentase Printing, Batik Tulis dan Batik Cap di Blok VIP <i>International Batik Center (IBC)</i> Pekalongan	Sri Puji Astuti, Rini Hastuti	Universitas Pekalongan	2017
26	<i>Analysis of Factors Affecting Job Satisfaction and Work Performance Using Job Satisfaction Survey (JSS): A Case Study at Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan</i>	Bayu Wirawan D. S.	Politeknik Pusmanu Pekalongan	2017
27	Model Peningkatan Nilai Perusahaan Melalui Struktur Modal pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia	Rizka Ariyanti, Mujiyono	Politeknik Pusmanu Pekalongan	2017
28	Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekalongan	Yustiana Dwirainaningsih	Politeknik Pusmanu Pekalongan	2017
29	Penerapan Aplikasi <i>E-Label</i> Batik sebagai Upaya Mendukung Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2014	Paminto Agung Christianto, Eko Budi Susanto, Ichwan Kurniawan	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2017
30	Penerapan Buku Pedoman Pola Asuh "Anak Sekolah, Bapak Bungah" Kepada Warga Kampung Pabean Untuk Mengubah Mindset Orang Tua Tentang Pentingnya Pendidikan	Pradnya Permanasari, Ida Ayu Panuntun, Amalia Fitri	Universitas Pekalongan	2017

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
31	Pemetakan Sentra Usaha Menengah Kecil Batik Menggunakan Aplikasi <i>Geographic Information System (GIS)</i> berbasis Web di Kota Pekalongan	Agus Ilyas, Eny Jumiati, Hari Agung B.	STMIK Widya Pratama	2017
32	Prototipe E-Parkir Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan	Eko Budi Susanto, Satriedi Wahyu Binabar, M. Reza Maulana	STMIK Widya Pratama	2017
33	Integrasi Informasi Kesehatan pada Instansi Kesehatan di Kota Pekalongan melalui Sistem Informasi Layanan Kesehatan	Eko Budi Susanto, M. Faizal Kurniawan, P.A. Christianto	STMIK Widya Pratama	2017
34	Strategi Promosi Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan	Ardiana Priharwanti, Eka Fitriani, Nurul Baiti		2017
35	Analisa dan Desain Integrasi Data Pendidikan Kota Pekalongan	Christian Yulianto Rusli, Muhammad Faizal Kurniawan, Wahyu Setianto	STMIK Widya Pratama	2017
36	Pengembangan <i>Smart Economy</i> Kota Pekalongan Melalui Penerapan E-Retribusi Pelayanan Pasar	P.A. Christianto, Siti Nurhayati, Mujiyono, Sobrotul Imtikhanah, Projo Angkasa, Shinta Dewi R., Vita Nur Latief	DRD	2017
37	Aplikasi Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Secara <i>Online</i> untuk Mendukung <i>Smart Government</i> Kota Pekalongan	Prastuti Sulistyorini, Christian Yulianto Rusli, Indrayanti	STMIK Widya Pratama	2017
38	Eksplorasi Warna Alam Menggunakan Kulit Batang, Akar, Daun dan Buah Dari Tanaman Mangrove (<i>Rhizophora Stylosa</i>) sebagai Pewarna Batik dengan Penggunaan Fiksator Tawas, Tunjung dan Kapur	Bayu Wirawan D. S., Hazbi As Siddiqi	Politeknik Pusmanu	2017
39	Pengaruh Asset Structure, Asset Quality, Capitalization, Size terhadap Return On Asset pada Perusahaan Perbankan	Rizka Ariyanti	Politeknik Pusmanu	2017
40	<i>Factors Affecting the Stagnation of SAMPAN (Sapta Mitra Pantura) Interregional Cooperation</i>	Tri Aji Pefridiyono, Jeremias T. Keban	Universitas Gadjah Mada	2017
41	Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Radhatul Atfal di Kota Pekalongan	Slamet Riyadi, Aria Mulyapradana	Politeknik Pusmanu	2017
42	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Pekalongan	Rizka Ariyanti, Kinanti Restu P.	Prodi Akuntansi Politeknik Pusmanu	2018

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
43	Penurunan Nyeri Saat Dismenore dengan Senam Yoga dan Teknik Distraksi (Musik Klasik Mozart)	Remilda Armika Vianti, Diyah Ari S	Universitas Pekalongan	2018
44	Gambaran Kesiapan Petugas Kesehatan dalam Penatalaksanaan Pemeriksaan HIV-AIDS pada Ibu Hamil di Kabupaten Batang	Maslikhah, Ahmad Baequny, Resti Ayu Hidayati	Akbid. HIP	2018
45	Studi Komparasi Penggunaan Kaporit dan Hidrosulfit sebagai Zat Pencabut Warna pada Pembuatan Jumputan	Inva Sariyati, Lailatul Fitri Mulyono	Politeknik Pusmanu	2018
46	Bubur Simbut sebagai Perintang Warna dalam Pembuatan Ragam Hias pada Kain	Bayu Wirawan DS, Inva Sariyati, Yustiana Dwirainaningsih	Politeknik Pusmanu	2018
47	Analisis Determinan yang Mempengaruhi Keaktifan Lanjut Usia pada Pelaksanaan Posyandu Lansia	Sri Hidayati, Ahmad Baequny, Maslahatul Inayah	Poltekkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2018
48	Pengaruh <i>Logotherapy</i> dan Aktivitas Spiritual terhadap Makna Hidup Lansia	Indar Widowati, Sri Hidayati, Afiyah Sri Harnany	Poltekkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2018
49	Efek Kombinasi antar Masase Frirage dan Akupresur terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas atas Pasien Pasca Stroke Iskemik	Zaenal Amirudin, Tri Anonim, Rosmiati Saleh	Poltekkes Prodi Keperawatan Pekalongan	2018
50	Analisis Zonasi Ekosistem Mangrove pada Kawasan Mangrove Bekas Tsunami di Aceh Barat Selatan	Wintah		2018
51	Eksplorasi Potensi Ekstrak Cair Daun Kecombrang yang Mengandung Antioksidan sebagai Penetralisir Radikal Bebas dalam Darah Petugas SPBU	Azzah Farah Fadiyah, Resi Mukti Wardhani, Nurmei Rahmatika	Universitas Jenderal Soedirman	2018
52	Aanalisis Pengetahuan Awal Mahasiswa mengenai Masalah Intrusi Air Laut dan Rob	Nur Baiti Nasution, Sayyidatul Karimah, Hasyim As'ari	Universitas Pekalongan	2018
53	Eksplorasi Potensi Ekstrak Cair Daun Kecombrang yang Mengandung Antioksidan sebagai Penetralisir Radikal Bebas dalam Darah Petugas SPBU	Azzah Farah Fadiyah, Resi Mukti Wardhani, Nurmei Rahmatika	Universitas Jenderal Soedirman	2018
54	Kemasan Makanan Kuliner Tradisional "Megono" sebagai Upaya Memperpanjang Waktu Simpan dan Daya Saing Produk	Indar Widowati, Hartati, Zaenal Amirudin	Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	2018
55	Kajian Nilai Gizi dan Organoleptik Cokelat Mangrove dari Buah <i>Sonneratia Alba</i>	Wintah, Andhina Putri Heriyanti, Kiswanto	Universitas Teuku Umar	2018

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
56	Pencegahan dan Edukasi Masyarakat dalam Penanganan Endemik Penyakit berbasis Web untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan	Tri Agus Setiawan, Agus Ilyas, Ari Putra Wibowo	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2018
57	Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Yustiana Dwirainaningsih	Politeknik Pusmanu Pekalongan	2018
58	Korelasi antara Motivasi Berprestasi dan Keterampilan Presentasi pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan	Rizka Hayati, Desyarini Puspita Dewi	Universitas Pekalongan	2018
59	Urgensi Penerapan Muatan Lokal Batik Pada Siswa Tuna Rungu Wicara	Inayatul Ulya	Universitas Pekalongan	2018
60	Pengembangan Bahan Ajar Matematika SMP dengan Pendekatan <i>Realistic Mathematic Education</i> (RME) berbasis Budaya Lokal untuk Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Pekalongan	Dewi Mardhiyana, Nur Baiti Nasution, Syita Fatih 'Adna	Universitas Pekalongan	2018
61	Revitalisasi Pasar Banjarsari yang Berorientasi pada Kesejahteraan, Kenyamanan, dan Keindahan	Siti Nurhayati, P. A. Christianto, Siti Nurhayati, Mujiyono, Sobrotul Imtikhanah, Projo Angkasa, Shinta Dewi Rismawati, Vita Nur Latief	DRD	2018
62	Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Tulis Menggunakan <i>Activity Based Costing</i> (ABC) : Studi Kasus di Batik Tobal Pekalongan	Jilma Dewi Ayu Ningtyas, Bayu Wirawan D. S.	Politeknik Pusmanu Pekalongan	2019
63	Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan	Choliq Sabana, Suryani, Benny Diah Madusari, Suryo Pratikwo, Loso Hartati, Ida Baroroh, Imam Suraji, Danang S.	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	2019
64	Pengaruh Pemberian <i>Imunostimulan</i> dengan Dosis Berbeda Terhadap Pertumbuhan Ikan Kakap Putih (<i>Lates calcarifer</i>)	Intan Ria Ivandari, Linayati, Tri Yusufi Mardiana	Universitas Pekalongan	2019
65	Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Berdasarkan Parameter Fisis & <i>Chemis</i> Untuk Budidaya Kepiting Bakau (<i>Scylla Spp</i>) si Kelurahan Degayu Kota Pekalongan	Hisyam Abdurrahman Risa, Hadi Pranggono, Tri Yusufi Mardiana	Universitas Pekalongan	2019

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
66	Identifikasi Bakteri <i>Vibrio Sp</i> dalam <i>Hepatopankreas</i> Udang <i>Vannamei</i> (<i>Litopenaeus vannamei</i>) pada Tambak yang Diberi Probiotik di Tambak Sampang Tigo Kelurahan Degayu Kota Pekalongan	Ike Fatmala, Hadi Pranggono, Linayati	Universitas Pekalongan	2019
67	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan SAK-ETAP No. 15 pada Koperasi PT. Pisma Putra <i>Textile</i> Pekalongan	Rizka Ariyanti, Sri Murniati	Politeknik Pusmanu Pekalongan	2019
68	Penerapan Model Pembelajaran Master terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa di SMA N 1 Doro	Dewi Azizah, Rizka Innayah, Dewi Mardhiyana	Universitas Pekalongan	2019
69	Pengembangan Makanan Lokal Megono Laktagenik untuk Meningkatkan Produksi Air Susu Ibu dan Memacu Pertumbuhan Bayi	Indar Widowati, Hartati, Zaenal Amirudin	Poltekkes Kemenkes Semarang	2019
70	Formula <i>Jelly Drink</i> Cincau Hijau, Pandan Wangi dan Kayu Manis untuk Menurunkan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Melitus	Zaenal Amirudin, Rosmiati Saleh, Afyah Sri Harnany	Poltekkes Kemenkes Semarang	2019
71	Ekstrak Daun Pandan Wangi dan Asam Jawa Terhadap Daya Repelen Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i>	Wintah, Kiswanto	Universitas Teuku Umar Meulaboh	2019
72	Teknik Pewarnaan Alam <i>Eco Print</i> Daun Ubi dengan Penggunaan Fiksator Kapur, Tawas dan Tunjung	Bayu Wirawan D. S., M. Alvin	Politeknik Pusmanu	2019
73	Pengolahan Air Gambut pada Kolam Ikan secara Kontinyu di Desa Peunaga Cut Ujong	Kiswanto, Wintah, Nur Iaila Rahayu, Endah Sulistiyowati	Universitas Teuku Umar Meulaboh	2019
74	Analisis Posisi Bersaing Perusahaan Batik Menggunakan <i>The Industry Attractiveness Business Strength Matrix</i> (MDTI) Studi Kasus di Tobal Batik	Yustiana Dwirainaningsih, Indah Kuswardani	Politeknik Pusmanu	2019
75	Penerapan <i>Location Base Service</i> untuk Memperkenalkan Hotel dan Wisata Kuliner di Kota Pekalongan Berbasis <i>Augmented Reality</i>	Wachid Darmawan, Ichwan Kurniawan, A. Fuady Rifqiyanto	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2019
76	Pengembangan Buku <i>Pop-Up</i> Kuliner sebagai Upaya Pengenalan Wisata Kuliner Kota Pekalongan	Anisha Alfaticha, Sari Utari, Habibatus Salimah, Inayatul Ulya	Universitas Pekalongan	2019
77	Konsep dan Strategi Pengembangan Smart Regional (<i>Smart City</i>) dalam Menghadapi Globalisasi Version 3.0 dengan Menggunakan Metode PDCA & USEPDSA	Sasono Wibowo, Indra Gamayanto	Universitas Dian Nuswantoro	2019

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
78	Perbanyak Tanaman Hias Air Tawar <i>Alternanthera Reinickii</i> dan <i>Ludwigia</i> Sp secara <i>In Vitro</i> guna Mendukung <i>Aquascape</i>	Ruhil Irawan, Rossa Yunita, Media Fitri Isma N., Benny Diah M.	Universitas Pekalongan	2019
79	Kampung Batik Digital Berbasis Virtual Tour sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	Eko Budi Susanto, Rizqi Wijonarko, Edi Purwanto, Satriedi Wahyu Binabar	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2019
80	Pengolahan Limbah Cair Batik Menggunakan Teknologi Membran <i>Nanofiltrasi</i> di Kota Pekalongan	Kiswanto, Laila Nur Rahayu, Wintah	Universitas Teuku Umar Meulaboh	2019
81	Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan pada Usaha Batik dan Perhotelan di Kota Pekalongan	Victorianus Aries Siswanto, Tri Pudji Wahjuningsih dan Murtini	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2019
82	Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Memperkuat Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	Mohammad Reza Maulana, Bambang Ismanto, Hari Agung Budijanto, Satriedi Wahyu Binabar	STMIK Widya Pratama Pekalongan	2019
83	<i>Self Efficacy</i> Pelaku Buang Air Besar Sembarangan di Kota Pekalongan	Rr Vita Nurlatif, Ardiana Priharwanti, Jaya Maulana	Universitas Pekalongan	2019
84	Potensi Industri Bregasmalang – Petanglong dalam Mendukung Terciptanya <i>Cluster</i> Pendukung dan Bahan Baku Industri Pertahanan Indonesia	Endro Tri Susdarwono	Universitas Peradaban	2020
85	Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Menggunakan Metode <i>Think Talk Write</i> dengan Media Gambar pada Peserta Didik Kelas VII C SMP Negeri 1 Talun	Desyarini Puspita Dewi, Nila Yuniani	Universitas Pekalongan	2020
86	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan dan Exit Tol di Wilayah Kota Pekalongan	Siti Nurhayati, P.A. Christianto, Zahro, Choliq Sabana	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	2020
87	Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Palang Merah Indonesia (Studi Kasus di UTD Kabupaten Pekalongan)	Rizka Ariyanti, Laely T Soraya	Politeknik Pusmanu	2020
88	Analisis Logam (Mn, Fe, Cd), Sianida dan Nitrit pada Limbah Cair Tambang Batubara PT. Mifa Bersaudara di Aceh Barat	Kiswanto, Wintah, Nur Laila Rahayu	Universitas Teuku Umar Meulaboh & Universitas Nahdhatul Ulama Purwokerto	2020

No.	Judul Artikel	Kontributor	Institusi/PT	Tahun
89	Pengaplikasian Bubur Simbut sebagai Perintang Warna pada Kain dengan Menggunakan Canting Cap	Bayu Wirawan D. S., dan Abdul Rozaq	Politeknik Pusmanu	2020
90	Efektivitas EM-4 dalam Menurunkan Kadar COD Limbah Cair Batik Cap si Kelurahan Simbang Wetan Kota Pekalongan	Wintah, Kiswanto, Endah Sulistiyowati	Universitas Teuku Umar Meulaboh & Universitas Nahdhatul Ulama Purwokerto	2020
91	Pemetaan dan Strategi Penurunan Pengangguran di Kota Pekalongan	Beny Diah Madusari, Sobrotul Imtihanah, Suryo Pratikwo, Kuart Ismanto	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	2020

2.2.2.2. Pagu Anggaran Belanja Litbang Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016-2021

Kota Pekalongan mengalokasikan belanja litbang senilai total Rp. 7.566.870.000 (tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tahun 2016 sampai dengan 2021, atau persen dari Belanja Langsung.

Selanjutnya untuk tahun 2021 sampai dengan 2025 direncanakan untuk mengalokasikan belanja litbang senilai total, atau persen dari Belanja Langsung.

Tabel 2.16 Pagu Anggaran Belanja Litbang Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Anggaran Litbang (juta rupiah)						Total s.d. 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kajian Lembaga Pengelola Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB) dan Kajian Bisnis Plan PIBB	- Dokumen Kajian Lembaga Pengelola PIBB - Dokumen Kajian Bisnis Plan PIBB	50						50
2	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kreativitas Teknologi	- Pemegang Krenova yang terseleksi - Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan	55	65	85				205
3	Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi	Inovasi teknologi atas iniasi/kerja sama lembaga litbang dengan lembaga usaha	30	30					60
4	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Tersedianya fasilitasi Dewan Riset Daerah	130,5	130,5	141,82				402,82
5	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah workshop pengabdian masyarakat	200	200	187				587
6	Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan	- Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbang	133	128,2	151,28				412,48

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Anggaran Litbang (juta rupiah)						Total s.d. 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		- Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan - Workshop kelitbangan							
7	Fasilitasi Riset Tematik	Jumlah Riset Tematik yang dilaksanakan	95	94,4					189,4
8	Riset Unggulan Daerah	Jumlah riset yang menjadi Unggulan Daerah	135	133,7	201,6	175	173		818,3
9	Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	Jumlah buku jurnal litbang yang tersusun	25	25	25	25	31,4		131,4
10	Seminar/Lokakarya Kelitbangan	Jumlah Seminar/Lokakarya kelitbangan	25	25					50
11	Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan	Jumlah kajian yang tersusun		220,35	276				496,35
12	Fasilitasi Sistem Inovasi Daerah (SID)	Jumlah FGD/Raker/Workshop Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Pekalongan yang terfasilitasi		88,44	98,7		135		322,14
13	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Inovasi (SIDa)	Jumlah penghargaan inovasi		46,6					46,6
14	Fasilitasi Pengembangan Teknopark	Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan Teknopark yang terfasilitasi		98,4	94,08				192,48
15	Pameran Inovasi dan Kreativitas Pembangunan Kota Pekalongan	Jumlah stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreativitas Pembangunan Kota Pekalongan		401	380				781
16	Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	- Jumlah kajian dan rekomendasi DRD yang tersusun - Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat				280	195		475
17	Fasilitasi Riset Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	- Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan - Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan - Jumlah FGD/workshop kelitbangan - Jumlah kajian yang tersusun				350	100		450
18	Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Daerah	- Jumlah keikutsertaan Pameran Produk Inovasi - Jumlah pemenang krenova yang terseleksi - Jumlah event Pameran Inovasi dan Kreativitas Pembangunan Kota Pekalongan - Jumlah FGD/Workshop/ Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Pekalongan yang terfasilitasi				710,1			710,1
19	Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Teknologi	- Jumlah keikutsertaan Pameran Produk Inovasi - Jumlah pemenang Krenova terseleksi - Jumlah kegiatan Pameran Inovasi dan Kreativitas Pembangunan Kota Pekalongan yang diselenggarakan					78,8		78,8
20	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah						263,5	263,5
21	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan						32,5	32,5
22	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	- Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan - Jumlah FGD/Workshop/Rakor						1.067	1.067

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Anggaran Litbang (juta rupiah)						Total s.d. 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		kelitbangan - Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang disusun -Jumlah kegiatan pameran inovasi dan kreativitas pembangunan Kota Pekalongan yang diselenggarakan - Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi - Jumlah pemenang krenova yang terseleksi -Jumlah riset/kajian/penelitian yang dilaksanakan -Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan -Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan							

2.2.3 Tema Penguatan SIDA

Pada acara Rapat Paripurna/Pokja yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan dan dihadiri oleh Tim Koordinasi Penguatan SIDA, dibahas dan didiskusikan tentang pilihan tema Penguatan SIDA.

Tema ini perlu ditetapkan agar Penguatan SIDA menjadi fokus pada tema tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjawab adanya keterbatasan waktu dan sumber daya (anggaran dan sumber daya manusia).

Dalam menentukan Tema Penguatan SIDA, sebagian besar peserta mengusulkan tema sebagai berikut :

- (1) Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah
- (2) Pengembangan Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Potensi Daerah

Kemudian, di akhir acara disepakati sebuah tema Penguatan SIDA untuk tahun 2020-2025 yaitu : **“Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah”**

Selanjutnya hasil kesepakatan tema Penguatan SIDA tersebut disampaikan kepada Walikota untuk memberikan arahan dan memilih tema Penguatan SIDA. Berdasarkan tema Penguatan SIDA inilah dokumen Roadmap Penguatan SIDA ini disusun.

2.2.4 Kondisi SIDA Saat ini

1. Pilar Ekosistem Inovasi (KKI 1-6)

Pengelompokkan kebijakan yang bertujuan agar ekosistem inovasi di daerah meningkat yaitu dengan jalan meningkatkan kemampuan daerah untuk menciptakan, mengembangkan dan menawarkan :

- iklim usaha yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi
- daya tarik bagi investasi, talenta dan faktor mudah bergerak lain

Tabel 2.17. Kondisi Pilar Ekosistem Inovasi Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis	Ketersediaan basis data inovasi dan bisnis	<p>1. Diambil dari situs https://oss.pekalongankota.go.id/oss, Profil investasi disajikan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perwal nomor 57 A Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2025. - Data Perkembangan investasi yang sudah disajikan setiap tahun. - 3. Data peluang investasi meliputi : Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Industri dan Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata. <p>2. Data UMKM (22.983) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan (SIUP) = 9.115 - Industri kecil menengah = 6.344 - Pedagang pasar = 6.610 - Pedagang kaki lima = 914/ <p>3. Profil kelurahan : berbentuk Monografi kelurahan dan Profil Kelurahan.</p> <p>4. Data TTG : tersedia data produk TTG.</p> <p>5. Data KIM : KIM Kraton Kidul.</p> <p>6. Data Komunitas Kreatif Daerah dalam bentuk Data Pelaku E-Kraf meliputi : Fashion, Kriya, Disain Produk, Film-Animasi-Video, Kuliner, Fotografi, Seni Rupa, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan, Radio-Televisi, Aplikasi dan Pengembangan Permainan, dan Arsitektur.</p> <p>7. Fasilitas Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dan peran OPD pendukung (Bappeda, DPMPTSP, Dindagkop UMKM, Dinperinaker, Dinparbudpora, Dindik). - Kemudahan dalam pengurusan (kepastian Regulasi dan SOP). - Fasilitas keikutsertaan pameran. - Jaringan kerjasama antar Daerah, bahkan sampai ke tingkat Internasional. - Fasilitas Bintek baik ketenagakerjaan ataupun kewirausahaan. - Fasilitas dukungan HaKI <p>8 --</p>	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
	Website/ portal daerah	1. www.pekalongankota.go.id 2. Ada di DINKOMINFO 3. (0285) 421093 atau melalui email : sekda@pekalongankota.go.id www.pekalongankota.go.id	
	Dokumen RPJPD	1. Pembentukan tim penyusun RPJPD. 2. Penyusunan NA 3. Perda RPJPD memuat konsep Sistem Inovasi, antara lain : - Isu Strategis : Pengembangan daya saing ekonomi berdasarkan pengetahuan dan kreatifitas sebagai faktor inovasi (knowledge based society). - Misi kelima : Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas dalam Misi kelima ini memiliki arti bahwa Perwujudan Kota Mandiri juga menekankan pada pengembangan inovasi dan kreasi dari sumber daya manusia dan lembaga sehingga senantiasa mampu untuk menyediakan dan memenuhi segenap kebutuhan hidup dan kehidupan secara layak tanpa harus tergantung pada pihak luar. Makna ini akan mendukung pencapaian Visi Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera . 4. Pemkot menyelenggarakan Konsultasi Publik, Pembahasan di DPRD, dan juga evaluasi Gubernur. RPJPD sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.	
	Dokumen RPJMD	1. Pembentukan tim penyusun RPJMD. 2. Penyusunan Naskah Akademik pada tahun 2025. 3. RPJMD memuat : - Gambaran kondisi SIDA yang meliputi : Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah, Fokus Iklim Investasi, dan Fokus Sumber Daya Manusia - Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas, dengan Strategi Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi kreativitas, serta Arah Kebijakan	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
		<p>Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan IPTEK.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi masih tersebar di beberapa PD terkait dan pelayanannya masih manual. -Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat. -Jumlah SDM yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga iptekin/litbangyasa milik pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas. -Alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah pada masih relative kecil. -Munculnya permasalahan kelembagaan dari organisasi bersama antar Daerah, khususnya dalam hal sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan. <p>Basis data klaster industri, regulasi terkait klaster industri, insentif untuk pengembangan klster industri maupun infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan) hingga kini belum dikembangkan.</p> <p>4.Penyelenggaraan konsultasi publik Penyusunan RPJMD Konsultasi Publik, 5.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ttg RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.</p>	
	Dokumen Roadmap SIDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun Roadmap SIDA dengan SK Walikota nomor : 071.05/725 Tahun 2020. 2. Pemetaan potensi dan kondisi SIDA dalam Bab II Roadmap. 3. Tersusunnya Roadmap SIDA pada tahun 2020. <p>Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015.</p>	
	Regulasi insentif bisnis (SK/perda/perwal/p erbup insentif)	Kota Pekalongan sudah menerbitkan perwal No. 95 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal (dokumen dapat didownload di: https://s.id/sida-dpmptsp)	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
	Keberadaan Ruang Kreatif	<p>1. Taman lapangan Mataram</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bangunan Pendopo Terdapat bangunan toilet umum Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam hari Adanya tim kebersihan taman kota Adanya kegiatan acara formal dan informal diarea lapangan setiap tahun oleh pihak pemerintah maupun komunitas sekitar Terdapat area fasilitas olah raga public Terdapat area tempat duduk atau area berkumpul <p>2. Taman Monumen Juang</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat bangunan Toilet Umum Terdapat bangunan tugu symbol pahlawan kota pekalongan Adanya kegiatan acara formal atau informal diarea lapang taman monumen yaitu upacara dan kegiatan komunitas sekitar dengan waktu yang tidak tertentu Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam Adanya tim kebersihan taman <p>3. Taman Jetayu</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat bangunan Toilet Umum Terdapat bangunan signed kota Area jogging Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam hari Adanya tim kebersihan <p>4. Taman Nursery</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat bangunan Toilet Umum Terdapat area Parkir Terdapat area bangunan edukasi taman Terdapat area peribadatan Terdapat area bermain anak Adanya kegiatan acara edukasi oleh masyarakat sekitar dan komunitas Adanya pengamanan taman diwaktu malam dan siang hari 	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
		<p>Adanya tim kebersihan taman Adanya area olah raga (jogging trade) Adanya ruang berkumpul (kursi taman)</p> <p>5. Taman Wilis Area jogging Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam hari Adanya tim kebersihan Adanya area bermain anak Adanya kegiatan acara oleh komunitas sekitar</p> <p>6. Taman Lapangan Tirto Area jogging Adanya tim kebersihan Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam hari Adanya kegiatan acara oleh komunitas sekitar/penduduk Adanya area parkir kendaraan</p> <p>7. Taman Lapangan Alun-alun Area jogging Adanya bangunan toilet umum Area terbuka atau bangunan gapura Adanya tim kebersihan Adanya pengamanan taman di waktu siang dan malam hari Adanya ruang berkumpul (kursi Taman) Adanya kegiatan komunitas.</p>	
	Kelembagaan penguatan SIDA (Tim Koordinasi Penguatan SIDA)	1. Ada Tim koordinasi ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 071.05/725 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2025	
	Rasio anggaran	Jumlah APBD : 1.055.857.482.000,-	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
	Litbangjirap/Iptekin terhadap anggaran belanja daerah (APBD)	Jumlah anggaran Kelitbangan : 1.575.384.000,- Rasio : 0,15 %	
	Waktu Pelayanan Perijinan	Waktu pelayanan perizinan sudah tertuang di SOP dan Standar Pelayanan. Waktu pelayanan perizinan berbeda-beda sesuai dengan NSPK masing-masing perizinan. (dokumen dapat didownload di: https://s.id/sida-dpmtsp)	
	Mall pelayanan publik	Sejak Juni 2018 SPIPISE sudah diganti dengan OSS (Online Single Submission)	
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (Iptekin)/atau penelitian pengembangan dan perekayasaan (Litbangjirap) serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, Khususnya UMKM	Jumlah perguruan tinggi	1. IAIN Walisongo 2. UNIKAL 3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan) 4. STMIK Widya Pratama 5. POLTEKKES Prodi Keperawatan Akbid Harapan Ibu	
	Jumlah lembaga penelitian di luar universitas	1. LSM Pattiro 2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) PD Aisyiyah Lembaga Penelitian dan Pengembangan PDM Kota Pekalongan	
	Jumlah SMK	1. SMK N 1 2. SMK N 2 3. SMK N 3 4. SMK Syafi'i Akrom 5. SMK Perikanan Irma SMK Muhammadiyah	
	Rasio pejabat fungsional Iptekin	1. IAIN Pekalongan (119 orang) 2. UNIKAL (115 orang) 3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan) (37 orang)	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
		4. STMIK Widya Pratama (25 orang) 5. POLTEKKES Prodi Keperawatan (10 orang). 6. Akbid Harapan Ibu (16 orang) 7. BAPPEDA (2 orang) Jumlah = 324 orang.	
	Kualitas perguruan tinggi terbaik di kabupaten/kota	Sebutkan PT dengan klaster paling tinggi 1. UNIKAL : - Urutan : 207 - Klaster : 4 - Urutan pada klaster : 61 - Jumlah PT pada klaster 4 ; 400 2. IAIN Pekalongan - Urutan : -- - Klaster : -- - Urutan pada klaster : -- - Jumlah PT pada klaster 4 ; -- 3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan) - Urutan : -- - Klaster : -- - Urutan pada klaster : -- - Jumlah PT pada klaster 4 ; -- 4. STMIK Widya Pratama - Urutan : 681 - Klaster : 5 - Urutan pada klaster : 135 - Jumlah PT pada klaster 4 ; 1.590 5. POLTEKKES Prodi Keperawatan (10 orang). - Urutan : -- - Klaster : -- - Urutan pada klaster : -- - Jumlah PT pada klaster 4 ; --	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
		6. Akbid Harapan Ibu (16 orang) - Urutan : -- - Klaster : -- - Urutan pada klaster : -- Jumlah PT pada klaster 4 ; --	
	Rasio lulusan universitas terhadap penduduk usia kerja	Jumlah penduduk (usia 15 th <) lulusan PT : 14.958 jiwa Jumlah penduduk usia kerja (usia 15 th <) : 215.710 jiwa Rasio: 6,93 %	
	Rasio guru SLA lulusan S1 terhadap guru SLA		
	Rasio guru SLA terhadap siswa	Jumlah guru SLA: 1.015 Jumlah siswa: 15.017 Rasio : 6,76 %	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data IPM per tahun 2018, yaitu 74,24	
Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/ Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	Jumlah dan skala kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah	1. Tingkat Lokal : - Kerja sama Museum Batik dengan Dunia Pendidikan dalam pelestarian batik. - Kerja sama dengan Kadin Kota Pekalongan tentang Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pendampingan calon Wirausaha baru/ wirausaha baru dan UMKM pelaku usaha export/calon pelaku usaha export. 2. Tingkat Regional : - Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah . - Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang tentang Identifikasi Batas Wilayah. - Kesepakatan Bersama dengan Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, - Kesepakatan Bersama dengan Walikota Semarang tentang implementasi Aplikasi Smart City	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan Bersama dengan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah. 3. Tingkat Nasional : <ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan Bersama dengan Kota Bengkulu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Religius. 4. Tingkat Nasional : <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan Balai Besar Diklat Ekspor Indonesia Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Display Produk Pameran untuk Ekspor; - Penyelenggaraan Pelatihan Kalkulasi Harga Ekspor; dan Penyelenggaraan Pelatihan Strategi Pemasaran Tahun Anggaran 2018 - Kerja sama dengan LIPI tentang Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil IPTEK - Kerja sama dengan BPPT RI tentang Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi baru; Pemanfaatan dan penerapan teknologi yang telah ada; Pendidikan, pelatihan dan pendampingan; serta Pemanfaatan sarana prasarana dan SDM 5. Tingkat Internasional : Jejaring Kota Kreatif Dunia UNESCO. 	
Mendorong Budaya Inovasi	Kondisi muatan pelajaran kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pembelajaran kewirausahaan di dalam kurikulum SMK telah diakomodir ke dalam mata pelajaran kompetensi keahlian dan penambahan jam pelajaran yang signifikan Pada tahun ajaran 2004/2005 SMK Muhammadiyah membuka kelas unggulan (kelas model) kewirausahaan 	
	Program pelatihan dan pendampingan (pengembangan kualitas SDM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Proyek Perubahan Kepemimpinan Administrator (PKA) 2. Aplikasi Manajemen Learning Sistem (LMS) Pemerintah Kota Pekalongan Akses : lms.pekalongankota.go.id 	
	Jumlah kegiatan apresiasi dan kampanye inovasi/tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan KemenpanRB untuk RSUD Benda dan DPMPSTSP Kota Pekalongan Penghargaan Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Komunikasi Nasional (APIKNAS) untuk Inovasi Kapal Paralon 	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
	Jumlah Apresiasi Inovasi yang diselenggarakan oleh daerah	1. Pemberian anugerah kreativitas dan inovasi (krenova) Diseminasi hasil penelitian	
Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	Kerjasama antar pusat daerah tentang IPTEKIN	1. Kerja sama dengan LIPI tentang Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil IPTEK. Kerja sama dengan BPPT RI tentang Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi baru; Pemanfaatan dan penerapan teknologi yang telah ada; Pendidikan, pelatihan dan pendampingan; serta Pemanfaatan sarana prasarana dan SDM	
Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Jumlah program lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan antara lain meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Peningkatan Kebersihan Kota - Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah - Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan - Koordinasi dan pembinaan TPS 3R - Pembangunan sarana prasarana TPA Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan kegiatan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan kualitas lingkungan - Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih - Pengelolaan laboratorium lingkungan - Pengelolaan IPAL 	
	Sertifikasi ISO 14001	--	
	Keikutsertaan dalam forum international tentang lingkungan	Seminar <u>International “Sustainable Water Management”</u> Kamis 25 April 2019, <u>Pekalongan, Jawa Tengah</u>	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
	Penggunaan energi alternatif	Penggunaan Biogas di kampung mandiri energi Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan.	
	sertifikasi ISO 9001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dindikpora 2. Dinarpus 3. Dindukcapil 4. DPMPTSP 5. Inspektorat 6. DLH 7. Bappeda 8. BKD (Badan Keuangan Daerah) 9. 14 PUSKESMAS 10. RSUD Bendan. 	
	Aktivitas pelayanan HaKI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah	Pelayanan HaKI sudah ada pada saat masih di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dan sekarang masih terus dilanjutkan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Nomenklatur OPD yang baru). HaKI atas merek sudah dimiliki oleh banyak perusahaan di Kota Pekalongan.	
	Jumlah paten resmi daerah (indikasi geografis)	Sekarang ini Pemerintah Kota Pekalongan masih memproses pengusulan Sarung Batik dalam kegiatan Indikasi Geografis.	
	Regulasi standarisasi Upah UMK/UMR	Regulasi standarisasi UMK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah setiap tahun. Sebagai contoh UMK Kota Pekalongan Tahun 2020 ditetapkan dengan Nomor 560/58 Tahun 2019. SK Gubernur tersebut mengatur UMK Kab/Kota se Jawa Tengah. Tim perancang di Kota Pekalongan berkedudukan sebagai pengusul.	
	Jumlah ASN wanita dengan jenjang pendidikan minimal S1	Data SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) keadaan 9 November 2020	

2.2.4.2. Pilar Klaster Industri (KKI 1-6)

Pengelompokkan kebijakan yang bertujuan mendorong berkembangnya industri inovatif yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal terbaik dengan jalan:

- Merumuskan strategi pengembangan klaster industri berbasis potensi unggulan daerah
- Mengembangkan unggulan daerah
- Meningkatkan rantai nilai usaha unggulan daerah

Tabel 2.18. Kondisi Pilar Klaster Industri Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis	1. Ketersediaan basis data pengembangan klaster industri	Sudah tersedia basis data terkait pengembangan klaster seperti jumlah klaster industri, jumlah pengusaha/ aktor lain yang termasuk dalam klaster, jumlah tenaga kerja yang terlibat, data nilai produksi tiap klaster, dan persebaran wilayah klaster.	Ada 37 sentra klaster dengan rata-rata 126 unit usaha yang terlibat di setiap sentra klaster. Tenaga kerja yang terlibat berjumlah rata-rata 59 orang pada setiap sentra klaster. Nilai produksi untuk setiap sentra klaster mencapai Rp. 211.517.033. Keseluruhan klaster tersebut tersebar di 27 kelurahan.
	2. PUD (Produk Unggulan Daerah)	Pemilihan PUD sudah memenuhi kriteria dalam Permendagri No. 9/2014. Sudah ada OPD yang berwenang menangani PUD sesuai tupoksi, Perencanaan PUD jangka panjang sudah masuk ke dalam RPJPD, Perencanaan PUD jangka menengah sudah masuk ke dalam RPJMD.	PUD yang dikembangkan sudah memenuhi syarat sbb : a. penyerapan tenaga kerja; b. sumbangan terhadap perekonomian; c. sektor basis ekonomi daerah; d. dapat diperbaharui; e. sosial budaya; f. ketersediaan pasar; g. bahan baku; h. modal; i. sarana dan prasarana produksi; j. teknologi; k. manajemen usaha; l. harga; OPD yang menangani PUD antara lain Disdagkop UKM, DKP, Dinperinaker, Dinparbudpora
	3. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kota (RPIK)	RPIK sudah disusun berdasarkan kriteria pada Permenperin No.110 Tahun 2015. Dalam tahapan	Dokumen RPIK sudah mengacu pada Hasil Kajian pengembangan industri daerah dengan mengintegrasikan Peta

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
		<p>penyusunannya sudah memenuhi tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun dokumen 2. Ada Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota 3. Ada Draft dokumen telah tersusun 4. Sudah dituangkan dalam rancangan Perda 5. Sudah ada Perda tentang dokumen tersebut 	<p>Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota dalam dokumen RPIK. Dokumen RPIK akan ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020.</p>
	4. Keberadaan sarana informasi daring unggulan daerah	<p>Sudah ada sarana informasi daring (website dan media sosial) dan marketplace digital untuk pengembangan produk Ekraf yang didukung oleh pengelola sarana informasi dan SOP pengelolaan sarana informasi, serta melakukan pembaharuan data sesuai kebutuhan.</p>	<p>Informasi dan promosi produk Ekraf terdapat pada website Brayana Market, namun baru diisi oleh 5 produk UMKM batik.</p> <p>Marketplace Digital memanfaatkan Lokapasar Batik yang baru diluncurkan oleh Walikota pada 17 November 2020. Lokapasar Batik memiliki fitur marketplace yang bisa memungkinkan pengunjung untuk bertransaksi langsung seperti halnya toko online Shopee. Namun penjualnya masih terbatas pada pelaku usaha di Pasar Setono. Secara teknis Lokapasar memanfaatkan Fitur atau teknologi IT yang disediakan oleh layanan WhatsApp Business.</p> <p>Layanan pendampingan, pelatihan pemasaran, klinik konsultasi online dilakukan melalui Cyber UMKM (Blogspot, Instagram, Facebook, Twitter, Grup Telegram)</p>
	5. Keberadaan Pokja pelaku klaster	<p>Pokja yang mewadahi pelaku klaster sudah terbentuk, dan sudah disahkan dalam bentuk SK. Aktivitas Pokja juga sudah berjalan dengan efektif dengan adanya rencana kerja dan pelaksanaan rapat yang terjadwal.</p>	<p>Ada 3 Pokja yang aktif bergerak di bidang pengembangan industri kreatif khususnya kriya batik yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paguyuban Batik Pesindon 2. Paguyuban Batik Kauman 3. Paguyuban Canting Landungsari

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (Iptekin)/atau penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri	6. Jumlah Universitas dan lembaga penelitian yang terlibat dalam pengembangan klaster industri daerah	Ada 6 Universitas dan lembaga penelitian yang terlibat dalam pengembangan klaster industri	Universitas dan lembaga penelitian tersebut adalah Universitas Trisakti, UI, Balai besar pendidikan dan pelatihan ekspor Indonesia, DRD, LPPM Unikal dan LSP BATIK.
	7. Jumlah komunitas/asosiasi bisnis yang terkait dengan pengembangan klaster industri daerah	Ada 4 komunitas/asosiasi bisnis yang terkait dengan pengembangan klaster industri daerah	Komunitas/asosiasi bisnis yang dimaksud adalah PCCF, FEDEP, KADIN, dan Dekopinda.
	8. Rasio SDM pokja klaster dengan tingkat pendidikan minimal S1		
Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	9. Kerjasama antara klaster industri dengan universitas dan Lembaga Litbangjirap	Terdapat 1 Kerja sama Nasional dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI) Kemendag RI	Kerja sama dilakukan untuk memberikan pelatihan ekspor bagi UMKM
	10. Jumlah kegiatan yang diadakan sebagai sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah dalam setahun	Terdapat setidaknya 9 event kegiatan sarana interaksi antar pelaku bisnis di industri kreatif.	Kegiatan yang dimaksud adalah : 1. Pameran Harkopnas 2. TEI (Trade Expo Indonesia) 3. Pameran HUT Jateng di TMII 4. Pameran Apeksi 5. Pameran ke daerah lain 6. Pameran dan Bisnis meeting pada Pekan batik, hari jadi, pekan inovasi, 7. Pameran KIP (Keterbukaan Informasi Publik) 8. Pameran Produk olahan ikan di tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh DKP Provinsi Jateng 9. Pameran Produk olahan ikan yang diadakan Pemkot
Mendorong Budaya Inovasi	11. Jumlah pertemuan pokja klaster per tahun	Pertemuan Pokja Klaster yang diinisiasi oleh OPD terkait yaitu Dinperinaker sebanyak 25 kali tatap muka yang terdiri dari 15 kali kegiatan pembinaan dan 10 kali pertemuan rutin, DindagkopUKM menginisiasi sebanyak 5 kali Pertemuan. Sedangkan untuk Technopark Perikanan Pekalongan menginisiasi sebanyak 12 kali pertemuan.	Technopark Perikanan Pekalongan secara rutin melaksanakan pertemuan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan 1 bulan sekali pada minggu ke-2.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
	12. Jumlah program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha dalam rangka pengembangan kualitas SDM dalam jangka waktu 1 tahun.	Ada 2 Program dari Dinperinaker yaitu : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Dan ada 1 Program di Technopark yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Technopark Pekalongan mengadakan 2 kali pertemuan untuk membuat olahan hasil perikanan, yang diikuti oleh wanita nelayan sebanyak 60 peserta.
	13. Jumlah klaster industri	Ada 37 Sentra Klaster	
Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	14. Koordinasi program klaster dengan pemerintah daerah dan pusat	RPIK sudah selaras dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra/RPJMD), RPIK sudah mengacu pada RPIP dan RIPIN.	Program klaster terkait penyediaan bahan baku batik, sudah memiliki dasar hukum Perda Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Ketersediaan Bahan Baku Batik.
Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	15. Program lingkungan bagi klaster industri daerah	IPAL Komunal sudah ada yaitu IPAL Banyurip, IPAL Kauman, IPAL Jenggot, IPAL Pabean, IPAL di kawasan Technopark sudah ada. Sudah ada program penyuluhan/ sosialisasi konsep ramah lingkungan dalam klaster melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; pengembangan proses Produksi bersih Sudah ada pelatihan konsep ramah lingkungan dalam klaster melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; pengembangan proses produksi bersih, Program Peningkatan SDM pelatihan Teknologi Industri; Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi industri Kecil Menengah.	IPAL yang sudah ada ternyata belum cukup untuk mengatasi permasalahan limbah batik. Di sisi lain pemda tidak dapat menarik pajak dari juragan batik, sehingga mengalami kesulitan anggaran untuk meningkatkan kinerja penanganan limbah. Diperlukan sebuah indikator yang menunjukkan capaian pelaksanaan sebuah skema program lingkungan yang sekaligus mempertahankan kontribusi ekonomi batik bagi masyarakat. Terkait pemenuhan standar global melalui penataan lingkungan, Kota Pekalongan sudah melakukan penataan Kampung Wisata Batik, antara lain Kampung Wisata Batik Pesindon, dan Kampung Wisata Batik Kauman. Penataan juga dilakukan di Kampung Canting Landungsari, dan Pasar Batik Setono serta Pasar Banjarsari.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Keterangan
			<p>Untuk standar global penerapan adaptasi kebiasaan baru di era pandemi sudah ada 2 lokasi wisata batik di Kota Pekalongan yang menerapkan Program Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) yaitu Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Wisata Batik Kauman.</p> <p>Saat ini belum ada sarana informasi (website dan media sosial) yang menampilkan capaian Kota Pekalongan dalam memenuhi standar lingkungan, sebagai nilai tambah bagi produk batik untuk dapat bersaing di pasar global.</p>
	16. Program standarisasi produk klaster	<p>Sudah ada Inisiasi dari Pokja untuk menerapkan dan dukungan dari OPD terkait untuk melaksanakan standarisasi produk.</p> <p>Program yang ditujukan untuk menangani standarisasi adalah Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri dengan kegiatan Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur, kegiatan Penerapan Standarisasi Halal, dan Penerapan Standar PIRT.</p>	<p>Saat ini belum ada program untuk memenuhi standar SNI Batik, baik untuk batik tulis, batik cap, ataupun batik kombinasi.</p> <p>Saat ini standar yang dipenuhi adalah SKKNI, dengan memberikan pendampingan dan tes kompetensi setiap tahun yang sudah diselenggarakan sebanyak 41 kali pada tahun 2020 ini.</p> <p>UMKM pengolahan hasil perikanan yang mempunyai sertifikasi halal dan standar PIRT yaitu Hars Food</p>

2.2.4.3. Pilar Jaringan Inovasi (KKI 1-6)

Pengelompokkan kebijakan yang bertujuan memperkuat kemitraan IPTEKIN dan kapasitas inovasi, dengan jalan membangun keterkaitan antar pelaku, mendinamisasikan aliran pengetahuan, difusi dan pembelajaran di antaranya melalui :

- Pengembangan jaringan inovasi daerah
- Memperkuat kemitraan di daerah antara daerah dengan pihak luar
- Membangun kawasan inovatif atau pusat pembelajaran masyarakat

Tabel 2.19. Kondisi Pilar Jaringan Inovasi Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
<p>Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis</p>	<p>Ketersediaan data terkait dengan keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan</p>	<p>Technopark</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Data Fasilitas (sarana prasarana) 2. Ada data layanan 3. Ada data pengguna 4. Ada data kerjasama 	<p>Technopark</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Fasilitas (sarana prasarana): <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Terpadu (Sekretariat, Tenant, Tempat Pelatihan, Rapat, negosiasi) - Cold Storage 30 Ton - Cold Storage 100 Ton - Pasar Ikan dan Perbekalan nelayan - Wisma Nelayan - Rumah Produksi Pakan Ikan - Rumah Layanan Kemasan dan Desain Logo/Produk - Posko TNI AL - Sentra Kuliner Ikan - Gudang Kering - WIFI 2. Ada data layanan <ul style="list-style-type: none"> - Layanan fasilitasi rantai dingin dan pembekuan ikan dan jasa termoking di Cold Storage - layanan singgah dan inap di rumah nelayan - layanan mengemas produk hasil olahan dan desain logo - layanan konsultasi usaha - layanan fasilitasi space untuk tenant - layanan inkubasi Tenant, pembinaan usaha UKM 3. Ada data pengguna: <ul style="list-style-type: none"> - Tenant, UMKM Perikanan - Pemasar Ikan - Pengolah hasil perikanan - Stakeholder terkait 4. Ada data kerjasama: <ol style="list-style-type: none"> 1. PKS Nomor 34/2015 dan Nomor 415.4/0459/2015 BPPT dengan DPPK tentang Pengembangan dan Pemasarakatan ikan nila unggul dan system budidaya terintegrasi di Kawasan Techno Park Perikanan 2. PKS Nomor 0271.1 /2019 TeknoPark dengan UD Hasil Tiga Mulia tentang Inkubasi Teknologi Pemasaran; 3. PKS Nomor 0271.2/2019 Techno Park dengan Berkah Samudera tentang Inkubasi Olahan Ikan Kering; 4. PKS Nomor 0271.3/ 2019 Techno Park dengan Hars Food tentang Inkubasi Olahan Ikan 5. PKS Nomor 0271.4/2019

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			<p>Techno Park Perikanan dengan Koperasi Jasa Sukses Mina Mandiri tentang Inkubasi system rantai dingin dan olahan ikan</p> <p>6. PKS Nomor 0271.5/2019 Techno Park Perikanan dengan Si Panen tentang Inkubasi Budidaya Udang;</p> <p>7. PKS Nomor 0271.6 /2019 Techno Park Perikanan dengan Kamal Hadi tentang Inkubasi Rumput Laut</p> <p>8. PKS Nomor 0271.7/2019 Techno Park Perikanan dengan Putra Jaya tentang Inkubasi Olahan Ikan</p> <p>9. PKS Nomor 0271.8/2019 Techno Park Perikanan dengan Beta Setono Cluster tentang Inkubasi Ikan Hias</p> <p>10. PKS Nomor 0271.9/2019 Techno Park Perikanan dengan KUB Pakan Ikan Mandiri Lestari tentang Inkubasi Pakan Ikan Apung</p>
		<p>Museum Batik</p> <p>1. Ada Data Fasilitas (sarana prasarana)</p> <p>2. Ada data layanan</p> <p>3. Ada data pengguna</p> <p>4. Ada data kerjasama</p>	<p>Museum Batik</p> <p>1. Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiga ruang pameran - Ruang Audio Visual - Workshop Batik - Perputakaan - Ruang Data - Ruang Simpan dan Konservasi - Aula - Kedai - WIFI - Koleksi batik lebih dari 1200 koleksi <p>2. Data Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai koleksi dan budaya batik oleh pemandu - Pelayanan belajar membuat cap dan tulis <p>3. Data Pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan baik domestik maupun manca Negara - Pelajar - Komunitas - Pegiat batik - Dosen dan mahasiswa
		<p>Telecenter:</p> <p>Ada Data Fasilitas (sarana prasarana)</p>	<p>Telecenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data fasilitas /sarana prasarana ada di RT /RW.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			- Data layanan, data pengguna dan kerjasama tidak ada
		Pusat Inovasi Unikal: Belum ada data: fasilitas, layanan, pengguna dan kerjasama	Pusat Inovasi Unikal: -
	Adanya website tentang fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark 1. Ada website TP 2. Ada Pengelola website 3. Ada CP yang dapat dihubungi	Technopark 1. Website TP: Technoparkperikanan.pekalongankota.go.id 2. Pengelola website: UPTD Technopark 3. CP : - WIWIT PUSPASARI, SE 0816899928 - Kantor UPTD : 0285-435996 4. Website diupdate apabila ada pelaksanaan kegiatan (Temporer)
		Museum Batik 1. Ada website TP 2. Ada Pengelola website 3. Ada CP yang dapat dihubungi	Museum Batik 1. Web seb museum Batik : www.museumbatikpekalongan.info 2. Pengelola Website : Ka. Muesum Batik Eko Mudiyanto Harry 3. CP yang dapat dihubungi : Bambang Saptono (0815 6918 448 Eko Murdianto (0856 4074 7867) Heri (0896 6732 1000)
		Telecenter: Ada website, pengelola dan CP yang dapat dihubungi	Telecenter: -
		PI Unikal 1. Website dalam tahap pengembangan 2. Ada pengelola dan CP	PI Unikal
	Legalitas pembentukan kelembagaan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark 1. Ada Dokumen kajian akademis kelembagaan 2. Ada Analisis ratio belanja pegawai 3. Ada Konsultasi dengan pimpinan yang lebih tinggi 4. Ada Peraturan walikota	Technopark 1. Peraturan Walikota: Historis Kelembagaan : 1. Tahun 2015 : Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 523/184 tentang Penetapan Lokasi Technopark Perikanan Kota Pekalongan, ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2015. 2. Tahun 2015-2017 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku Ketua Tim

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			<p>Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Nomor 071/101 Tahun 2015 tentang Pembentukan Technopark Perikanan Kota Pekalongan, ditetapkan pada tanggal 30 september 2015.</p> <p>3. Tahun 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Technopark Perikanan dan Technopark Batik , ditetapkan pada tanggal 04 Juni 2018. ➤ Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 071/272 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengelola Technopark Perikanan, ditetapkan pada tanggal 04 Juli 2018. <p>4. Tahun 2019 : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2019.</p> <p>2. Ada Dokumen Kajian Pembentukan UPTD Technopark Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan (2019)</p> <p>3. Analisa Rasio Belanja Pegawai : APBD 2020 : 499.850.000. BelanjaJasa Tenaga Pendukung Kegiatan non PNS :143.850.000 Rasio : 28,77</p> <p>4. Konsultasi dengan Pimpinan yang lebih tinggi : Kepala DKP, Bappeda, Sekda, Bappeda Provinsi Jateng, BPPT</p>
		<p>Museum Batik Ada Peraturan walikota</p>	<p>Museum Batik Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Daerah Museum Batik pada Dinas pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pekalongan</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Tidak ada	PI Unikal: -
	Dokumen rencana induk pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 1. Ada Tim penyusun rencana induk 2. Ada Pemetaan potensi sumber teknologi dan pengembangan kawasan 3. Ada Dokumen rencana induk	Technopark: 1. Ada Konsultan Perencana DED Kawasan TP bersama Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Technopark* (tim?) 2. Ada Pemetaan potensi sumber teknologi dan pengembangan kawasan 3. Ada Masterplan dan DED Pengembangan Kawasan TP
		Museum Batik: Belum ada dokumen rencana induk	Museum Batik: -
		Telecenter: Belum ada dokumen rencana induk	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada dokumen rencana induk	PI Unikal: -
	Dokumen rencana aksi/dokumen kegiatan	Technopark: 1. Belum ada Tim penyusun rencana aksi 2. Pemetaan program dan rencana. ADA (Roadmap DED Kawasan) 3. Belum ada Dokumen rencana aksi	Technopark: -
		Museum Batik: Belum ada	Museum Batik: -
		Telecenter: Belum ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada	PI Unikal: -
	Keberadaan lembaga pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 1. Ada tim kajian pembentukan UPTD 2. Ada dokumen kajian pembentukan UPTD 3. Ada Struktur organisasi Pengelola UPTD Technopark Perikanan 4. Ada Legalisasi tim pengelola	Technopark: 1. Ada dokumen kajian pembentukan UPTD Technopark Perikanan DKP Kota Pekalongan tahun 2019 2. Ada Struktur organisasi Pengelola : UPTD Technopark Perikanan yang terdiri dari Kepala UPTD (ASN), Kepala Bagian Tata Usaha (ASN), dan membawahi Tenaga Pendukung Kegiatan yang terdiri dari : Tenaga damin & Tehnis : 4 orang, Tenaga Kebersihan : 3 Orang, Tenaga Keamanan : 1 orang 3. Ada Legalisasi tim pengelola :Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2019 tentang

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2019.
		Museum Batik: Struktur Organisasi terlampir (Lampirannya?)	Museum Batik: =
		Telecenter: Ada struktur organisasi di RT/RW	Telecenter: -
		PI Unikal: Ada struktur organisasi dan legalisasi tim pengelola	PI Unikal: -
	Jumlah SDM pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi dengan tingkat pendidikan min S1	Technopark: Jumlah SDM Pengelola Technopark Perikanan S1 : 4 Orang	Technopark: Jumlah SDM Pengelola Technopark Perikanan S1 : 4 Orang Kepala UPTD : 1 orang Kabag TU : 1 orang Jumlah SDM Pengelola Technopark Perikanan (Tenaga Pendukung Kegiatan) S1 : 2 Orang
		Museum Batik: SDM Pengelola Museum Batik : 10 orang	Museum Batik: SDM Pengelola Museum Batik : 10 orang S1 PNS : 7 orang S1 PNS : 1 orang S2 PNS : 2 orang
		Telecenter: - Tenaga pendamping kecamatan 8 org / masing masing kecamatan 2 org, pendidikan S1 - Pengelola di masing masing RT/RW belum terdata tingkat pendidikannya.	Telecenter: -
		PI Unikal: Jumlah SDM Pengelola S1: 2 Orang	PI Unikal: -
	Rasio anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Anggaran Kegiatan Pengelolaan Technopark Perikanan (APBD Kota Pekalongan 2020 Rp.499.850.000,-) Rasio : 24.000.000/499.850.000 = 0,048	Technopark: -
		Museum Batik: Tahun 2020 sebesar Rp. 1.263.525.000 (satu milyar dua ratus enam	Museum Batik: -

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Rasio:	
		Telecenter: Penganggaran : - Hosting : ± Rp. 88.400.000 - Sewa Bandwith : Rp. 135.000 x 12 bl x 221 titik = Rp. 358.020.000,-	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
	Sebaran anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Jumlah OPD yang mempunyai program pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi: 2 (dua) (Bappeda Kota Pekalongan ; DKP Kota Pekalongan)	Technopark: -
		Museum Batik: Jumlah OPD yang mempunyai program pengembangan Museum Batik:*	Museum Batik: -
		Telecenter: - Jumlah telecenter ada 221, untuk penganggaran di 27 kelurahan dan 4 kecamatan. (Di no:10 mestinya)	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
	Pembangunan sarana/prasarana	Technopark: 1. Ada, Sekretariat Technopark berada satu Gedung terpadu dengan Gedung Tenant Technopark 2. Ada, Kawasan Technopark	Technopark: 1. Ada, Sekretariat Technopark berada satu Gedung terpadu dengan Gedung Tenant Technopark yang berfungsi sebagai Sekretariat, tempat pelatihan, ruang Tenant 2. Ada, Kawasan Technopark kondisi saat ini mempunyai sarpras : - Gedung Cold Storage 30 Ton - Gedung Cold Storage 100 Ton - Gedung Produksi Pakan Ikan - Rumah Kemasan Hasil Olahan Perikanan - Wisma Nelayan - Kios dan Lapak pemasaran hasil perikanan dan perbekalan nelayan - Sentra Kuliner Ikan - Gudang Kering

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		Museum Batik: UPTD Museum Batik menempati lahan milik Pemerintah Kota Pekalongan beralamat di Jalan Jetayu Nomor 3 Pekalongan	Museum Batik: -
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: Tidak ada
		PI Unikal: Ada Sekretariat tapi minimalis dan belum menunjukkan kinerja yang diinginkan	PI Unikal: -
	Jenis Penyelenggaraan Layanan Fasilitas/Wahana jaringan inovasi	Technopark: 1. Ada Layanan intermediasi teknologi. 2. Belum ada .Layanan konsultasi hukum HKI 3. Laboratorium/fasilitas produksi skala terbatas. (Bangsal / Rumah Pakan Ikan) 4. Ada Pendampingan tenant 5. Ada ruangan tenant, tetapi belum memadai 6. Melakukan pelatihan 7. Ada ruangan untuk pelatihan/konferensi/ seminar. berada dalam Gedung Terpadu Technopark 8. Ada Layanan konsultasi teknis (Konsultasi design logo dan kemasan produk olahan perikanan)	Technopark: 1. Ada Layanan intermediasi teknologi. Fasilitasi sistem Daring dalam peningkatan SDM dan ketrampilan pada binaan (tenant); Teknologi Budidaya Nanobubble 2019; Layanan Rumah Kemasan untuk peningkatan daya saing kemasan hasil perikanan meliuti fasilitas packaging dan desain produk dan logo UKM 2. Ada Pendampingan tenant: fasilitasi akses pemasaran melalui bazaar, penyediaan space untuk show room produk, fasilitasi layanan pengemasan prduk dan desain grafis 3. Melakukan pelatihan: antara lain pelatihan olahan hasil perikanan, pelatihan pemasaran, dll.
		Museum Batik: Layanan di Museum Batik yaitu : latihan membuat Penyediaan ruang untuk pelatihan dan pertemuan (kapasitas 50 peserta)	Museum Batik: -
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: Tidak ada
		PI Unikal: Belum ada	PI Unikal: Belum ada
	Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Technopark: 1. Ada SOP lisan 2. Ada SOP tertulis: SOP Pengelolaan Technopark Perikanan	Technopark: -
		Museum Batik: Ada SOP Tertulis	Museum Batik: SOP Tertulis: SOP Pengadaan koleksi dengan Pembelian SOP Kajian Koleksi

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			Pengadaan Koleksi dengan Hibah/Sumbangan SOP Pelaksanaan Pameran SOP Konservasi Koleksi
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada	PI Unikal: -
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEKIN/atau LITBANGJIRAP serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, khususnya UMKM	Jumlah universitas ,lembaga penelitian dan Sekolah yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Jumlah universitas dan lembaga penelitian yang terlibat : 3	Technopark: Ada 2 (dua) Universitas antara lain : Unikal, Undip dan Lembaga Penelitian: BPPT . (Sudah Tidak Berlaku lagi , sebelum 2020) MOU dengan BPPT : PKS Nomor 34/2015 dan Nomor 415.4/0459/2015 BPPT dengan DPPK tentang Pengembangan dan Pemasaryakatan ikan nila unggul dan system budidaya terintegrasi di Kawasan Techno Park Perikanan
		Musem Batik: Jumlah universitas dan lembaga penelitian yang terlibat : 3	Musem Batik: 1. Universitas Esa Unggul dengan kegiatan Bantuan katalog Koleksi pada Tahun 2019 2. Institut Teknologi Bandung dengan kegiatan Dokumentasi/ database koleksi 3. Kadin Pekalongan
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
	Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Ada 2 komunitas	Technopark: - Komunitas Ikan Hias - Komunitas Pengolah dan Pemasar Ikan (tetapi belum ada MoU)
		Musem Batik: Ada 12 komunitas	Musem Batik: Data Komunitas (belum ada MOU); ada 12. 1. Komunitas kampung Batik Kauman 2. Komunitas Kampung Batik Pesindon 3. Kampung Canting Landungsari 4. Paguyuban Pencinta Batik Pekalongan 5. ASEPFI Pekalongan 6. KLJI Pekalongan 7. FOPONSI Pekalongan 8. Picture Of Pekalongan 9. Pekalongan Nulis 10.Doodle Art Pekalongan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			11.Yayasan Batik Indonesia 12.Kadin Pekalongan
		Telecenter: RT, RW, LPM dan Karang Taruna	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
	Pengembangan SDM Pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 1. Ada training SDM pengelola di tingkat lokal: (1 kali) 2. Ada training SDM pengelola di tingkat provinsi/regional (1 kali) 3. Ada training SDM pengelola di tingkat nasional (2 kali) 4. Ada training SDM pengelola di tingkat internasional (2 kali)	Technopark: 1. Ada training SDM pengelola di tingkat lokal: Dari Pemkot Pekalongan tentang tata Bahasa dan Diskominfo. Dilatih oleh BPPT pada tahun 2019, tetapi SDM tersebut sudah pindah tugas sehingga yang baru belum ada yang dilatih (1 kali) 2. Ada training SDM pengelola di tingkat provinsi/regional :Daring zoom meeting Bappeda Jateng . (1 kali) 3. Ada training SDM pengelola di tingkat nasional :Daring / Webinar Workshop Melalui Zoom Meeting oleh KKP. (2 kali) 4. Ada training SDM pengelola di tingkat internasional : Fasilitasi sistem pemasaran produk bersama Kemenlu dengan zoom meeting Perusahaan di Shanghai untuk ekspor produk olahan perikanan. (2 kali)
		Musem Batik: -	Musem Batik: -
		Telecenter: - Training pengelola telecenter pernah dilaksanakan pada tahun 2019 sejumlah 100 orang oleh Diskominfo - Untuk tahun 2020 tidak ada training	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
	Pemanfaatan hasil penelitian dari universitas, lembaga penelitian dan komunitas dalam fasilitas/ wahana jaringan inovasi atau dalam rangka pengembangan fasilitas/ wahana jaringan inovasi	Technopark: Belum ada	Technopark: -
		Musem Batik: Belum ada	Musem Batik: -

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		Telecenter: Belum ada	Telecenter: -
		PI Unikal: 1. Teh rambut jagung (Zea Tea) 2. Tepung Malla (Maggot dan Azolla) 3. Mikrokapsul	PI Unikal: -
Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	Kerjasama pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Jumlah kerjasama skala lokal : 1 Jumlah kerjasama skala regional : 1 Jumlah kerjasama skala nasional : 1 Jumlah kerjasama skala internasional : Belum ada	Technopark: Jumlah kerjasama skala lokal : Unikal Jumlah kerjasama skala regional : Undip Jumlah kerjasama skala nasional : BPPT
		Musem Batik: Kerjasama skala Nasional: 2	Musem Batik: Kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Esa Unggul
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
		Setda: (lihat ada data di Pokja 1)	Setda: (lihat ada data di Pokja 1)
	Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Technopark: Jumlah produk yang dihasilkan : Belum ada	Technopark: -
		Musem Batik: Jumlah produk yang dihasilkan : Belum ada	Musem Batik: -
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: 1. Teh rambut jagung (Zea Tea) 2. Tepung Malla (Maggot dan Azolla) 3. Mikrokapsul	PI Unikal: -
Mendorong Budaya Inovasi	Budaya berjejaring antar aktor inovasi	Technopark: 1. Jumlah pelatihan sesuai komoditas unggulan yang diusung oleh technopark dalam setahun : Belum ada. 2. Jumlah pelatihan berbasis IT dalam setahun : Belum ada. 3. Jumlah pelatihan lainnya yang	Technopark: -

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		mendukung perkembangan wilayah dalam setahun : Belum ada	
		Museum Batik: 1. Pelatihan Membatik bagi Anak Sekolah untuk 3000 siswa selama sebulan, tiap hari 100 siswa. 2. Pelatihan sesuai permintaan dari Wisatawan atau pengguna lainnya	Museum Batik: -
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Jumlah wirausaha yang mendapat pembinaan : 30 Orang dan 9 Tenant	Technopark: -
		Museum Batik: -	Museum Batik: -
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
Menumbuhkan bangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	Kerjasama antar daerah/dengan pusat terkait fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 1. Wahana jejaring inovasi sudah terdapat di dalam program perencanaan daerah (Renstra/RPJMD) 2. Belum Mengikuti sosialisasi jaringan/technopark yang diselenggarakan Kemenristek 3. Technopark belum terdaftar sebagai SPIN technopark 4. Memiliki legalisasi pengelola: Perwal Nomor 82 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Memiliki rencana induk (Masterplan dan DED Kawasan) 6. Belum Memiliki dokumen rencana aksi 7. Pembangunan sarana prasarana: Tahun 2020 Pemeliharaan Kawasan	Technopark: -

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		Museum Batik: -	Museum Batik: -
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	PI Unikal: -
Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Positioning wahana jejaring inovasi dengan komunitas internasional	Technopark: Belum ada	Technopark: -
		Museum Batik: Belum ada	Museum Batik: -
		Telecenter: Belum ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada	PI Unikal: -

2.2.4.4. Pilar Teknopreneur

Pengelompokkan kebijakan yang bertujuan menumbuhkan bisnis inovatif di daerah serta pengembangan budaya inovasi melalui :

- Perumusan strategi teknoprenersip di daerah
- Modernisasi UMKM
- Penciptaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
- Pengembangan inkubator teknologi di daerah

Tabel 2.20 Kondisi Pilar Teknopreneur Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
Mengembangkan Kerangka Umum yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis	Ketersediaan database teknopreneur	Data UMKM (dan entrepreneur) masih manual belum menggunakan aplikasi dan belum pernah dilakukan update data baik di Dindagkop UMKM maupun di Dinperinaker	1. Jumlah UMKM Inovatif : 2.707 2. Sektor Usaha Kriya : 843 (Batik 741, Kerajinan 102) Sektor Usaha Kuliner: 1.864 3. 47 UKM Binaan (wira usaha baru) pada Dinperinaker (aneka makanan dan aneka industri)
	Regulasi pengembangan teknopreneur	Sampai saat ini belum ada regulasi yang dijadikan landasan pengembangan teknopreneur di daerah	
	Legalitas Pendirian dan Pengelolaan Inkubator Bisnis	Sudah ada	Saat ini sudah ada legalitas berupa Keputusan Walikota

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
			Pekalongan Nomor 050.05/219 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator, Bisnis dan Teknologi Kota Pekalongan, yang masih berlaku.
	Ketersediaan inkubator bisnis dan kepemilikannya	Sudah ada inkubator	Saat ini di Kota Pekalongan sudah ada incubator yang difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan di bawah kendali Dinperinaker sebanyak 1 Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi
	Pengelola/manajer inkubator bisnis	Sudah ada	Untuk mengelola incubator bisnis yang ada di Diperinaker telah ditunjuk Manajer Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kepala Dinperinaker Nomor 560/017/2020
	Sarana dan prasarana inkubator	Sudah ada sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang ada pada incubator bisnis adalah: 1. Ruang kerja tenant 2. Ruang konsultasi 3. Ruang kerja manajemen 4. Sistem informasi (online) 5. Ruang pelatihan yang bergabung dengan BLK (menempati gedung bersama dengan BLK)
	Standar penyelenggaraan inkubator sebagai fasilitas penumbuhkembangkan teknopreneur	Sudah ada aktivitas pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi	Penyelenggaraan inkubator sebagai fasilitas penumbuhkembangkan teknopreneur telah melakukan pelayanan pra inkubasi, layanan inkubasi dan pasca inkubasi
	Persentase alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan teknopreneur	Anggaran sekitar 0,17 s/d 0,26 persen	Anggaran program terkait kewirausahaan Tahun 2018 sebanyak Rp. 2,197 M atau sekitar 0,22% dari APBD 2018 (Rp. 980 M), Tahun 2019 sebesar Rp. 2,72 M

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
			atau sekitar 0,26% dari APBD 2019 (Rp. 1,05T) dan pada TA. 2020 sebesar Rp. 1,8 M atau sekitar 0,17% dari APBD TA. 2020 (Rp. 1.012 T) di mana pada tahun anggaran 2020 ada pengurangan dari tahun sebelumnya karena kebijakan refocussing dan realokasi anggaran sebagai dampak adanya pandemi Covid 19
	Besarnya penyaluran insentif / kemudahan pengembangan teknopreneur	Sekitar 0,91% UMKM menerima insentif berupa kemudahan dan pelatihan	<p>Jumlah UMKM : 23.093 pelaku usaha</p> <p>Jumlah UMKM yang mendapatkan Insentif pada Dindagkop sebanyak 222 pelaku usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hibah Wirausaha Pemula 24 UMKM dari Kemenkop UKM RI - Bansos JPE pembelian masker 30 UMKM dari Dinkop UKM Provinsi Jateng - Bansos JPE bahn baku produksi makanan ringan 148 UMKM dari Dinkop UKM Provinsi Jateng - Bantuan Gerobak 20 UMKM dari anggaran APBD - Bantuan pemberdayaan masker 4 UMKM dari anggaran APBD <p>Sementara itu di Dinperinaker ada 12 UMKM binaan yang mendapatkan isentif</p>
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEKIN/atau LITBANGJIRAP serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, khususnya UMKM	Sebaran SDM IPTEKIN / Litbangjirap yg berkontribusi dalam pengembangan teknopreneur daerah	Belum ada pegawai Pemda yang menjadi pejabat fungsional yang secara khusus sebagai pendamping pengembangan teknopreneur	Untuk jumlah peneliti di Bappeda saat ini sudah ada 2 orang calon peneliti, sedang di perangkat daerah lainnya tidak ada fungsional peneliti, tetapi pada beberapa perguruan tinggi ada tim peneliti (yang beberapa kali mengikuti kegiatan Riset Unggulan Daerah yang diselenggarakan Bappeda), Bappeda juga memfasilitasi Pengabdian

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
			<p>Masyarakat dengan melibatkan Tim Peneliti Perguruan Tinggi untuk pengembangan potensi ekonomi di beberapa wilayah. Selain itu beberapa kali peneliti dari perguruan tinggi melakukan penelitian, tapi hasil dari penelitian tersebut tidak diinformasikan ke Dinas sehingga rekomendasi atau tindak lanjut apa yang harus dilaksanakan dalam penanganan permasalahan tidak diketahui.</p> <p>Pada beberapa tahun yang lalu juga ada pendampingan dari BPPT terkait pusat inovasi dan incubator bisnis dan sampai saat ini masih aktif di beberapa OPD.</p>
	Rasio tingkat absorpsi UMKM terhadap hasil litbangjirap pengembangan teknopreneur	Belum tercatat dengan baik	Jumlah UMKM : 23.093 yang sudah dilakukan pemutakhiran data pada tahun 2019 ada 4.065 UKM (UKM Batik sebanyak 700 UKM)
Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	Sebaran kemitraan strategis teknopreneur	Pelatihan teknopreneur dengan mendatangkan pengajar dari wilayah lain dan dari akademisi	Peningkatan program pelatihan yang disertai dengan program pemagangan dengan mengoptimalkan peran Forum Jejaring Pemagangan yang ada guna meningkatkan kesiapan peserta dalam memasuki dunia kerja
	Jumlah dan skala interaksi komersialisasi teknologi antara penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur	Sudah ada Perjanjian Kerjasama Bank Jateng tentang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Perjanjian Kerjasama dengan Bank Jateng tentang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), eksportir utk bergabung di KITE saat ini baru satu yang bergabung (Batik Raveena), utk menumbuhkan eksportir baru masih kesulitan (keengganan untuk mengurus persyaratan ekspor) hanya kenaikan nilai ekspor.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
Mendorong Budaya Inovasi	Rasio wirausaha / UMKM terhadap jumlah penduduk daerah tsb	7,5%	Jumlah UMKM : 23.093 (2015) Jumlah Penduduk 307.097 jiwa (BPS-2019)
	Program peningkatan iklim kewirausahaan	Ada sosialisasi program program pelatihan	Program-program pendukung technopreneurship seperti techno camp, talent scouting, dan/atau kegiatan lain sejenis yang bertujuan memotivasi dan menjaring calon wirausaha muda telah disosialisasikan di lembaga pendidikan tinggi secara rutin setiap tahunnya oleh Dinperinaker. Selain itu Dindagkop UMKM melaksanakan kegiatan menjaring calon wirausaha muda : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Wirausaha Pemula (DAK) bagi 27 UMKM 2. Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) bagi UMKM (DAK)) bagi 27 UMKM 3. Pendampingan pengembangan usaha UMKM (APBD) bagi 20 UMKM 4. Pengembangan wirausaha inovatif dibidang Kopi Barista (APBD) bagi 40 UMKM 5. Pelatihan Digital Marketing (DID) bagi 25 UMKM 6. Pemberdayaan UMKM penghasil masker (DID) berapa bagi 4 UMKM 7. Pelatihan Cyber UMKM 8. Memperluas jaringan pemasaran di Pusat Perbelanjaan Modern di Jakarta (Thamrin City dan Pasar Pagi Mangga Dua) berapa bagi 29 UMKM
Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	Jumlah usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri unggulan daerah	- UMKM Batik sebanyak 741 unit, - UMKM Canting 21 dan - UMKM binaan pengolahan ikan 3 UMKM	Jumlah UMKM inovatif sesuai klaster unggulan daerah : jumlah UMKM Batik sebanyak 741 unit, UMKM Canting sebanyak 21 dan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
			UMKM binaan pengolahan ikan sebanyak 3 UKM
	Koordinasi antara pemerintah daerah dalam satu regional dan antara pemerintah daerah dengan pusat	Ada peraturan yang mendukung pengembangan teknopreneur	Perda kota/Perwal : 1. Perwal No.45 Th 2019 Tgl, 12 Juli 2019 ttg Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik 2. Perda No.5 Th.2014 ttg Branding Kota Pekalongan 3. Perda No.6 Th.2014 ttg Penggunaan Label "Batik Pekalongan" 4. Perda No. 7 Th.2019 ttg Ketersediaan Bahan Baku Batik
Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Penerapan label ramah lingkungan pada produk UMKM/PPBT dalam tiga tahun terakhir (2018-2020)	Sampai tahap sosialisasi	Pemerintah telah melakukan program memberikan penyuluhan/ pelatihan/ pendampingan kepada UKM terkait standarisasi produk yang ramah lingkungan hanya saja secara kuantitas masih sangat terbatas dan belum ada program pendampingan standarisasi produk
	Rasio jumlah bisnis inovatif yang terstandar ISO 14001	Belum ada	
	Rasio kepemilikan kekayaan intelektual oleh para teknopreneur daerah terhadap total UMKM	Ada kepemilikan HaKI berupa Hak Merek dan Hak Cipta	Belum semua UMKM memiliki HAKI, saat ini ada 35 UMKM yang mempunyai Hak Merk dan 113 UMKM yang sudah memiliki Hak Cipta

2.2.4.5. Pilar Tematik Daerah (KKI 1-6)

Pengelompokan kebijakan yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendukung implementasi SIDA, seperti: SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik), literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masyarakat dan dunia usaha, implementasi *smart city*, serta transformasi digital.

Tabel 2.21. Kondisi Pilar Tematik Daerah Saat Ini

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Ketersediaan basis data terkait dengan SPBE, smartcity, dan literasi TIK di masyarakat dan pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan TIK di Kota Pekalongan, meliputi Smartcity dan SPBE • Data yang sudah tersedia adalah: % keluarga yg menggunakan fixphone, dan % individu yg menggunakan internet (di publikasi Kota Pekalongan Dalam Angka). • Data yang belum tersedia: % individu yg menggunakan HP, dan % individu yg menggunakan komputer. • Luasan wilayah yang terjangkau internet terdapat pada Data Base TIK Kota Pekalongan Tahun 2020. Data tidak menunjukkan persentase 	- Seluruh kantor kelurahan terkoneksi Batiknet (sebagian menggunakan FO dan wireless)
	2. Ketersediaan website portal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah OPD ada 31, semuanya memiliki website. • 16 OPD mempunyai website aktif update minimal 1 bulan sekali. • Seluruh website OPD terintegrasi dalam domain Pemerintah Kota Pekalongan (Pekalongan.go.id). 	
	3. Regulasi atau landasan hukum/ bentuk kebijakan lainnya terkait dengan pengembangan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. • Perwal Nomor 9 Tahun 2012 tentang TIK. • Draft Perda SPBE yang sdh masuk agenda. pembahasan 2021 • Perwal Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik • Panduan pengembangan Smartcity, Menkominfo • Perwal Nomor 66 Th 2019 tentang Masterplane Smart City Kota Pekalongan 	

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
		Tahun 2018 - 2029	
	4. Masterplan pengembangan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Masterplan Smartcity Tahun 2018. • Dokumen Masterplan SPBE dalam proses penyusunan. 	
	5. Kelembagaan pengelola pengembangan TIK	Belum ada lembaga pengelola (smartcity, SPBE), namun sudah ada kajian dalam dokumen masterplan	
	6. Rasio anggaran untuk pengembangan TIK terhadap APBD	Total APBD Kota Pekalongan Tahun 2020 Rp.1.012.737.890.000,- Anggaran Belanja TIK Rp.35.825.486.500 Rasio anggaran TIK terhadap APBD 3,537%	
	7. Pembangunan fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang server sudah ada 2. Jaringan internet ada 3. Perangkat komputer ada 4. Terdapat ruang Command center. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang server dilengkapi 31 server, 6 router, 10 hub, 4 modem, dll. Sebagian besar umur server 10 tahun atau lebih. 2. Gambaran Jaringan internet: <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh OPD, Puskesmas dan Kelurahan telah memiliki jaringan Batik net melalui radio/wireless. Sekolah yang terkoneksi Batiknet dengan wireless berjumlah 50 sekolah. b. Sebagian kecil OPD, Puskesmas, dan Kelurahan belum terkoneksi Batiknet melalui kabel FO c. Kapasitas seluruh bandwidth yang dikelola oleh Dinkominfo sebesar 1318 Mbps (318 Mbps jenis dedicated) 3. Pada umumnya perangkat komputer yang dimiliki OPD dan kelurahan mencukupi kebutuhan penyelesaian

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
			<p>pekerjaan kantor. Perangkat komputer Sekolah Dasar dan TK belum memadai.</p> <p>4. Ruang Command center, tidak ada perangkat, aplikasi, maupun SDM. Command center sementara hanya berfungsi sebagai callcenter.</p>
<p>Meningkatkan Kelembagaan dan daya dukung Iptekin/Litbangjira serta kemampuan absorpsi oleh industry Khususnya UMKM</p>	<p>8. Kelembagaan iptekin/ litbangjirap yg terlibat dalam pengembangan TIK</p>	<p>Jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Kota Pekalongan sebanyak 6 PT</p> <p>Jumlah lembaga Litbangjirap yang terlibat sebanyak 1 lembaga</p>	<p>Jumlah PT yang terlibat kerjasama program TIK ada 3 PT, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polines (Semarang) bekerja sama dalam hal penelitian pembuatan mesin canting cap berbasis komputer. Dasar: MoU • STIMIK WP(Kota Pekalongan) bekerja sama dalam hal menjadi narasumber dan tenaga ahli kegiatan capacity building. Dasar: Surat tugas; • UMPP(Kota Pekalongan) bekerja sama dalam kerangka pengabdian masyarakat tentang penyusunan Sistem prosedur akuntansi berbasis akrual dan penyusunan naskah akademik Perda SPBE. Dasar: Surat penugasan. <p>Jumlah lembaga Litbangjirap yang terlibat kerjasama adalah BPPT</p>
	<p>9. Jumlah lembaga / komunitas dalam pengembangan TIK</p>	<p>Terdapat 13 komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK,</p>	<p>Terdapat 13 komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK, meliputi: kelompok informasi masyarakat (KIM), Dewan TIK, Relawan TIK, Asosiasi Rakyat Anti Hoax (ARAH), BloggerPekalongan, Akademi Berbagi, KFI, Formaci, Dron Pekalongan, Insta</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
			<p>Pekalongan, Pekalongan Info, Explore Pekalongan, dan Generasi Pesona Indonesia.</p> <p>Penetapan Dewan TIK dengan SK Walikota, kegiatan difasilitasi oleh Dinkominfo, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi.</p> <p>Relawan TIK dibina oleh Kominfo Provinsi dan diinisiasi oleh Dinkominfo Kota Pekalongan.</p> <p>ARAH dan Blogger hasil inisiasi Pemerintah Kota Pekalongan.</p>
Meningkatkan Kolaborasi TIK antara lembaga Litbangjirap dengan pengelola TIK	10. Kolaborasi antara lembaga litbangyasa/ Litbangjirap dengan pengelola TIK	Karena lembaga pengelola TIK (smartcity, SPBE) belum terbentuk, maka kolaborasi dilakukan oleh Pemkot Pekalongan (dinas Kominfo)	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerjasama antara Dinkominfo Kota Pekalongan dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Pekalongan; • Kerjasama swakelola Tipe II antara DinKominfo dengan Pusyantek BPPT
Mendorong budaya inovasi	11. Jumlah kegiatan Diklat di bidang TIK serta tingkat pelaksanaannya	Karena pengelola lembaga TIK (smartcity dan SPBE) belum terbentuk, maka pengembangan SDM di bidang TIK dilakukan kepada ASN yang berkaitan dengan tupoksi di bidang TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta training lokal (ASN) pengelola infrastruktur TIK di OPD yang diselenggarakan oleh Dinkominfo sebanyak 45 orang. • Peserta training lokal (ASN) pengelola website OPD yang diselenggarakan oleh Dinkominfo sebanyak 168 orang. • Peserta training nasional (ASN) yang diselenggarakan oleh Dinkominfo bekerjasama dengan Kemenkominfo sebanyak 10 orang.
Menumbuh kembangkan dan	12. Koordinasi dengan pemerintah daerah	Peraturan yang diadopsi dari pusat dan	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 95 Th 2018 ttg SPBE

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Keterangan
memperkuat keterpaduan/koherensi pemajuan sistem, inovasi daerah	dan pusat	peraturan perundangan tingkat Kota Pekalongan. Peraturan di tingkat provinsi tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan Kemenkominfo tentang pengembangan Smartcity (Gerakan menuju 100 smartcity) • Produk peraturan daerah meliputi: Draft Perda SPBE, Perwal Nomor 66 Th 2019 tentang Masterplane Smart City Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2029
Menyelaraskan dengan perkembangan global	13. Jumlah produk yang digunakan sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kabel FO namun tidak tanam • Penggunaan perangkat keras jaringan TIK • Penggunaan perangkat Pusat data • Penggunaan FOSS 	

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA

3.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis melalui proses FGD serta analisis permasalahan dan hasil pembangunan pada RPJMD 2016-2020, maka permasalahan utama pembangunan Kota Pekalongan lima tahun ke depan, secara umum adalah Layanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.

Penyebab Permasalahan utama tersebut terdiri atas permasalahan daerah dan permasalahan OPD yang terdiri atas :

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)
2. Daya Saing Ekonomi
3. Tata Kelola Pemerintahan
4. Sarana dan Prasarana Perkotaan.
5. Kondusivitas Wilayah

3.2. Isu Strategis Pembangunan Kota Pekalongan

Isu-isu strategis terbagi menjadi isu internasional, isu nasional, isu regional, dan isu Kota Pekalongan.

A. Isu internasional, terdiri atas :

- a. Sustainable Development Goals (SDG's),
- b. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*),
- c. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batasbatas Negara
- d. Pandemi COVID-19

B. Isu Nasional, sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2019-2024 antara lain mengenai :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
- b. Tenaga Kerja
- c. Investasi
- d. Perdagangan
- e. Institusi
- f. Pendidikan
- g. Kesehatan
- h. Karakter bangsa
- i. Infrastruktur
- j. Kewilayahan
- k. Lingkungan Hidup dan Bencana
- l. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Termasuk isu bahwa Tahun 2020-2024, Pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan 20 persen GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan.

Isu nasional lainnya yang menyangkut langsung Kota Pekalongan adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

C. Isu Regional

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki isu strategis sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan kemiskinan
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- 3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
- 4) Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
- 5) Kedaulatan pangan dan energi

- 6) Kesenjangan wilayah
- 7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

D. Isu-isu Strategis Kota Pekalongan, terdiri atas :

- 1) Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
- 2) Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha
- 3) Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
- 4) Penanganan Rob dan Banjir
- 5) Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman dan Perkotaan
- 6) Penataan Wajah Kota dan Pengembangan Pariwisata
- 7) Sampah, Penyediaan Air Baku dan Pencemaran Lingkungan Hidup
- 8) Tata Kelola Pemerintahan Dan Kondusivitas Wilayah
- 9) Pemulihan Kota Pekalongan akibat Pandemi COVID-19

3.3. Tantangan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Penguatan sistem inovasi daerah tidak terlepas dari tantangan dan isu yang dihadapi oleh sebuah daerah. Lima tantangan pembangunan di Kota Pekalongan seluruhnya merupakan isu yang masuk ke dalam penguatan sistem inovasi daerah.

1. Kualitas SDM akan berkaitan dengan isu penguatan SIDA pada pilar 1, terutama Masalah Daerah:
 - a. Penurunan Angka Kemiskinan Belum Optimal
 - b. Penurunan Angka Pengangguran Belum optimal
 - c. Rendahnya Minat Baca Masyarakat.
2. Daya Saing Ekonomi akan berkaitan dengan isu penguatan SIDA:
 - a. Pilar 1 yakni Masalah Daerah tentang Pertumbuhan Investasi Belum Optimal;
 - b. Pilar 2 yakni Masalah Daerah tentang Tingkat Kunjungan Pariwisata Masih Rendah dan kunjungan sangat rendah pada saat pandemi COVID-19;
 - c. Pilar 2 dan Pilar 4 yakni Masalah Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Belum Optimal.

3. Tata Kelola Pemerintahan akan berkaitan dengan isu Penguatan SIDa:
 - a. Pilar 1 yakni Masalah Daerah tentang Layanan Publik Belum dikelola dengan Optimal (*Smart Governance*)
 - b. Pilar 5 yakni Masalah Daerah tentang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (*Smart Governance*).
4. Sarana Prasarana Perkotaan akan berkaitan dengan isu Penguatan SIDa, khususnya Pilar 1 yakni Masalah Daerah tentang Penataan Kota dan Kenyamanan Masyarakat Belum Optimal (*Smart Living*).
5. Kondusivitas Wilayah akan berkaitan dengan isu Penguatan SIDa, khususnya Pilar 1 yakni Masalah Daerah tentang Masih Adanya Konflik Sosial dan Kriminalitas.

3.4. Peluang Kota Pekalongan

Peluang dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bagi Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

3.4.1. Berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada globalisasi

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan banyak daerah yang inovatif, termasuk Kota Pekalongan, yaitu:

- a) Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditas yang dihasilkan Kota Pekalongan seperti hasil dari sub sektor ekonomi kreatif Kriya (Batik), dan perikanan.
- b) Perluasan jaringan dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur Pemerintah Kota Pekalongan.
- c) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kota Pekalongan.

3.4.2. Potensi ekonomi berbasis kreatif.

Potensi ekonomi berbasis kreatif (industri kreatif) yang ditopang oleh para pelaku usaha berusia muda, menyebabkan Kota Pekalongan memiliki sumberdaya yang sangat besar. Ada 3 sub sektor ekonomi kreatif di kota Pekalongan yang mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan, yaitu:

- a) **Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kriya.** Seni Kriya yang paling terkenal di Kota Pekalongan adalah “Batik”. Sejarah Batik Pekalongan tidak tercatat secara resmi kapan mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Batik asli Pekalongan terkenal dengan istilah batik pesisir kaya akan warna. Sehingga batik pesisir terkenal dengan ragam hiasnya yang bersifat naturalis. Motif Batik Pekalongan sangat bebas, dan menarik, motifnya juga bisa dimodifikasi dengan variasi warna yang atraktif. Kota Pekalongan pada tahun 2014 memperoleh penghargaan UNESCO “*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*” sebagai kota kreatif dunia dalam bidang kerajinan dan kesenian rakyat (*City of Crafts and Folks Art*) serta mempunyai *city branding* yaitu **World’s city of Batik**. Pesatnya industri Batik disini, hingga menjadikan Kota Pekalongan sebagai Kota Batik Dunia.
- b) **Sub Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan.** Seni pertunjukan merupakan sebuah tontonan yang memiliki nilai seni di mana tontonan tersebut disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Seni pertunjukan dapat berupa musik, teater, drama ataupun seni pertunjukan lainnya. Kota Pekalongan memiliki seni pertunjukan yang tak terlepas dari budaya. Berikut adalah beberapa seni pertunjukan budaya yang ada di Kota Pekalongan: Tari sintren, Kuntulan, Syawalan, Perayaan Cap Gomeh, dll
- c) **Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kuliner.** Kuliner adalah bagian yang tidak dapat terlepas dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Sekarang kuliner juga bagian dari wisata yang dinamakan dengan wisata kuliner dan kuliner tidak terlepas dari wisata lainnya juga. Setiap kuliner memiliki ciri khas masing masing sesuai dengan lokasi, potensi, dan

bahan baku dari kuliner tersebut. Contoh dari kuliner makanan khas Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: Kluban, Garang asem, Sego Medono, Soto Tauto, pindang tetel, sentra kuliner perikanan.

3.4.3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengatasi hambatan jarak serta waktu

Teknologi informasi berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, serta yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Kemajuan TIK yang meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Revolusi telekomunikasi membuat dunia sebagai kampung global, menghilangkan sekat batas teritorial suatu negara. Adanya saling ketergantungan membuat guncangan di sebuah negara dan kawasan bisa dalam waktu sekejap mengguncangkan negara dan kawasan lainnya.

3.4.4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah

Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing sangat bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada berbagai dimensi dan tataran. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing perlu semakin diprioritaskan melalui penguatan sistem inovasi.

Dalam kerangka holistik, keunggulan daya saing dalam berbagai perspektif dan konteksnya termasuk keunggulan daerah atau tata terpadu pengembangan ke wilayah tertentu, diharuskan untuk dikembangkan secara lebih terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Setiap keunggulan yang dimiliki daerah terutama bagi daerah di negara berkembang menghadapi beberapa keterbatasan dan kelemahan dalam berinovasi dikarenakan beberapa hal berikut, yaitu:

- a) Keterbatasan SDM dan sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin);
- b) Keterbatasan sumberdaya keuangan;
- c) Sektor swasta yang tidak kompetitif di negara berkembang;

- d) Kelemahan dalam kemauan politik (*political will*), kebijakan yang stabil dan penegakan hukum (*law enforcement*);
- e) Kebutuhan jangka pendek yang selalu mendominasi investasi jangka panjang dalam Iptekin.

BAB IV

KONDISI SIDA YANG DIINGINKAN

Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan yang akan dicapai secara umum menggambarkan bagaimana kondisi SIDa Kota Pekalongan yang diharapkan (target) terjadi pada akhir periode, yakni Tahun 2025.

Capaian-capaian tersebut diharapkan menjadi pendukung utama keberhasilan pencapaian Visi pembangunan Kota Pekalongan. Isi dari Bab IV ini merupakan rencana target SIDa yang akan dicapai di tahun 2025 berdasarkan kondisi SIDa saat ini, sebagaimana dicantumkan di dalam Bab II. Rencana capaian (target) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4.1. Pilar Ekosistem Inovasi (KKI 1-6)

Tabel 4.1. Kondisi SIDA yang ingin dicapai pada Pilar Ekosistem Inovasi

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis	Ketersediaan basis data inovasi dan bisnis	1. Diambil dari situs https://oss.pekalongankota.go.id/oss , Profil investasi disajikan dalam bentuk : - Perwal nomor 57 A Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2025. - Data Perkembangan investasi yang sudah disajikan setiap tahun. - 3. Data peluang investasi meliputi : Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Industri dan Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata. 2. Data UMKM (22.983) terdiri dari : - Perdagangan (SIUP) = 9.115 - Industri kecil menengah = 6.344 - Pedagang pasar = 6.610 - Pedagang kaki lima = 914/ 3. Profil kelurahan : berbentuk Monografi kelurahan dan Profil Kelurahan. 4. Data TTG : tersedia data produk TTG. 5. Data KIM : KIM Kraton Kidul. 6. Data Komunitas Kreatif Daerah dalam bentuk Data Pelaku E-Kraf meliputi : Fashion, Kriya, Disain Produk, Film-Animasi-Video,	1. Profil investasi disajikan dalam situs web : https://oss.pekalongankota.go.id/oss , dengan pengembangan berupa : - Perubahan Perwal untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru (Perubahan Kelurahan, RTRW, dll). - Penyajian data perkembangan investasi setiap tahun. - Penambahan jenis usaha : Perikanan dan Kelautan (docking dan galangan kapal), Jasa (jasa telekomunikasi, jasa ekspedisi, koperasi), Pariwisata (Taman Wisata Laut Pasir Kencana), Pengembangan Kawasan (Pengembangan Pekalongan Baru). 2. Data UMKM : - terintegrasi dari berbagai OPD, meliputi : Dindagkop & UMKM, Dinperinaker, DPM-

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<p>Kuliner, Fotografi, Seni Rupa, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan, Radio-Televisi, Aplikasi dan Pengembangan Permainan, dan Arsitektur.</p> <p>7. Fasilitas Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ketersediaan dan peran OPD pendukung (Bappeda, DPMPTSP, Dindagkop UMKM, Dinperinaker, Dinparbudpora, Dindik). -Kemudahan dalam pengurusan (kepastian Regulasi dan SOP). -Fasilitasi keikutsertaan pameran. -Jaringan kerjasama antar Daerah, bahkan sampai ke tingkat Internasional. -Fasilitas Bintek baik ketenagakerjaan ataupun kewirausahaan. -Fasilitas dukungan HaKI <p>8. --</p>	<p>PTSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riil time menggunakan aplikasi yang terintegrasi. <p>3. Profil kelurahan terintegrasi dan riil time dalam satu data daerah dengan menggunakan pendekatan ruang (GIS)</p> <p>4. Data TTG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadi bagian dari Satu Data Terpadu Daerah. - Data TTG terverifikasi untuk memastikan original temuan / bukan plagiat. <p>5. KIM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - berkembang di setiap kecamatan. - menjadi salah satu media penguatan ekonomi kreatif. <p>6. Komunitas kreatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - berkembang sesuai potensi unggulan Daerah. - terdapat agenda rutin tahunan untuk menggelar hasil produksi komunitas kreatif <p>7. Fasilitas Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dalam pengurusan (kepastian Regulasi dan SOP). - Fasilitasi keikutsertaan pameran. - Jaringan kerjasama antar Daerah, bahkan sampai ke tingkat Internasional - Fasilitas Bintek baik ketenagakerjaan ataupun kewirausahaan - Fasilitas dukungan HaKI.
	Website/ portal daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. www.pekalongankota.go.id 2. Ada di DINKOMINFO 3. (0285) 421093 atau melalui email :sekda@pekalongankota.go.id www.pekalongankota.go.id 	<ol style="list-style-type: none"> 1. www.pekalongankota.go.id 2. Ada di DINKOMINFO 3. (0285) 421093 atau melalui email : sekda@pekalongankota.go.id www.pekalongankota.go.id
	Dokumen RPJPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun RPJPD. 2. Penyusunan NA 3. Perda RPJPD memuat konsep Sistem Inovasi, antara lain : 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim Penyusun RPJPD pada tahun 2024. 2. Penyusunan NA pada tahun 2025.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<ul style="list-style-type: none"> - Isu Strategis : Pengembangan daya saing ekonomi berdasarkan pengetahuan dan kreatifitas sebagai faktor inovasi (knowledge based society). - Misi kelima : Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas dalam Misi kelima ini memiliki arti bahwa Perwujudan Kota Mandiri juga menekankan pada pengembangan inovasi dan kreasi dari sumber daya manusia dan lembaga sehingga senantiasa mampu untuk menyediakan dan memenuhi segenap kebutuhan hidup dan kehidupan secara layak tanpa harus tergantung pada pihak luar. Makna ini akan mendukung pencapaian Visi Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera. <p>4. Pemkot menyelenggarakan Konsultasi Publik, Pembahasan di DPRD, dan juga evaluasi Gubernur. RPJPD sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.</p>	<p>3. Perda memuat rekomendasi kelanjutan masterplan SIDA.</p> <p>4. Penyelenggaraan konsultasi publik pada tahun 2025. Penetapan RPJPD pada tahun 2025.</p>
	Dokumen RPJMD	<p>1. Pembentukan tim penyusun RPJMD.</p> <p>2. Penyusunan Naskah Akademik pada tahun 2025.</p> <p>3. RPJMD memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambaran kondisi SIDA yang meliputi : Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah, Fokus Iklim Investasi, dan Fokus Sumber Daya Manusia - Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas, dengan Strategi Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi kreativitas, serta Arah Kebijakan Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh 	<p>1. Pembentukan tim penyusun RPJMD pada tahun 2024,</p> <p>2. Penyusunan Naskah Akademik pada tahun 2025.</p> <p>3. Roadmap SIDA ini terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2026-2030.</p> <p>4. Penyelenggaraan konsultasi publik pada tahun 2025. Penetapan Perda RPJMD pada tahun 2025.</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<p>Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan IPTEK.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi masih tersebar di beberapa PD terkait dan pelayanannya masih manual. -Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat. -Jumlah SDM yang memegang jabatan fungsional tertentu di lembaga iptekin/ litbangyasa milik pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas. -Alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah pada masih relative kecil. -Munculnya permasalahan kelembagaan dari organisasi bersama antar Daerah, khususnya dalam hal sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan. <p>Basis data klaster industri, regulasi terkait klaster industri, insentif untuk pengembangan klster industri maupun infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan) hingga kini belum dikembangkan.</p> <p>4.Penyelenggaraan konsultasi publik Penyusunan RPJMD Konsultasi Publik, 5.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ttg RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.</p>	
	Dokumen Roadmap SIDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun Roadmap SIDA dengan SK Walikota nomor : 071.05/725 Tahun 2020. 2. Pemetaan potensi dan kondisi SIDA dalam Bab II Roadmap. 3. Tersusunnya Roadmap SIDA pada tahun 2020. <p>Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun Roadmap SIDA pada tahun 2024. 2. Monitoring dan Evaluasi SIDA setiap tahun. 3. Pemetaan potensi dan kondisi pada tahun 2024. 4. Tersusunnya Roadmap SIDA pada tahun 2024. 5. Penyusunan Perwal tentang roadmap SIDA tahun 2021-2025 pada tahun 2021 <p>Penyusunan Perwal tentang roadmap SIDA tahun 2026-2030 pada tahun 2025.</p>
	Regulasi insentif bisnis (SK/perda/perwal /perbup insentif)	Kota Pekalongan sudah menerbitkan perwal No. 95 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal (dokumen dapat didownload di: https://s.id/sida-dpmpstsp)	Pembentukan Peraturan Walikota tentang Perubahan perwal No. 95 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
	Keberadaan Ruang Kreatif	<p>1. Taman lapangan Mataram Terdapat bangunan Pendopo Terdapat bangunan toilet umum Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam hari Adanya tim kebersihan taman kota Adanya kegiatan acara formal dan informal diarea lapangan setiap tahun oleh pihak pemerintah maupun komunitas sekitar Terdapat area fasilitas olah raga public Terdapat area tempat duduk atau area berkumpul</p> <p>2. Taman Monumen Juang Terdapat bangunan Toilet Umum Terdapat bangunan tugu symbol pahlawan kota pekalongan Adanya kegiatan acara formal atau informal diarea lapang taman monumen yaitu upacara dan kegiatan komunitas sekitar dengan waktu yang tidak tertentu Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam Adanya tim kebersihan taman</p> <p>3. Taman Jetayu Terdapat bangunan Toilet Umum Terdapat bangunan signed kota Area jogging Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam hari Adanya tim kebersihan</p> <p>4. Taman Nursery Terdapat bangunan Toilet Umum Terdapat area Parkir Terdapat area bangunan edukasi taman Terdapat area peribadatan Terdapat area bermain anak Adanya kegiatan acara edukasi oleh masyarakat sekitar dan komunitas Adanya pengamanan taman diwaktu malam dan siang hari Adanya tim kebersihan taman Adanya area olah raga (jogging trade) Adanya ruang berkumpul (kursi taman)</p> <p>5. Taman Wilis Area jogging Adanya pengamanan taman diwaktu siang dan malam hari Adanya tim kebersihan Adanya area bermain anak</p>	<p>1. Terbangunnya ruang publik kreatif dengan tema sesuai potensi unggulan.</p> <p>2. Pembentukan pengelola sesuai komunitas kreatif.</p> <p>3. Pembuatan Peraturan Walikota tentang Ruang Publik Kreatif. Pameran produk kreatif di ruang publik kreatif setiap bulan.</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<p>Adanya kegiatan acara oleh komunitas sekitar</p> <p>6. Taman Lapangan Tirto Area jogging Adanya tim kebersihan Adanya pengamanan taman di waktu siang dan malam hari</p> <p>Adanya kegiatan acara oleh komunitas sekitar/penduduk</p> <p>Adanya area parkir kendaraan</p> <p>7. Taman Lapangan Alun-alun Area jogging Adanya bangunan toilet umum Area terbuka atau bangunan gapura Adanya tim kebersihan Adanya pengamanan taman di waktu siang dan malam hari Adanya ruang berkumpul (kursi Taman) Adanya kegiatan komunitas.</p>	
	Kelembagaan penguatan SIDA (Tim Koordinasi Penguatan SIDA)	1. Ada Tim koordinasi ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 071.05/725 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2025	<p>1. Pembentukan Perwal tentang kelembagaan Penguatan SIDA.</p> <p>2. Rapat rutin lembaga penguatan SIDA setiap triwulan.</p> <p>3. Workshop dengan mengundang narasumber nasional. Benchmark ke Daerah lain yang sudah maju.</p>
	Rasio anggaran Litbangjirap/Iptekin terhadap anggaran belanja daerah (APBD)	<p>Jumlah APBD : 1.055.857.482.000,-</p> <p>Jumlah anggaran Kelitbangan : 1.575.384.000,-</p> <p>Rasio : 0,15 %</p>	Penyediaan anggaran Iptekin \pm 0,2 % dari APBD.
	Waktu Pelayanan Perijinan	Waktu pelayanan perizinan sudah tertuang di SOP dan Standar Pelayanan. Waktu pelayanan perizinan berbeda-beda sesuai dengan NSPK masing-masing perizinan. (dokumen dapat didownload di: https://s.id/sida-dpmpstsp)	<p>1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SOP dan SP setiap tahun.</p> <p>Perubahan SOP dan Standar Pelayanan sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan.</p>
	Mall pelayanan publik	Sejak Juni 2018 SPIPISE sudah diganti dengan OSS (Online Single Submission)	1. Penyelenggaraan OSS. Terbangunnya mall pelayanan publik.
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (Iptekin)/atau penelitian pengembangan dan perekayasaan (Litbangjirap) serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, Khususnya UMKM	Jumlah perguruan tinggi	<p>1. IAIN Pekalongan</p> <p>2. UNIKAL</p> <p>3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan)</p> <p>4. STMIK Widya Pratama</p> <p>5. POLTEKKES Prodi Keperawatan Akbid Harapan Ibu</p>	<p>1. IAIN Pekalongan</p> <p>2. UNIKAL</p> <p>3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan)</p> <p>4. STMIK Widya Pratama</p> <p>5. POLTEKKES Prodi Keperawatan</p> <p>6. Akbid Harapan Ibu</p> <p>Pembukaan Program studi baru Teknik Elektro.</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
	Jumlah lembaga penelitian di luar universitas	1. LSM Pattiro 2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisiyyah (LPPA) PD Aisiyyah Lembaga Penelitian dan Pengembangan PDM Kota Pekalongan	1. Bertambahnya lembaga penelitian menjadi 5 institusi. Meningkatkan aktivitas kelitbangan di Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.
	Jumlah SMK	1. SMK N 1 2. SMK N 2 3. SMK N 3 4. SMK Syafi'i Akrom 5. SMK Perikanan Irma 6. SMK Muhammadiyah	1. SMK N 1 2. SMK N 2 3. SMK N 3 4. SMK Syafi'i Akrom 5. SMK Perikanan Irma 6. SMK Muhammadiyah
	Rasio pejabat fungsional Iptekin	1. IAIN Pekalongan (119 orang) 2. UNIKAL (115 orang) 3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan) (37 orang) 4. STMIK Widya Pratama (25 orang) 5. POLTEKKES Prodi Keperawatan (10 orang). 6. Akbid Harapan Ibu (16 orang) 7. BAPPEDA (2 orang) Jumlah = 324 orang.	1. IAIN Pekalongan (119 orang) 2. UNIKAL (115 orang) 3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan) (37 orang) 4. STMIK Widya Pratama (25 orang) 5. POLTEKKES Prodi Keperawatan (10 orang). 6. Akbid Harapan Ibu (16 orang) 7. BAPPEDA (2 orang) 8. Program studi baru Teknik Elektro. Jumlah = 340 orang.
	Kualitas perguruan tinggi terbaik di kabupaten/kota	Sebutkan PT dengan klaster paling tinggi 1. UNIKAL : - Urutan : 207 - Klaster : 4 - Urutan pada klaster : 61 - Jumlah PT pada klaster 4 ; 400 2. IAIN Pekalongan - Urutan : -- - Klaster : -- - Urutan pada klaster : -- - Jumlah PT pada klaster 4 ; -- 3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan) - Urutan : -- - Klaster : -- - Urutan pada klaster : -- - Jumlah PT pada klaster 4 ; -- 4. STMIK Widya Pratama - Urutan : 681 - Klaster : 5 - Urutan pada klaster : 135 - Jumlah PT pada klaster 4 ; 1.590 5. POLTEKKES Prodi Keperawatan (10 orang). - Urutan : -- - Klaster : --	Sebutkan PT dengan klaster paling tinggi 1. UNIKAL : - Urutan : 150 - Klaster : 4 - Urutan pada klaster : 40 - Jumlah PT pada klaster 4 ; 400 2. IAIN Pekalongan - Urutan : 175 - Klaster : 4 - Urutan pada klaster : 60 - Jumlah PT pada klaster 4 ; 400 3. UMPP (Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan) - Urutan : 800 - Klaster : 5 - Urutan pada klaster : 150 - Jumlah PT pada klaster 5 ; 1.590 4. STMIK Widya Pratama - Urutan : 681 - Klaster : 5 - Urutan pada klaster : 135

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<ul style="list-style-type: none"> - Urutan pada klaster : -- - Jumlah PT pada klaster 4 ; -- 6. Akbid Harapan Ibu (16 orang) - Urutan : -- - Klaster : -- - Urutan pada klaster : -- - Jumlah PT pada klaster 4 ; -- 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PT pada klaster 5 ; 1.590 5. POLTEKKES Prodi Keperawatan (10 orang). - Urutan : 775 - Klaster : 5 - Urutan pada klaster : 145 - Jumlah PT pada klaster 5 ; 1.590 6. Akbid Harapan Ibu (16 orang) - Urutan : 1.000 - Klaster : 5 - Urutan pada klaster : 250 Jumlah PT pada klaster 5 ; 1.590
	Rasio lulusan universitas terhadap penduduk usia kerja	<p>Jumlah penduduk (usia 15 th <) lulusan PT : 14.958 jiwa Jumlah penduduk usia kerja (usia 15 th <) : 215.710 jiwa Rasio: 6,93 %</p>	<p>Jumlah penduduk (usia 15 th <) lulusan PT : 15.200 jiwa Jumlah penduduk usia kerja (usia 15 th <) : 216.250 jiwa Rasio: 7,03 %</p>
	Rasio guru SLA lulusan S1 terhadap guru SLA		--
	Rasio guru SLA terhadap siswa	<p>Jumlah guru SLA: 1.015 Jumlah siswa: 15.017 Rasio : 6,76 %</p>	<p>Jumlah guru SLA: 1.100 Jumlah siswa: 15.100 Rasio : 7,28 %</p>
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data IPM per tahun 2018, yaitu 74,24	
Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/ Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	Jumlah dan skala kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Lokal : <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama Museum Batik dengan Dunia Pendidikan dalam pelestarian batik. - Kerja sama dengan Kadin Kota Pekalongan tentang Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pendampingan calon Wirausaha baru/ wirausaha baru dan UMKM pelaku usaha export/calon pelaku usaha export. 2. Tingkat Regional : <ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah . - Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang tentang Identifikasi Batas Wilayah. - Kesepakatan Bersama dengan Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, - Kesepakatan Bersama dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Lokal : 6 kerja sama 2. Tingkat Regional : 10 kerja sama 3. Tingkat Nasional : 10 kerja sama. Tingkat Internasional ; 2 kerja sama.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<p>Walikota Semarang tentang implementasi Aplikasi Smart City</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan Bersama dengan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah. <p>3. Tingkat Nasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan Bersama dengan Kota Bengkulu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Religius. <p>4. Tingkat Nasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan Balai Besar Diklat Ekspor Indonesia Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Display Produk Pameran untuk Ekspor; - Penyelenggaraan Pelatihan Kalkulasi Harga Ekspor; dan Penyelenggaraan Pelatihan Strategi Pemasaran Tahun Anggaran 2018 - Kerja sama dengan LIPI tentang Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil IPTEK - Kerja sama dengan BPPT RI tentang Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi baru; Pemanfaatan dan penerapan teknologi yang telah ada; Pendidikan, pelatihan dan pendampingan; serta Pemanfaatan sarana prasarana dan SDM <p>5. Tingkat Internasional : Jejaring Kota Kreatif Dunia UNESCO.</p>	
Mendorong Budaya Inovasi	Kondisi muatan pelajaran kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pembelajaran kewirausahaan di dalam kurikulum SMK telah diakomodir ke dalam mata pelajaran kompetensi keahlian dan penambahan jam pelajaran yang signifikan 2. Pada tahun ajaran 2004/2005 SMK Muhammadiyah membuka kelas unggulan (kelas model) kewirausahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pembelajaran kewirausahaan di dalam kurikulum SMK telah diakomodir ke dalam mata pelajaran kompetensi keahlian dan penambahan jam pelajaran yang signifikan. 2. Pada tahun ajaran 2004/2005 SMK Muhammadiyah membuka kelas unggulan (kelas model) kewirausahaan. Penguatan kerja sama

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
			praktik industri dengan prioritas pada pengembangan kewirausahaan peserta didik.
	Program pelatihan dan pendampingan (pengembangan kualitas SDM)	1. Laporan Proyek Perubahan Kepemimpinan Administrator (PKA) 2. Aplikasi Manajemen Learning Sistem (LMS) Pemerintah Kota Pekalongan Akses : Lms.pekalongankota.go.id	1. Penguatan dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKA). 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). 3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Laporan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS sesuai dengan visi misi Walikota Pekalongan
	Jumlah kegiatan apresiasi dan kampanye inovasi/tahun	1. Penghargaan KemenpanRB untuk RSUD Bendan dan DPMPTSP Kota Pekalongan 2. Penghargaan Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Komunikasi Nasional (APIKNAS) untuk Inovasi Kapal Paralon	1. Penghargaan dari KemenpanRB. 2. Penghargaan Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Komunikasi Nasional (APIKNAS). Apresiasi IPTEKIN pada peringatan HAKTEKNAS di Kota Pekalongan.
	Jumlah Apresiasi Inovasi yang diselenggarakan oleh daerah	1. Pemberian anugerah kreativitas dan inovasi (krenova) 2. Diseminasi hasil penelitian	1. Pemberian anugerah kreativitas dan inovasi (krenova) 2. Diseminasi hasil penelitian Pemilihan peserta terbaik pameran inovasi.
Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	Kerjasama antar pusat daerah tentang IPTEKIN	1. Kerja sama dengan LIPI tentang Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil IPTEK. 2. Kerja sama dengan BPPT RI tentang Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi baru; Pemanfaatan dan penerapan teknologi yang telah ada; Pendidikan, pelatihan dan pendampingan; serta Pemanfaatan sarana prasarana dan SDM	1. Kerja sama dengan LIPI 2. Kerja sama dengan BPPT RI. 3. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri. Kerja sama dengan Bekraf.
Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	Jumlah program lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan antara lain meliputi : - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan antara lain meliputi : - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<p>persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kebersihan Kota - Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah - Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan - Koordinasi dan pembinaan TPS 3R - Pembangunan sarana prasarana TPA <p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan kegiatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan kualitas lingkungan - Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Koordinasi pengelolaan Prokasih/Super-kasih - Pengelolaan laboratorium lingkungan <p>Pengelolaan IPAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Peningkatan Kebersihan Kota - Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah - Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan - Koordinasi dan pembinaan TPS 3R - Pembangunan sarana prasarana TPA <p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan kegiatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan kualitas lingkungan - Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih - Pengelolaan laboratorium lingkungan <p>Pengelolaan IPAL</p>
	Sertifikasi ISO 14001	--	5 Penerima sertifikasi ISO 14001 (1 RSUD Bendan, 4 PUSKESMAS setiap Kecamatan).
	Keikutsertaan dalam forum international tentang lingkungan	Seminar <u>International “Sustainable Water Management” Kamis 25 April 2019, Pekalongan, Jawa Tengah</u>	1. Seminar internasional tentang pengelolaan limbah Seminar internasional tentang penurunan tanah.
	Penggunaan energi alternatif	Penggunaan Biogas di kampung mandiri energi Kelurahan Soko Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan.	1. Penguatan pemanfaatan biogas di Kelurahan Soko Duwet. Pemanfaatan listrik tenaga surya untuk PJU.
	sertifikasi ISO 9001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dindikpora 2. Dinarpus 3. Dindukcapil 4. DPMPSTP 5. Inspektorat 6. DLH 7. Bappeda 8. BKD (Badan Keuangan Daerah) 9. 14 PUSKESMAS 10. RSUD Bendan. 	Jumlah OPD yang memperoleh ISO 9001 : 27 OPD.
	Aktivitas pelayanan HaKI yang diselenggarakan	Pelayanan HaKI sudah ada pada saat masih di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Dan sekarang masih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Pelatihan 3. Konsultasi <p>Fasilitasi dalam perolehan</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
	oleh pemerintah daerah	terus dilanjutkan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Nomenklatur OPD yang baru). HaKI atas merek sudah dimiliki oleh banyak perusahaan di Kota Pekalongan.	HaKI
	Jumlah paten resmi daerah (indikasi geografis)	Sekarang ini Pemerintah Kota Pekalongan masih memproses pengusulan Sarung Batik dalam kegiatan Indikasi Geografis.	Pengakuan IG : Sarung Batik.
	Regulasi standarisasi Upah UMK/UMR	Regulasi standarisasi UMK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah setiap tahun. Sebagai contoh UMK Kota Pekalongan Tahun 2020 ditetapkan dengan Nomor 560/58 Tahun 2019. SK Gubernur tersebut mengatur UMK Kab/Kota se Jawa Tengah. Tim perancang di Kota Pekalongan berkedudukan sebagai pengusul.	1. Penguatan lembaga Tri Partit untuk merumuskan usulan UMK ke Gubernur. Penyampaian usulan kenaikan UMK setiap tahun.
	Jumlah ASN wanita dengan jenjang pendidikan minimal S1	Data SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) keadaan 9 November 2020	Jumlah ASN wanita berpendidikan S1: 800 Jumlah ASN wanita: 1600 Jumlah ASN seluruhnya: 2.978

4.2. Pilar Kluster Industri (KKI 1-6)

Tabel 4.2. Kondisi SIDA yang ingin dicapai pada Pilar Kluster Industri

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis	1. Ketersediaan basis data pengembangan kluster industri	Sudah tersedia basis data terkait pengembangan kluster seperti jumlah kluster industri, jumlah pengusaha/ aktor lain yang termasuk dalam kluster, jumlah tenaga kerja yang terlibat, data nilai produksi tiap kluster, dan persebaran wilayah kluster.	Basis Data pengembangan kluster industri kreatif tersebut ditempatkan secara terintegrasi di satu website resmi daerah, dan mudah diakses secara online oleh publik. Website dapat menampilkan data dalam bentuk infografis yang menarik dan interaktif. Serta terkoneksi dengan website Marketplace Digital industri kreatif.
	2. PUD (Produk Unggulan Daerah)	Pemilihan PUD sudah memenuhi kriteria dalam Permendagri No. 9/2014. Sudah ada OPD yang berwenang menangani PUD sesuai tupoksi, Perencanaan PUD jangka panjang sudah masuk ke dalam RPJPD, Perencanaan PUD jangka menengah sudah masuk ke dalam RPJMD.	Sudah dilakukan Pembaharuan SK Walikota Pekalongan mengenai Produk Unggulan Daerah. Sudah dilakukan penetapan 1 Program Kolaborasi bertema Ekraf yaitu Kriya Batik dan Kuliner Olahan Ikan, untuk mensinergikan pelaksanaan program dari masing-masing OPD yang terkait.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
	3. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kota (RPIK)	RPIK sudah disusun berdasarkan kriteria pada Permenperin No.110 Tahun 2015. Dokumen RPIK sudah mengacu pada Hasil Kajian pengembangan industri daerah dengan mengintegrasikan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota dalam dokumen RPIK. Dokumen RPIK akan ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020.	Sudah ditetapkan Perda RPIK, dan sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
	4. Keberadaan sarana informasi daring unggulan daerah	Sudah ada sarana informasi daring (website dan media sosial) dan marketplace digital untuk pemasaran produk Ekraf. Informasi dan promosi produk Ekraf terdapat pada website Brayon Market, namun baru diisi oleh 5 produk UMKM batik. Layanan pendampingan, pelatihan pemasaran, klinik konsultasi online dilakukan melalui Cyber UMKM (Blogspot, Instagram, Facebook, Twitter, Grup Telegram) Marketplace Digital memanfaatkan Lokapasar Batik yang baru diluncurkan oleh Walikota pada 17 November 2020. Lokapasar Batik memiliki fitur marketplace yang bisa memungkinkan pengunjung untuk bertransaksi langsung seperti halnya toko online Shopee. Namun penjualnya masih terbatas pada pelaku usaha di Pasar Setono. Secara teknis Lokapasar memanfaatkan Fitur atau teknologi IT yang disediakan oleh layanan WhatsApp Business, sehingga belum ditampilkan dalam satu website khusus.	Sudah ada website pemasaran digital yang mengintegrasikan marketplace digital dan Layanan Cyber UMKM. Website sudah dikelola oleh tenaga profesional, tidak tergantung Pemda. Website didesain secara interaktif dan memudahkan pembelian langsung di website (layanan e-commerce). Terdapat setidaknya 50 UMKM batik yang memanfaatkan website pemasaran digital dan telah diberikan pelatihan pemasaran digital.
	5. Keberadaan Pokja pelaku klaster	Pokja yang mewadahi pelaku klaster sudah terbentuk, dan sudah disahkan dalam bentuk SK. Ada 3 Pokja yang aktif bergerak di bidang pengembangan industri kreatif khususnya kriya batik yaitu : 1. Paguyuban Batik Pesindon 2. Paguyuban Batik Kauman 3. Paguyuban Canting Landungsari Aktivitas Pokja juga sudah berjalan dengan efektif dengan adanya rencana kerja dan pelaksanaan rapat yang terjadwal.	Data Pokja Klaster ekonomi kreatif (SK Pokja, anggota, aktivitas pertemuan Pokja), ditampilkan di satu website yang terintegrasi dengan basis data pengembangan klaster industri, sehingga mudah diakses oleh publik.
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (Iptekin)/atau	6. Jumlah Universitas dan lembaga penelitian yang terlibat dalam pengembangan	Ada 6 Universitas dan lembaga penelitian yang terlibat yang terlibat dalam pengembangan klaster industri. Universitas dan lembaga penelitian tersebut adalah Universitas	Bisa menjangkau lembaga yang lebih luas, baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Untuk menjangkau lembaga

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri	klaster industri daerah	Trisakti, UI, Balai besar pendidikan dan pelatihan ekspor Indonesia, DRD, LPPM Unikal dan LSP BATIK.	lain secara lebih luas maka data mengenai bentuk keterlibatan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian dalam pengembangan klaster ekraf ditampilkan di satu website yang terintegrasi, sebagai acuan bagi PT dan lembaga penelitian lain untuk berperan dalam memperkuat rantai nilai klaster ekraf.
	7. Jumlah komunitas/asosiasi bisnis yang terkait dengan pengembangan klaster industri daerah	Ada 4 komunitas/asosiasi bisnis yang terkait dengan pengembangan klaster industri daerah. Komunitas/asosiasi bisnis yang dimaksud adalah PCCF, FEDEP, KADIN, dan Dekopinda.	Data komunitas/asosiasi bisnis yang terkait ekonomi kreatif tersebut terintegrasi di satu website, dapat diakses oleh publik. Website menampilkan kegiatan/peran serta komunitas dalam pengembangan ekraf. Misalnya : PCCF : inisiasi diskusi terkait ketersediaan bahan baku. Tujuannya agar masyarakat dan komunitas/asosiasi bisnis lainnya dapat berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan yang ada pada rantai nilai klaster ekraf.
	8. Rasio SDM pokja klaster dengan tingkat pendidikan minimal S1		
Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	9. Kerjasama antara klaster industri dengan universitas dan Lembaga Litbangjirap	Terdapat 1 Kerjasama Nasional dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI) Kemendag RI	Terwujudnya Kemandirian UMKM Batik untuk menjual produk di pasaran ekspor, melalui pelatihan ekspor dan pembukaan akses pemasaran ekspor melalui kerja sama dengan Free Trade Agreement (FTA) Kemendag. Terwujudnya Kerja sama dengan Kemenperin untuk pembangunan Material Center Bahan Baku Batik
	10. Jumlah kegiatan yang diadakan sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis di klaster industri daerah dalam setahun	Terdapat setidaknya 9 event kegiatan sarana interaksi antar pelaku bisnis di industri kreatif, yaitu : 1. Pameran Harkopnas 2. TEI (Trade Expo Indonesia) 3. Pameran HUT Jateng di TMII 4. Pameran Apeksi 5. Pameran ke daerah lain 6. Pameran dan Bisnis meeting	Diharapkan bisa mengikuti pameran lebih sering supaya Produk unggulan Kota Pekalongan dapat dikenal di Indonesia/ Luar Negeri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<p>pada Pekan batik, hari jadi, pekan inovasi,</p> <p>7. Pameran KIP (Keterbukaan Informasi Publik)</p> <p>8. Pameran Produk olahan ikan di tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh DKP Provinsi Jateng</p> <p>9. Pameran Produk olahan ikan yang diadakan Pemkot</p>	<p>Kegiatan pameran dan temu bisnis didokumentasikan dalam website yang terintegrasi, dengan menampilkan testimoni kualitas batik dari pelaku usaha yang terlibat dalam rantai nilai industri batik, atau pengunjung dan pembeli produk batik saat event pameran.</p> <p>Serta menampilkan informasi mengenai kerja sama bisnis yang berhasil diperluas dalam setiap event pameran atau temu bisnis.</p>
<p>Mendorong Budaya Inovasi</p>	<p>11. Jumlah pertemuan pokja klaster per tahun</p>	<p>Pertemuan Pokja Klaster yang diinisiasi oleh OPD terkait yaitu Dinperinaker sebanyak 25 kali tatap muka yang terdiri dari 15 kali kegiatan pembinaan dan 10 kali pertemuan rutin, DindagkopUKM menginisiasi sebanyak 5 kali Pertemuan. Sedangkan untuk Technopark Perikanan Pekalongan menginisiasi sebanyak 12 kali pertemuan.</p>	<p>Pertemuan Pokja Klaster dapat mempersiapkan agar produk-produk dari Kota Pekalongan dapat dipasarkan ke luar daerah. Dan lebih banyak mengikuti pameran/ bazaar.</p> <p>5 kali pertemuan per tahun untuk pengembangan kerja sama bisnis penyediaan bahan baku batik antara UKM pemasok bahan baku, UKM logistik, dan UKM pengrajin batik, dan pemanfaatan Material Center bahan baku batik. 5 kali pertemuan per tahun untuk mendiskusikan pemasaran lewat marketplace digital.</p>
	<p>12. Jumlah program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha dalam rangka pengembangan kualitas SDM dalam jangka waktu 1 tahun.</p>	<p>Ada 2 Program dari Dinperinaker yaitu :</p> <p>1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.</p> <p>2. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri</p> <p>Dan ada 1 Program di Technopark yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p>	<p>UMKM potensi ekspor dapat melaksanakan ekspor secara mandiri. Lebih banyak menjaring masyarakat yang berminat dalam usaha kuliner perikanan.</p> <p>Untuk mencapai kondisi tersebut maka didukung pelaksanaan 5 event Pelatihan per tahun beserta Pendampingan lewat Layanan Cyber UMKM untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemanfaatan Website Khusus Pemasaran Produk Ekraf Kota Pekalongan. ❖ Pembuatan konten foto dan video untuk promosi produk batik. ❖ Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi pembelian bahan baku batik di Material Center untuk UMKM peserta.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
	13. Jumlah klaster industri	Ada 37 Sentra Klaster	Data jumlah klaster ditampilkan di satu website, sehingga mudah diakses oleh publik. Untuk memberikan informasi peluang bisnis bagi para pelaku usaha, sehingga dapat menyediakan sumber daya yang tepat untuk rantai nilai klaster.
Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	14. Koordinasi program klaster dengan pemerintah daerah dan pusat	RPIK sudah selaras dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra/RPJMD), RPIK sudah mengacu pada RPIP dan RIPIN. Program klaster terkait penyediaan bahan baku batik, sudah memiliki dasar hukum Perda Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Ketersediaan Bahan Baku Batik.	Terlaksananya 1 event Sosialisasi Perda RPIK Ada Perwal mengenai teknis pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 untuk mengatasi kendala penyediaan bahan baku, dan mendefinisikan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksinya. Terlaksananya pembangunan 1 Material Center untuk Bahan Baku Batik, bekerjasama dengan Kemenperin.
Penyelarasan Dengan Perkembangan Global	15. Program lingkungan bagi klaster industri daerah	IPAL Komunal sudah ada yaitu IPAL Banyurip, IPAL Kauman, IPAL Jenggot, IPAL Pabean, IPAL di kawasan Technopark sudah ada. Keberadaan IPAL juga didukung dengan adanya program penyuluhan/ sosialisasi dan pelatihan konsep ramah lingkungan. Namun IPAL yang sudah ada ternyata belum cukup untuk mengatasi permasalahan limbah batik. Di sisi lain pemda tidak dapat menarik pajak dari juragan batik, sehingga mengalami kesulitan anggaran untuk meningkatkan kinerja penanganan limbah. Diperlukan sebuah indikator yang menunjukkan capaian pelaksanaan sebuah skema program lingkungan yang sekaligus mempertahankan kontribusi ekonomi batik bagi masyarakat. Terkait pemenuhan standar global melalui penataan lingkungan, Kota Pekalongan sudah melakukan penataan Kampung Wisata Batik, antara lain Kampung Wisata Batik Pesindon, dan Kampung Wisata Batik Kauman. Penataan juga dilakukan di Kampung Canting Landungsari, dan Pasar Batik Setono serta Pasar Banjarsari.	Tercapainya solusi penanganan limbah melalui 3 kali pertemuan per tahun antara pemda, pengusaha batik, akademisi, dan masyarakat, untuk memberikan masukan dan mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan. Seluruh lokasi sentra klaster batik (10 lokasi), 1 lokasi Kampung Canting Landungsari, dan 2 lokasi pasar batik di Kota Pekalongan sudah menerapkan Program Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman). 1 Website terintegrasi dan media sosial yang menampilkan : ❖ Potensi Kampung Wisata Batik yang sudah tertata dengan baik beserta aktivitasnya, sehingga menarik minat pengunjung untuk membeli batik dan merasakan pengalaman membuat. ❖ Produksi batik yang ramah lingkungan dengan adanya IPAL. ❖ Kampung Wisata yang

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi Yang Ingin Dicapai (2025)
		<p>Untuk standar global penarapan adaptasi kebiasaan baru di era pandemi sudah ada 2 lokasi wisata batik di Kota Pekalongan yang menerapkan Program Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) yaitu Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Wisata Batik Kauman.</p> <p>Namun saat ini belum ada sarana informasi (website dan media sosial) yang menampilkan capaian Kota Pekalongan dalam memenuhi standar lingkungan, sebagai nilai tambah bagi produk batik untuk dapat bersaing di pasar global.</p>	<p>sudah menerapkan Program Gerakan BISA, untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan pelaku usaha dan pengunjung.</p>
	16. Program standarisasi produk klaster	<p>Sudah ada Inisiasi dari Pokja untuk menerapkan standarisasi produk klaster, dan ada dukungan dari OPD terkait untuk melaksanakan standarisasi produk.</p> <p>Program yang ditujukan untuk menangani standarisasi adalah Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri dengan kegiatan Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur, kegiatan Penerapan Standarisasi Halal, dan Penerapan Standar PIRT.</p> <p>Belum ada program yang spesifik dalam membantu memenuhi Standar SNI Batik.</p> <p>Saat ini standar yang dipenuhi adalah SKKNI, dengan memberikan pendampingan dan tes kompetensi setiap tahun yang sudah diselenggarakan sebanyak 41 kali pada tahun 2020 ini.</p> <p>Sudah ada kegiatan penerapan Standarisasi Halal, dan penerapan standar PIRT.</p> <p>Ada UMKM pengolahan hasil perikanan yang sudah mempunyai sertifikasi halal yaitu : Hars Food</p>	<p>Seluruh SDM pengrajin batik sudah tersertifikasi SKKNI pada 5 kategori kompetensi.</p> <p>Sertifikasi diperoleh melalui Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi.</p> <p>Peningkatan jumlah Pelaku usaha kuliner olahan ikan sudah memenuhi standar Halal dan memenuhi standar SPP-IRT.</p> <p>Pelaku usaha kuliner olahan ikan dapat mempromosikan produk atau layanan yang sudah berstandar halal dan memperoleh SPP-IRT, untuk meningkatkan nilai tambah produk, misalnya melalui poster/brosur, dan media sosial.</p>

4.3. Pilar Jaringan Inovasi (KKI 1-6)

Tabel 4.3. Kondisi SIDA yang ingin dicapai pada Pilar Jaringan Inovasi

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
Mengembangkan Kerangka Umum Bagi Inovasi dan Bisnis	Ketersediaan data terkait dengan keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan	<p>Technopark</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Data Fasilitas (sarana prasarana) 2. Ada data layanan 3. Ada data pengguna 4. Ada data kerjasama 	<p>Technopark</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data fasilitas : pembangunan jalan dan saluran drainase didalam kawasan, penataan halaman, tempat parkir; pagar

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
			<p>keliling kawasan; fasilitas riset berbasis iptek.</p> <p>2. Data layanan : Layanan Inkubasi, layanan kemitraan, peningkatan SDM dan Tenant, layanan informasi yang lebih lengkap untuk para pengusaha pemula dibidang perikanan.</p> <p>3. Data Pengguna : Pembaharuan data pengguna sarpras yang meliputi profil dan kemajuan usaha (produksi) dapat ditampilkan secara digital berbasis web.</p> <p>4. Data Kerjasama: menjalin dan menjaga hubungan (kerjasama) dengan mitra yang sudah ada serta terus mencari peluang kerjasama dengan mitra baru (baik sebagai inkubator, inventor dan pengguna)</p>
		<p>Museum Batik:</p> <p>1. Ada Data Fasilitas (sarana prasarana)</p> <p>2. Ada data layanan</p> <p>3. Ada data pengguna</p> <p>4. Ada data kerjasama</p>	<p>Museum Batik:</p> <p>1. Sarana dan Prasarana</p> <p>2. Tiga ruang pameran yang representatif</p> <p>3. Ruang Audio Visual yang memadai</p> <p>4. Workshop Batik yang representatif</p> <p>5. Perputakaan yang lengkap</p> <p>6. Ruang Data</p> <p>7. Ruang Simpan dan Konservasi</p> <p>8. Aula</p> <p>9. Kedai</p> <p>10. WIFI</p>
		<p>Telecenter:</p> <p>- Data fasilitas /sarana prasarana ada di RT /RW.</p> <p>- Data layanan, data pengguna dan kerjasama tidak ada</p>	<p>Telecenter:</p> <p>-</p>
		<p>Pusat Inovasi Unikal:</p> <p>Belum ada data: fasilitas, layanan, pengguna dan kerjasama</p>	<p>Pusat Inovasi Unikal:</p> <p>Sudah ada data: fasilitas, layanan, pengguna dan kerjasama</p>
	<p>Adanya website tentang fasilitas/wahana jaringan inovasi</p>	<p>Technopark :</p> <p>5. Website TP: Technoparkperikanan.pekalongankota.go.id</p> <p>6. Pengelola website: UPTD Technopark</p> <p>7. Ada CP</p> <p>8. Website diupdate apabila ada pelaksanaan kegiatan (Temporer)</p>	<p>Technopark :</p> <p>1. Website bisa menjadi pusat informasi yang lengkap kegiatan yang ada di Technopark Perikanan (TP).</p> <p>2. Pengelola website mempunyai inovasi baru dalam membuat konten</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
			<p>informasi dan berita yang selalu up to date mengikuti perkembangan teknologi informasi agar lebih menarik dan informatif.</p> <p>3. CP aktif dan dapat di hubungi pada saat jam kerja (online) serta saat diluar jam kerja (offline) lewat e-mail</p> <p>4. Website sudah diupdate minimal seminggu</p>
		<p>Museum Batik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada website TP 2. Ada Pengelola website. 3. Ada CP yang dapat dihubungi 4. Website diupdate minimal seminggu 	<p>Museum Batik :</p> <p>-</p>
		<p>Telecenter:</p> <p>Ada website, pengelola dan CP yang dapat dihubungi</p>	<p>Telecenter:</p>
		<p>PI Unikal</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Website dalam tahap pengembangan 4. Ada pengelola dan CP 	<p>Pusat Inovasi Unikal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada website dan sudah disosialisasikan 2. Ada pengelola dan bekerja dengan target tertentu
	<p>Legalitas pembentukan kelembagaan fasilitas/wahana jaringan inovasi</p>	<p>Technopark</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Walikota: Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2019. 6. Ada Dokumen Kajian Pembentukan UPTD Technopark Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan (2019) 7. Analisa Rasio Belanja Pegawai : APBD 2020 : 499.850.000. BelanjaJasa Tenaga Pendukung Kegiatan non PNS :143.850.000 Rasio : 28,77 8. Konsultasi dengan Pimpinan yang lebih tinggi : Kepala DKP, Bappeda, Sekda, Bappeda Provinsi Jateng, BPPT 	<p>Technopark :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim kajian pembentukan kelembagaan diharapkan lebih bersinergi dalam pengembangan technopark 2. Sudah ada dokumen hasil kajian pengelolaan technopark menjadi BLUD yang dapat melayani semua kalangan masyarakat terutama bidang perikanan
		<p>Museum Batik</p> <p>Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Daerah Museum Batik pada Dinas pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pekalongan</p>	<p>Museum Batik :</p> <p>-</p>

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: -
		PI Unikal: 5. Pembentukan tim kajian kelembagaan ada, tapi belum optimal 6. Ada dokumen kajian akademis kelembagaan 7. Belum ada, analisis ratio belanja pegawai 8. Belum ada Peraturan walikota	Pusat Inovasi Unikal: 1. Pembentukan tim kajian kelembagaan ada, optimal 2. Dokumen kajian akademis kelembagaan bermanfaat 3. Diakui oleh walikota
	Dokumen rencana induk pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 1. Ada Konsultan Perencana DED Kawasan TP 2. Ada Pemetaan potensi sumber teknologi dan pengembangan kawasan 3. Ada Masterplan dan DED Pengembangan Kawasan TP	Technopark: 1. Adanya tim penyusun review rencana induk/pengembangan untuk tahun 2025-2030. 2. Semua potensi sumber teknologi dan pengembangan kawasan dapat implementatif secara maksimal bagi Technopark Perikanan dan pelaku usaha perikanan Kota Pekalongan 3. Adanya realisasi yang optimal dari dokumen rencana induk (masterplan serta DED Kawasan TP) hingga Layanan TP menjadi penyumbang/andil bagi kemajuan ekonomi Kota Pekalongan
		Museum Batik: Belum ada dokumen rencana induk	Museum Batik : Memiliki Dokumen Rencana Induk Pengembangan
		Telecenter: Belum ada dokumen rencana induk	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada dokumen rencana induk	Pusat Inovasi Unikal: Memiliki Dokumen Rencana Induk Pengembangan
	Dokumen rencana aksi/dokumen kegiatan	Technopark: 4. Belum ada Tim penyusun rencana aksi 5. Pemetaan program dan rencana. ADA (Roadmap DED Kawasan) 6. Belum ada Dokumen rencana aksi	Technopark: 1. Diharapkan Tim Penyusun Rencana Aksi sudah menghasilkan Dokumen Rencana Aksi TP 5 Tahunan 2. Adanya Dokumen hasil pemetaan program dan rencana tiap 5 (lima) tahun 3. Adanya Dokumen Rencana Aksi tiap 5 tahun
		Museum Batik: Belum ada	Museum Batik : Memiliki Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Museum Batik

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		Telecenter: Belum ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada	Pusat Inovasi Unikal: Memiliki Dokumen Rencana Aksi
	Keberadaan lembaga pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 5. Ada tim kajian pembentukan UPTD 6. Ada dokumen kajian pembentukan UPTD Technopark Perikanan DKP Kota Pekalongan tahun 2019 7. Ada Struktur organisasi Pengelola UPTD Technopark Perikanan 8. Ada Legalisasi tim pengelola :Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2019.	Technopark: Realisasi hasil kajian tentang pengembangan lembaga pengelola TP (BLUD atau UPT dengan Tim Ad Hoc Pengelola TP dari profesional)
		Museum Batik: Struktur Organisasi terlampir (Lampirannya?)	Museum Batik : -
		Telecenter: Ada struktur organisasi di RT/RW	Telecenter: -
		PI Unikal: Ada struktur organisasi dan legalisasi tim pengelola	Pusat Inovasi Unikal: -
	Jumlah SDM pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi dengan tingkat pendidikan min S1	Technopark: Jumlah SDM Pengelola Technopark Perikanan S1 : 4 Orang	Technopark: Jumlah SDM S1:..... Orang Diharapkan SDM Pengelola dan Pengembangan TP yang mempunyai pengalaman manajerial, komunikatif dan kerja sama yang baik dalam mengelola TP yang dibantu Tim Profesional di bidangnya
		Museum Batik: SDM Pengelola Museum Batik : 10 orang	Museum Batik : Jumlah SDM S1:..... Orang
		Telecenter: - Tenaga pendamping kecamatan 8 org / masing masing kecamatan 2 org, pendidkan S1	Telecenter:
		PI Unikal: Jumlah SDM Pengelola S1: 2 Orang	Pusat Inovasi Unikal: Minimal 4 orang
	Rasio anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Anggaran Kegiatan Pengelolaan Technopark Perikanan (APBD Kota Pekalongan 2020 Rp.499.850.000,-) Rasio : 24.000.000/499.850.000 = 0,048	Technopark: APBD : Rp.700.000.000 Rasio : 38.400.000/700.000.000 = 0,055

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		Museum Batik: Tahun 2020 sebesar Rp. 1.263.525.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Rasio:	Museum Batik : -
		Telecenter: Penganggaran : - Hosting : ± Rp. 88.400.000 - Sewa Bandwith : Rp. 135.000 x 12 bl x 221 titik = Rp. 358.020.000,-	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: -
	Sebaran anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Jumlah OPD yang mempunyai program pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi: 2 (dua) (Bappeda Kota Pekalongan ; DKP Kota Pekalongan)	Technopark: Jumlah OPD yang mempunyai program pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi: 1 (satu) Hanya 1 atau menambah 1 OPD ?
		Museum Batik: Jumlah OPD yang mempunyai program pengembangan Museum Batik:*	Museum Batik : Jumlah OPD yang mempunyai program pengembangan Museum Batik:
		Telecenter: - Jumlah telecenter ada 221, untuk penganggaran di 27 kelurahan dan 4 kecamatan.	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: -
	Pembangunan sarana/prasarana	Technopark: 3. Ada, Sekretariat Technopark berada satu Gedung terpadu dengan Gedung Tenant Technopark 4. Ada, Kawasan Technopark	Technopark: 1. Peningkatan Sekretariat / Gedung Pengelola lebih Representatif 2. Sarpras dalam kawasan terealisasi dan berfungsi optimal, yaitu tertatanya saluran dan Ipal terpadu, tertatanya jalan produksi dalam Kawasan, Tertatanya Gedung yang disediakan untuk usaha perikanan
		Museum Batik: UPTD Museum Batik menempati lahan milik Pemerintah Kota Pekalongan beralamat di Jalan Jetayu Nomor 3 Pekalongan	Museum Batik : Sarana prasarana bertambah
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Ada Sekretariat tapi minimalis dan belum menunjukkan kinerja yang diinginkan	Pusat Inovasi Unikal: Sudah Ada Sekretariat dan dikenal setidaknya di lingkungan kampus

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
	Jenis Penyelenggaraan Layanan Fasilitas/Wahana jaringan inovasi	Technopark: 9. Ada Layanan intermediasi teknologi. 10. Belum ada .Layanan konsultasi hukum HKI 11. Laboratorium/fasilitas produksi skala terbatas. (Bangsal / Rumah Pakan Ikan) 12. Ada Pendampingan tenant 13. Ada ruangan tenant, tetapi belum memadai 14. Melakukan pelatihan: antara lain pelatihan olahan hasil perikanan, pelatihan pemasaran, dll. 15. Ada ruangan untuk pelatihan/konferensi/seminar . berada dalam Gedung Terpadu Technopark 16. Ada Layanan konsultasi teknis (Konsultasi design logo dan kemasan produk olahan perikanan)	Technopark: 1. Lebih banyak intermediasi teknologi bagi pelaku usaha perikanan di Kota Pekalongan 2. Ada layanan konsultasi hukum HKI 3. Ada program kegiatan stimulan penumbuhan calon inventor di Kota Pekalongan 4. Lebih banyak jenis laboratorium / fasilitas produksi usaha perikanan 5. Pendampingan tenant lebih focus lagi sesuai bidangnya sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal 6. Ruang tenant mempunyai fasilitas yang lebih lengkap lagi 7. Pelatihan dilakukan lebih rutin lagi dan di monitoring perkembangannya sehingga bisa diketahui hasil dari pelatihan 8. Ruang untuk pelatihan diharapkan bisa maksimal penggunaannya 9. Peningkatan Layanan konsultasi teknis dengan SDM dan ruang informasi yang lebih representatif
		Museum Batik: Layanan di Museum Batik yaitu : latihan membatik Penyediaan ruang untuk pelatihan dan pertemuan (kapasitas 50 peserta)	Museum Batik : Diharapkan ada fungsi : 1. Layanan konsultasi batik 2. Intermediasi teknologi 3. Akses pemasaran dan keuangan
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada	Pusat Inovasi Unikal: Untuk semua layanan tersebut, PIT UNIKAL mengharapkan telah melakukan setidaknya 2 kali pada tahun 2025
	Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Technopark: 1. Ada SOP lisan 2. Ada SOP tertulis: SOP Pengelolaan Technopark Perikanan	Technopark: Fasilitas yang ada di Kawasan diharapkan dapat bermanfaat optimal untuk mendukung kemajuan perekonomian daerah sektor perikanan

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		Museum Batik: Ada beberapa SOP Tertulis	Museum Batik : -
		Telecenter: Tidak ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada	Pusat Inovasi Unikal: Sudah ada SOP
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEKIN/ atau LITBANGJIRAP serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, khususnya UMKM	Jumlah universitas , lembaga penelitian dan Sekolah yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Ada 2 (dua) Universitas antara lain : Unikal, Undip dan Lembaga Penelitian: BPPT . (Sudah Tidak Berlaku lagi , sebelum 2020)	Technopark: Pengembangan atau perluasan kerjasama dengan inventor dan dunia industri, lembaga litbang dan perguruan tinggi (jumlah ??)
		Museum Batik: 4. Universitas Esa Unggul dengan kegiatan Bantuan katalog Koleksi pada Tahun 2019 5. Institut Teknologi Bandung dengan kegiatan Dokumentasi/ database koleksi 6. Kadin Pekalongan	Museum Batik : Apakah ada rencana menambah keterlibatan Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian? (teknologi design yg terus berkemb, pewarnaan dll)
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: Ada minimal 2
	Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: - Komunitas Ikan Hias - Komunitas Pengolah dan Pemasar Ikan (tetapi belum ada MoU)	Technopark: Diharapkan ada kerjasama dengan komunitas dan pelaku usaha perikanan dalam pelibatan pengembangan/inovasi sehingga dapat memajukan bidang perikanan di Kota Pekalongan (target brp komunitas/thn?)
		Museum Batik: Data Komunitas (belum ada MOU): ada 12 komunitas	Museum Batik : Perlu ada MOU/ PKS dengan Komunitas
		Telecenter: RT, RW, LPM dan Karang Taruna	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: Ada minimal 2
	Pengembangan SDM Pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 5. Ada training SDM pengelola di tingkat lokal: Dari Pemkot Pekalongan (1 kali) 6. Ada training SDM pengelola di tingkat provinsi/regional :Daring zoom meeting Bappeda Jateng . (1 kali) 7. Ada training SDM pengelola di tingkat nasional :Daring / Webinar Workshop Melalui Zoom Meeting oleh KKP. (2 kali)	Technopark: Masih diperlukan pelatihan- pelatihan terkait jaringan inovasi. Di tingkat Lokal, Provinsi maupun Pusat

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		8. Ada training SDM pengelola di tingkat internasional : Fasilitasi sistem pemasaran produk bersama Kemenlu dengan zoom meeting Perusahaan di Shanghai untuk ekspor produk olahan perikanan. (2 kali)	
		Museum Batik: -	Museum Batik : Kedepannya perlu training tidak utk pengelola museum batik? Kalau perlu training tentang apa? Di tingkat apa? Berapa kali per tahun?
		Telecenter: - Training pengelola telecenter pernah dilaksanakan pada tahun 2019 sejumlah 100 orang oleh Diskominfo - Untuk tahun 2020 tidak ada training	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: Untuk semua jenis taining, agar setidaknya SDM pengelola telah mengikuti satu kali training pada tahun 2025 nanti
	Pemanfaatan hasil penelitian dari universitas, lembaga penelitian dan komunitas dalam fasilitas/ wahana jaringan inovasi atau dalam rangka pengembangan fasilitas/ wahana jaringan inovasi	Technopark: Belum ada	Technopark: Diharapkan dapat mewujudkan kerjasama dengan universitas/komunitas/lembaga penelitian dan industri untuk penelitian produknya yang dapat menghasilkan dan bermanfaat untuk kelompok budidaya dan pengolah produk perikanan
		Museum Batik: Belum ada	Museum Batik : -
		Telecenter: Belum ada	Telecenter: -
		PI Unikal: 4. Teh rambut jagung (Zea Tea) 5. Tepung Malla (Maggot dan Azolla) 6. Mikrokapsul	Pusat Inovasi Unikal: Minimal bertambah 4
Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/ Terbaik dan/ atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	Kerjasama pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Jumlah kerjasama skala lokal : Unikal Jumlah kerjasama skala regional : Undip Jumlah kerjasama skala nasional : BPPT Jumlah kerjasama skala internasional : Belum ada (Data terakhir desemb 2020: Tidak ada semua)	Technopark: Perluasan kerjasama dengan lembaga penghasil teknologi atau inventor serta industri untuk kemajuan pelaku usaha pemula di Kota Pekalongan (Perlu berapa jumlah kerjasama pertahunnya baik skala lokal, regional nasional maupun internasional ?)

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		Museum Batik: Kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Esa Unggul	Museum Batik : Perlu berapa jumlah kerjasama pertahunnya baik skala lokal, regional nasional maupun internasional ?
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: 2 kerjasama disetiap tingkatan.
		Setda: • Kerjasama antar daerah (regional/nas/internas) • Kerjasama dgn perguruan tinggi • Kerjasama dgn lembaga • Dll (berhub dgn ekraf) (lihat ada data di Pokja 1)	Perlu berapa jumlah kerjasama pertahunnya baik skala lokal, regional nasional maupun internasional ?
	Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Technopark: Jumlah produk yang dihasilkan : Belum ada	Technopark: Ada teknologi baru yang aplikatif terhadap permasalahan pelaku usaha pemula sehingga dapat meningkatkan usahanya
		Museum Batik: Jumlah produk yang dihasilkan : Belum ada	Museum Batik : -
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: 4. Teh rambut jagung (Zea Tea) 5. Tepung Malla (Maggot dan Azolla) 6. Mikrokapsul	Pusat Inovasi Unikal: Bertambah minimal 4
Mendorong Budaya Inovasi	Budaya berjejaring antar aktor inovasi	Technopark: 4. Jumlah pelatihan sesuai komoditas unggulan yang diusung oleh technopark dalam setahun : Belum ada. 5. Jumlah pelatihan berbasis IT dalam setahun : Belum ada. 6. Jumlah pelatihan lainnya yang mendukung perkembangan wilayah dalam setahun : Belum ada	Technopark: Diharapkan ada inventor penghasil teknologi yang dapat dikembangkan agar aplikatif menyelesaikan permasalahan pelaku usaha pemula 12 kali pelatihan/tahun
		Museum Batik: 3. Pelatihan Membatik bagi Anak Sekolah untuk 3000 siswa selama sebulan, tiap hari 100 siswa. 4. Pelatihan sesuai permintaan dari Wisatawan atau pengguna lainnya	Museum Batik : (Utk 5 tahun mendatang: Brp kali jumlah pelatihan yg diharapkan dalam setahun?)
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: Untuk semua jenis pelatihan, setiap tahun mengikuti setidaknya sekali

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: Jumlah wirausaha yang mendapat pembinaan : 30 Orang dan 9 Tenant	Technopark: Ada pelaku usaha pemula hasil inkubasi / fasilitasi pembinaan yang tumbuh dan berkembang dengan teknologi baru. 5 Tenant per tahun 40 orang binaan
		Museum Batik: -	Museum Batik : (berapa orang/tenant target per tahunnya ?)
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: Ada minimal 5
Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	Kerjasama antar daerah/dengan pusat terkait fasilitas/wahana jaringan inovasi	Technopark: 8. Wahana jejaring inovasi sudah terdapat di dalam program perencanaan daerah (Renstra/RPJMD) 9. Belum Mengikuti sosialisasi jaringan/technopark yang diselenggarakan Kemenristek 10. Technopark belum terdaftar sebagai SPIN technopark 11. Memiliki legalisasi pengelola: Perwal Nomor 82 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Memiliki rencana induk (Masterplan dan DED Kawasan) 13. Belum Memiliki dokumen rencana aksi 14. Pembangunan sarana prasarana: Tahun 2020 Pemeliharaan Kawasan	Technopark: Idem no 6
		Museum Batik: -	Museum Batik : -
		Telecenter: -	Telecenter: -
		PI Unikal: -	Pusat Inovasi Unikal: -
Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Positioning wahana jejaring inovasi dengan komunitas internasional	Technopark: Belum ada	Technopark: -
		Museum Batik: Belum ada	Museum Batik : -
		Telecenter: Belum ada	Telecenter: -
		PI Unikal: Belum ada	Pusat Inovasi Unikal: 1. Mengikuti setidaknya 3 kali seminar internasional 2. Mendaftar di AIBI

4.4. Pilar Teknopreneur (KKI 1-6)

Tabel 4.4. Kondisi SIDA yang ingin dicapai pada Pilar Teknopreneur

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Kondisi yang Ingin Dicapai (2025)
Mengembangkan Kerangka Umum yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis	Ketersediaan database teknopreneur	Data UMKM (dan entrepreneur) masih manual belum terintegrasi dan belum update	Pada tahun 2025 sudah terbangun data UMKM secara terintegrasi.
	Regulasi pengembangan teknopreneur	Belum ada regulasi yang dijadikan landasan pengembangan teknopreneur	Terbitnya regulasi pengembangan teknopreneur
	Legalitas Pendirian dan Pengelolaan Inkubator Bisnis	Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 050.05/219 Tahun 2012	Perbaikan dasar legal tentang pendirian inkubator daerah
	Ketersediaan inkubator bisnis dan kepemilikannya	Ada 1 Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi di bawah Dinperinaker	Terbangunnya incubator yang dibuat dan dikelola oleh swasta
	Pengelola/manajer inkubator bisnis	Ada Manajer Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kepala Dinperinaker Nomor 560/017/2020	Pengelola incubator yang profesional
	Sarana dan prasarana inkubator	Sudah ada sarana dan prasarana inkubator	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana inkubator yang meningkat
	Standar penyelenggaraan inkubator sebagai fasilitas penumbuhkembangan teknopreneur	Sudah ada aktivitas pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi	Pelayanan inkubator sesuai standar Permen KUKM Nomor 4 Tahun 2015.
	Persentase alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan teknopreneur	Anggaran sekitar 0,17 s/d 0,26 persen	Anggaran meningkat dari saat ini
	Besarnya penyaluran insentif / kemudahan pengembangan teknopreneur	Sekitar 0,91% UMKM menerima insentif berupa beberapa kemudahan dan pelatihan	Jumlah insentif meningkat
Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEKIN/ atau LITBANGJIRAP serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, khususnya UMKM	Sebaran SDM IPTEKIN / Litbangjirap yg berkontribusi dalam pengembangan teknopreneur daerah	Belum ada pegawai Pemda yang menjadi pejabat fungsional yang secara khusus sebagai pendamping pengembangan teknopreneur	Jumlah fungsional untuk pengembangan UMKM meningkat

	Rasio tingkat absorpsi UMKM terhadap hasil litbangjirap pengembangan teknopreneur	Belum tercatat dengan baik	Database UMKM yang terintegrasi, sehingga diketahui jumlah UMKM yang menerapkan teknologi hasil litbangjirap
Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi	Sebaran kemitraan strategis teknopreneur	Pelatihan teknopreneur dengan mendatangkan pengajar dari wilayah lain dan dari akademisi	Peningkatan program pelatihan yang disertai dengan program pemagangan dengan mengoptimalkan peran Forum Jejaring Pemagangan yang ada guna meningkatkan kesiapan peserta dalam memasuki dunia kerja.
	Jumlah dan skala interaksi komersialisasi teknologi antara penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur	Sudah ada Perjanjian Kerjasama Bank Jateng tentang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Semakin banyak teknopreneur yang berminat untuk mengembangkan hasil-hasil teknologi untuk dapat dikomersialkan melalui Kerjasama bisnis
Mendorong Budaya Inovasi	Rasio wirausaha / UMKM terhadap jumlah penduduk daerah tersebut	7,5%	10%
	Program peningkatan iklim kewirausahaan	Ada sosialisasi program program pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan talent scouting, technopreneurship camp, dan penjangkaran calon bekerjasama dengan pihak swasta • Program pendukung UMKM naik kelas lebih ditingkatkan
Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi	Jumlah usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - UMKM Batik sebanyak 741 unit, - UMKM Canting 21 dan - UMKM binaan pengolahan ikan 3 UMKM 	Meningkatnya jumlah UMKM pendukung unggulan daerah
	Koordinasi antara pemerintah daerah dalam satu regional dan antara pemerintah daerah dengan pusat	Ada peraturan yang mendukung pengembangan teknopreneur	Adanya kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat
Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Penerapan label ramah lingkungan pada produk UMKM/PPBT dalam tiga tahun terakhir (2018-2020)	Sampai tahap sosialisasi	Standardisasi produk dilakukan oleh UMKM secara mandiri

	Rasio jumlah bisnis inovatif yang terstandar ISO 14001	Belum ada	Mulai dirintis bisnis inovatif yang memenuhi standar ISO 140001 terutama pada bisnis inovatif yang baru.
	Rasio kepemilikan kekayaan intelektual oleh para teknopreneur daerah terhadap total UMKM	Ada kepemilikan HaKI berupa Hak Merek dan Hak Cipta	Semakin meningkatnya jumlah hak kekayaan intelektual oleh teknopreneur di Kota Pekalongan, baik Hak paten, hak merk maupun hak desain industry

4.5. Pilar Tematik Daerah (KKI 1-6)

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa Pilar Tematik ini merupakan pengelompokan kebijakan yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendukung implementasi SIDA, seperti: SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik), literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masyarakat dan dunia usaha, implementasi smart city, serta transformasi digital.

Setelah diketahui kondisi tahun 2020, maka ditetapkan kondisi yang akan dicapai di tahun 2025, terutama yang terkait dengan infrastruktur TIK sebagai pendukung implementasi SIDA yang tertuang dalam Pilar 2 (klaster industri), Pilar 3 (jaringan inovasi), dan Pilar 4 (teknopreneur).

Tabel 4.5. Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai Pada Pilar Tematik Daerah

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	1. Ketersediaan basis data terkait dengan SPBE, dan literasi TIK di masyarakat dan pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan TIK di Kota Pekalongan, meliputi Smartcity dan SPBE Data yang sudah tersedia adalah: % keluarga yg menggunakan fixphone, dan % individu yg menggunakan internet (di publikasi Kota Pekalongan Dalam Angka). Data yang belum tersedia: % individu yg menggunakan HP, dan % individu yg menggunakan komputer. Luasan wilayah yang terjangkau internet terdapat pada Data Base TIK Kota Pekalongan Tahun 2020. Data tidak menunjukkan persentase 	Dinkominfo bersama BPS bekerja sama memenuhi seluruh data dalam forum data program Satu Data. Seluruh kantor kelurahan terkoneksi Batik net dengan menggunakan FO dan memiliki layanan wifi gratis bagi masyarakat
	2. Ketersediaan website portal TIK	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah OPD ada 31, semuanya memiliki website. 16 OPD mempunyai website 	Seluruh OPD mempunyai website aktif update minimal 1 bulan sekali.

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		aktif update minimal 1 bulan sekali. • Seluruh website OPD terintegrasi dalam domain Pemerintah Kota Pekalongan (Pekalongan.go.id).	Materi website adalah dokumentasi dan publikasi kegiatan OPD, serta meningkatkan layanan interaktif kepada masyarakat
	3. Regulasi atau landasan hukum/ bentuk kebijakan lainnya terkait dengan pengembangan TIK	• Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. • Perwal Nomor 9 Tahun 2012 tentang TIK. • Draft Perda SPBE yang sdh masuk agenda. pembahasan 2021 • Perwal Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik • Panduan pengembangan Smartcity, Menkominfo • Perwal Nomor 66 Th 2019 tentang Masterplane Smart City Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2029	1. Terbit dan diundangkan Perda SPBE beserta Perwalnya 2. Terbitnya SOP berbagai kegiatan terkait pengembangan TIK.
	4. Masterplan pengembangan TIK	• Dokumen Masterplan Smartcity Tahun 2018. • Dokumen Masterplan SPBE dalam proses penyusunan	• Implementasi Masterplan Smartcity Tahun 2018. • Dokumen Masterplan SPBE selesai disusun
	5. Kelembagaan pengelola pengembangan TIK	Belum ada lembaga pengelola (smartcity, SPBE), namun sudah ada kajian dalam dokumen masterplan	Dibentuk lembaga pengelola (smartcity dan SPBE)
	6. Rasio anggaran untuk pengembangan TIK terhadap APBD	Total APBD Kota Pekalongan Tahun 2020 Rp.1.012.737.890.000,- Anggaran Belanja TIK Rp.35.825.486.500 Rasio anggaran TIK terhadap APBD 3,537%	Rasio anggaran TIK terhadap APBD ditingkatkan menjadi 5,0%
	7. Pembangunan fisik	5. Ruang server dengan umur server 10 tahun atau lebih. 6. Gambaran Jaringan internet: d. Seluruh OPD, Puskesmas dan Kelurahan telah memiliki jaringan Batik net melalui radio/wireless. 50 Sekolah yang terkoneksi Batiknet. e. Sebagian kecil OPD, Puskesmas, dan Kelurahan belum terkoneksi Batiknet melalui kabel FO f. Kapasitas seluruh bandwidth yang dikelola oleh Dinkominfo sebesar 1318 Mbps (318 Mbps jenis dedicated) 7. Pada umumnya perangkat komputer yang dimiliki OPD dan kelurahan mencukupi kebutuhan kantor. Sedangkan di SD dan TK belum memadai. 8. Terdapat ruang Commandcenter, namun tidak	1. Peremajaan sebagian besar server yang ada (baru dan spesifikasi teknis lebih tinggi) 2. Seluruh OPD sampai dengan Kelurahan memperoleh jaringan Batik net melalui kabel FO. Seluruh sekolah terkoneksi jaringan Batik net baik melalui FO atau wireless. Kapasitas bandwidth ditingkatkan menjadi 2000 Mbps (750 Mbps jenis dedicated) 3. 1 ASN1 laptop baik aset pemerintah maupun pribadi. Peremajaan komputer kantor perlu dilakukan. 4. Terpenuhinya perangkat, jaringan, aplikasi, dan SDM commandcenter dalam rangka

Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator	Kondisi Saat Ini (2020)	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2025)
		ada perangkat, aplikasi, maupun SDM. Commandcenter sementara hanya berfungsi sebagai callcenter.	penanganan kedaruratan bencana rob, banjir, dan pengelolaan sampah.
Meningkatkan Kelembagaan dan daya dukung Iptekin/Litbangjirap serta kemampuan absorpsi oleh industry Khususnya UMKM	8. Kelembagaan iptekin/ litbangjirap yg terlibat dalam pengembangan TIK	Jumlah Perguruan Tinggi (PT) di Kota Pekalongan ada 6 PT Jumlah PT yang terlibat kerjasama program TIK ada 3 PT, yaitu : Polines (Semarang), STIMIK WP(Kota Pekalongan), dan UMPP(Kota Pekalongan) Jumlah lembaga Litbangjirap yang terlibat kerjasama adalah BPPT	5 kerjasama dengan lembaga Litbangjirap terkait dengan TIK secara lebih berkualitas dan berkesinambungan
	9. Jumlah lembaga / komunitas dalam pengembangan TIK	Terdapat 13 komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK, meliputi: kelompok informasi masyarakat (KIM), Dewan TIK, Relawan TIK, Asosiasi Rakyat Anti Hoax (ARAH), BloggerPekalongan, Akademi Berbagi, KFI, Formaci, Dron Pekalongan, Insta Pekalongan, Pekalongan Info, Explore Pekalongan, dan Generasi Pesona Indonesia.	Peningkatan kualitas output(prodruk dan dokumennya) serta kesinambungan kerjasama dengan komunitas yang ada.
Meningkatkan Kolaborasi TIK antara lembaga Litbangjirap dengan pengelola TIK	10. Kolaborasi antara lembaga litbangyasa / litbangjirap dengan pengelola TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Karena lembaga pengelola TIK (smartcity, SPBE) belum terbentuk, maka kolaborasi dilakukan oleh Pemkot Pekalongan (dinas Kominfo) • Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Pekalongan; • Kolaborasi dengan Pusyantek BPPT 	Peningkatan kolaborasi terkait pengembangan TIK
Mendorong budaya inovasi	11. Jumlah kegiatan Diklat di bidang TIK serta tingkat pelaksanaannya	Karena pengelola lembaga TIK (smartcity dan SPBE) belum terbentuk, maka pengembangan SDM di bidang TIK dilakukan kepada ASN yang berkaitan dengan tupoksi di bidang TIK. Level diklat mulai lokal sampai nasional	Peningkatan jumlah keikutsertaan training SDM TIK baik tingkat lokal, provinsi, nasional, maupun internasional sesuai dengan perkembangan tuntutan pekerjaan dan teknologi
Menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan/kohorensi pemajuan sistem, inovasi daerah	12. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat	Mengadopsi peraturan/ kebijakan dari pusat/provinsi: <ul style="list-style-type: none"> • Perpres 95 Th 2018 ttg SPBE, dan Draft Perda SPBE) • Panduan Kemenkominfo tentang pengembangan Smartcity (Gerakan menuju 100 smartcity), dan Perwal Nomor 66 Th 2019 tentang Masterplane Smart City Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2029 	Penerapan Smartcity, dan SPBE, mengacu regulasi dan kebijakan provinsi/pusat.
Menyelaraskan dengan perkembangan global	13. Jumlah produk yang digunakan sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kabel FO, penggunaan perangkat keras jaringan TIK • Penggunaan perangkat Pusat data • Penggunaan FOSS 	Pemakaian produk TIK sesuai dengan standar internasional

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang dimaksud adalah prakarsa strategis yang perlu dilakukan dalam rangka upaya penguatan sistem inovasi di Kota Pekalongan. Strategi Penguatan Sistem Inovasi Kota Pekalongan sangat berkaitan dengan tantangan pembangunan serta isu strategis tahun 2021-2024.

Tantangan dan isu strategis Pembangunan Kota Pekalongan tahun 2021-2024, berdasarkan dokumen Background Study RPJMD 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tantangan Pembangunan, terdiri atas :

- a) Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)
- b) Daya Saing Ekonomi
- c) Tata Kelola Pemerintahan
- d) Sarana dan Prasarana Perkotaan.
- e) Kondusivitas Wilayah

Berdasarkan tantangan pembangunan tersebut, maka isu pembangunan Kota Pekalongan tahun 2021-2024 adalah

- a) Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
- b) Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha
- c) Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
- d) Penanganan Rob dan Banjir
- e) Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman dan Perkotaan
- f) Penataan Wajah Kota dan Pengembangan Pariwisata
- g) Sampah, Penyediaan Air Baku dan Pencemaran Lingkungan Hidup
- h) Tata Kelola Pemerintahan Dan Kondusivitas Wilayah
- i) Pemulihan Kota Pekalongan akibat Pandemi COVID-19.

Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah bagaimana menterjemahkan isu strategis daerah Kota Pekalongan ke dalam program

atau kegiatan Penguatan SIDA. dengan memetakan ke dalam 5 (lima) Pilar SIDA, yakni:

1. Pilar 1. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di Kota Pekalongan secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks makro sebagai bagian integral pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis penguatan sistem inovasi daerah dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah penguatan sistem inovasi daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik penguatan sistem inovasi daerah.

2. Pilar 2. Pengembangan Klaster Industri

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks meso klaster industri potensi unggulan daerah sebagai bagian integral pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan:

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan klaster industri potensi unggulan daerah dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan klaster industri potensi unggulan daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan klaster industri potensi unggulan daerah.

3. Pilar 3. Pengembangan Jaringan Inovasi

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks penguatan kemitraan/ kolaborasi, dinamika interaksi, aliran pengetahuan/ inovasi, dan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) sebagai bagian integral pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan:

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan jaringan inovasi daerah dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan jaringan inovasi daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan jaringan inovasi daerah.

4. Pilar 4. Pengembangan Teknopreneur

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja kreativitas-keinovasian, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks meso-mikro pengembangan kelembagaan pusat-pusat inovasi usaha mikro, kecil dan menengah (PI UMKM) dan UMKM inovatif dalam kerangka sistem inovasi daerah sebagai bagian integral pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan:

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan teknopreneur daerah dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan teknopreneur daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan teknopreneur daerah.

5. Pilar 5. Pengembangan Tematik Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual sebagai bagian integral pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan melalui pendekatan:

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan tematik dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan tematik.
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan tematik.

5.2. Arah Kebijakan

Dalam upaya Penguatan Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, arah kebijakan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang merupakan pijakan bersama para pihak dalam pengembangan sinergitas dan koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya dirumuskan dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) sebagai berikut:

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi.

Adapun cakupan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis antara lain meliputi:

- a. Dokumen perencanaan daerah yang memuat sistem inovasi
- b. Peraturan yang mendukung inovasi dan bisnis: mencakup seluruh regulasi untuk mendukung inovasi dan bisnis secara berkelanjutan.
- c. Infrastruktur Dasar Inovasi dan Bisnis: melingkupi seluruh infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis.
- d. Insentif Inovasi dan Bisnis.

- e. Pembangunan atau pengembangan ruang public kreatif (RPK) sebagai salah satu infrastruktur khusus untuk peningkatan kapasitas inovasi daerah.

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung Iptekin/Litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UMKM.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan atau memperkuat unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi di Kota Pekalongan, meningkatkan daya ungkit peran iptekin/ litbangyasa yang sesuai dan spesifik bagi Kota Pekalongan, serta meningkatkan kemampuan industri, khususnya UMKM, dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan dan hasil litbangyasa/ inovasi serta mengembangkannya.

Cakupan kelembagaan dan daya dukung Iptekin/ Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM antara lain meliputi:

- a. Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah: meliputi tim koordinasi, serta seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang terdapat di Kota Pekalongan.
- b. Daya dukung Iptek: mencakup seluruh sumberdaya iptekin.
- c. Daya Absorpsi Industri, khususnya UMKM: melingkupi seluruh kapasitas daya absorpsi industri, khususnya UMKM.

3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil Litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik Kota Pekalongan.

Ini mencakup antara lain:

- a. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (Jaringan Sistem Inovasi Daerah): menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif.

- b. Peningkatan difusi inovasi: meningkatkan difusi hasil-hasil inovasi (praktik baik, pengetahuan, kepakaran) dan alih inovasi.
- c. Pelayanan berbasis teknologi: memberikan pelayanan teknologi untuk peningkatan kapasitas adopter.

4. Mendorong budaya inovasi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di Kota Pekalongan.

Ini antara lain terkait dengan:

- a. Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Inovasi: sejauhmana kondisi budaya inovasi yang telah diraih melalui jalur pendidikan dan pelatihan (kewirausahaan, keinovasian, peningkatan kapasitas sumberdaya aparat).
- b. Penguatan Kohesi Sosial: sejauhmana inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi masyarakat (kearifan lokal) serta komponen modal sosial lainnya yang dimiliki Kota Pekalongan sebagai sumber inovasi dan program *reverse brain drain*.
- c. Apresiasi dan Kampanye Inovasi: sejauhmana Kota Pekalongan telah memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi di wilayahnya.
- d. Penumbuhan Usaha Baru Inovatif: sejauhmana Kota Pekalongan telah mendorong tumbuhnya usaha baru yang inovatif melalui pemberian insentif.

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di daerah.

Adapun cakupan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional antara lain meliputi:

- a. Prakarsa Klaster Industri Spesifik Daerah dan/atau Prakarsa Sistem Inovasi: memperlihatkan perkembangan aktor bisnis dan nonbisnis dalam suatu jaringan atau klaster industri.
- b. Koordinasi Kebijakan Daerah dan Daerah-Nasional: menunjukkan ada atau tidaknya mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu sistem inovasi dan klaster industri.
- c. Pengembangan/ Penguatan Kelembagaan Khusus: menggambarkan sejauhmana terbangunnya lembaga khusus untuk mempercepat proses terjadinya kolaborasi inovatif.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun pemangku kepentingan di Kota Pekalongan agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan Kota Pekalongan.

Hal ini antara lain mencakup:

- a. Lingkungan: sejauhmana prakarsa dan respon terhadap isu lingkungan yang telah diprogramkan.
- b. Standarisasi: hal ini terutama menyangkut sudah/belum adanya penerapan *Measurement Standard Test Quality (MSTQ)*.
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): sejauhmana program Kota Pekalongan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang HKI.
- d. Hak Asasi Manusia (HAM): sejauhmana perhatian Kota Pekalongan terhadap isu HAM.

BAB VI

FOKUS PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDA

6.1 Fokus Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan

Fokus penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan 2020-2023 untuk setiap pilar adalah:

6.1.1 Fokus Pilar 1 Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Fokus penguatan Ekosistem Inovasi Daerah yang terkait dengan **Pengembangan Ekonomi Kreatif berwawasan lingkungan berbasis potensi unggulan daerah**, antara lain dengan melakukan:

- Peningkatan infra dan suprastruktur dasar untuk mendukung berkembangnya bisnis dan inovasi berupa peningkatan pelayanan sistem perizinan, sistem insentif dari pemerintah, pembangunan Ruang Publik Kreatif (RPK); pengembangan komunitas kreatif di masyarakat; pengarusutamaan SIDA dalam kebijakan pembangunan daerah;
- Pengembangan budaya inovasi melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kreativitas keinovasian di seluruh elemen daerah (birokrat, masyarakat, dan perguruan tinggi), melalui apresiasi inovasi dan implementasi inovasi;
- Mengembangkan jaringan kerjasama antar daerah, dengan lembaga pusat (BPPT, Bekraf, Kemenpora), dan perguruan tinggi;
- Mewujudkan standar pelayanan publik berbasis ISO 9000 serta pembentukan sentra KI.

6.1.2 Fokus Pilar 2 Klaster Industri

Fokus penguatan Klaster Industri yang terkait dengan **Pengembangan Ekonomi Kreatif berwawasan lingkungan berbasis potensi unggulan daerah**, antara lain dengan melakukan :

- a) Penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan penataan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan usaha di sektor ekonomi kreatif, khususnya kriya batik dan kuliner olahan ikan.

- b) Peningkatan kapasitas SDM, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penguatan rantai pasok untuk mendukung pengembangan produk dan layanan di sektor ekonomi kreatif.
- c) Penyelarasan dengan perkembangan global untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya, dikenal luas sebagai produk asli Kota Pekalongan, dan bisa menjangkau pasar global melalui pemenuhan berbagai standar yang dipersyaratkan.

6.1.3 Fokus Pilar 3 Jaringan Inovasi

Fokus penguatan Jaringan Inovasi yang terkait dengan **Pengembangan Ekonomi Kreatif berwawasan lingkungan berbasis potensi unggulan daerah**, antara lain dengan melakukan :

- a) Memprakarsai pembangunan kawasan Pusat Inovasi berbasis ekonomi kreatif (Pusat Inovasi Budaya Batik), dimulai dengan penyusunan Konsep, Studi Kelayakan, Masterplan dan Detail Engineering Design Pusat Inovasi Budaya Batik
- b) Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam rangka optimalisasi kawasan Technopark Perikanan Pekalongan dan Pusat Inovasi Budaya Batik.
- c) Pengembangan kebijakan yang mendukung Technopark Perikanan Pekalongan dan Pusat Inovasi Budaya Batik;
- d) Pelibatan masyarakat dalam pengembangan Technopark Perikanan Pekalongan dan Pusat Inovasi Budaya Batik, melalui pengembangan bisnis berbasis ekonomi kreatif.

6.1.4 Fokus Pilar 4 Teknopreneur

Fokus penguatan Teknopreneur yang terkait dengan **Pengembangan Ekonomi Kreatif berwawasan lingkungan berbasis potensi unggulan daerah**, antara lain dengan melakukan :

- a) Mengembangkan kebijakan yang mendukung berkembangnya teknapreneur, meliputi kebijakan perijinan bisnis, insentif dari pemerintah untuk teknapreneur;

- b) Mengembangkan inkubator yang telah ada dengan menata proses inkubasi dan menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) dan UMKM inovatif;
- c) Mengembangkan teknopreneur serta memodernisasi UMKM yang telah eksis melalui peningkatan kemitraan dengan daerah lain serta pelaku bisnis;
- d) Meningkatkan standard dan kualitas serta perlindungan HKI produk teknopreneur.

6.1.5 Fokus Pilar 5 Tematik Daerah

Fokus pengembangan Tematik Daerah (Pengembangan TIK) yang terkait dengan **Pengembangan Ekonomi Kreatif berwawasan lingkungan berbasis potensi unggulan daerah**, antara lain dengan melakukan dukungan kepada 4 program lainnya (ekosistem, kluster industri, jaringan inovasi, dan teknopreneur), misalnya:

- a) Penyediaan basis data pengembangan TIK dan optimalisasi pemanfaatan portal/ website
- b) Penguatan regulasi dan tata kelola TIK, serta implementasi dokumen perencanaan TIK (smartcity, SPBE, dan program lainnya}
- c) Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengembangan TIK
- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur TIK
- e) Peningkatan kolaborasi lembaga Litbangjirap dan komunitas TIK
- f) Peningkatan SDM di Bidang TIK
- g) Peningkatan koherensi kebijakan TIK dengan provinsi dan nasional
- h) Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang berstandar

6.2 Program Prioritas Penguatan SIDA Kota Pekalongan

6.2.1 Program Prioritas pada Pilar Ekosistem Inovasi Daerah

Program prioritas pada pilar Ekosistem Inovasi Daerah dalam rangka Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah, adalah:

- a) Mewujudkan Satu Data Kota Pekalongan, dilengkapi dengan data inovasi bisnis

- b) Memfungsikan sistem perizinan bisnis/investasi terpadu yang cepat dan dapat diakses secara online untuk seluruh perijinan khususnya terkait pengembangan ekonomi kreatif
- c) Mensosialisasikan Insentif/pembiayaan kreativitas keinovasian
- d) Membentuk Komunitas Kreatif yang ter-registrasi
- e) Mengarusutamakan Penguatan SIDA yang sejalan dengan Dokumen RPJMD sehingga dapat di laksanakan
- f) Melakukan pengukuran Investasi Iptekin (%)
- g) Membangun ruang publik kreatif di Kota Pekalongan sebagai peningkatan dari taman/RTH yang ada (kelembagaan, fungsi co working space, dan fasilitas TIK)
- h) Memfungsikan kelembagaan sistem inovasi serta menyusun SOP tim koordinasi
- i) Mewujudkan Koordinasi Penta Helix (ABGCM) melalui pertemuan formal dan informal
- j) Mewujudkan Inovasi Perguruan Tinggi (PT) dan/atau lembaga litbang non PT di daerah
- k) Mewujudkan kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah
- l) Mewujudkan Peningkatan kapasitas sistem inovasi daerah aparat Pemkot melalui workshop
- m) Menyelenggarakan apresiasi inovasi pemuda untuk berbagai kategori
- n) Mewujudkan inovasi OPD terutama terkait ekonomi kreatif
- o) Mewujudkan Inovasi OPD yang diimplementasikan 100%
- p) Mewujudkan muatan pelajaran kewirausahaan di SMK/SMA
- q) Membangun kerjasama antar daerah
- r) Membangun kerjasama dengan pusat
- s) Pelaksanaan program lingkungan dalam mewujudkan green economy
- t) Peningkatan manajemen mutu OPD
- u) Memfungsikan sentra KI dan meningkatkan KI (Paten, Desain, Indikasi Geografis dll) di Kota Pekalongan

6.2.2 Program Prioritas pada Pilar Klaster Industri

Program prioritas pada pilar Klaster Industri dalam rangka Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah, adalah:

- a) Mengembangkan Database dan Sistem Informasi Klaster Industri Kreatif
- b) Mengembangkan Marketplace Digital untuk Produk Industri Kreatif
- c) Melakukan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif
- d) Meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagai sumber iptekin bagi pengembangan klaster
- e) Meningkatkan keterlibatan asosiasi bisnis dan komunitas bagi pengembangan klaster
- f) Meningkatkan Kemandirian UMKM Batik untuk menjual produk di pasaran ekspor
- g) Mendorong Kerja Sama untuk Pembangunan Material Center dan Sistem Pengadaan Bahan Baku Batik
- h) Memperkuat branding dan kerja sama bisnis di bidang industri batik
- i) Mengembangkan kreasi masakan olahan ikan yang unik dan bernilai jual tinggi
- j) Meningkatkan kapasitas SDM pengrajin batik sesuai standar SKKNI
- k) Meningkatkan kapasitas SDM pemasaran digital produk batik
- l) Meningkatkan Kapasitas pelaku usaha kuliner olahan ikan dalam memenuhi standar halal dan standar produk pangan SPP-IRT
- m) Meningkatkan peran pokja klaster dalam penguatan rantai nilai klaster industri kreatif
- n) Meningkatkan pemanfaatan marketplace global untuk pemasaran batik
- o) Memperkuat branding produk batik melalui pendampingan HKI Merk dengan Labelisasi Batikmark “Batik Indonesia”.
- p) Meningkatkan pemenuhan SKKNI agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasaran global
- q) Mengembangkan produk unggulan yang ramah lingkungan
- r) Membuat konten promosi terkait pemenuhan standar untuk memberi nilai tambah di pasar global

6.2.3 Program Prioritas pada Pilar Jaringan Inovasi

Program prioritas pada pilar Jaringan Inovasi dalam rangka Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah, adalah:

- a) Menyusun Konsep, Studi Kelayakan, Masterplan dan Detail Engineering Design Kota Pekalongan *Creative Centre*.
- b) Membangun dan Menata Kawasan Kota Pekalongan *Creative Centre*.
- c) Menyusun dokumen kajian, penelitian dan pengembangan tentang ekonomi kreatif dan pariwisata.
- d) Membentuk lembaga pengelola Kota Pekalongan *Creative Centre*.
- e) Daya Absorpsi IPTEKIN UMKM.
- f) Publikasi hasil riset Perguruan Tinggi, lembaga IPTEKIN yang dimanfaatkan oleh Pemda dan masyarakat.
- g) Kerjasama dengan K/L, Perguruan Tinggi, lembaga IPTEKIN dan pelaku bisnis dalam bidang penelitian pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
- h) Kerjasama dengan K/L, Perguruan Tinggi, lembaga IPTEKIN dan pelaku bisnis dalam mendukung pemasaran dan promosi pariwisata .
- i) Pembelajaran inovasi kepada masyarakat (komunitas ekonomi kreatif).
- j) Kerjasama antar Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
- k) Menyelenggarakan forum antar komunitas .
- l) Menyelenggarakan forum IPTEKIN Regional/Nasional/ Internasional

6.2.4 Program Prioritas pada Pilar Teknopreneur

Program prioritas pada pilar Teknopreneur dalam rangka Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah, adalah:

- a) Pembenahan Data Pelaku UMKM
- b) Pengembangan Kebijakan Teknopreneur
- c) Pengembangan Inkubator

- d) Pelaksanaan Inkubasi Bisnis Berbasis Teknologi
- e) Pengembangan Insentif Pengembangan Teknopreneur
- f) Peningkatan SDM pendamping Teknopreneur
- g) Peningkatan alih teknologi kepada Teknopreneur
- h) Kerjasama untuk pengembangan Teknopreneur
- i) Promosi Kewirausahaan berbasis teknologi
- j) Pengembangan produk ramah lingkungan di UMKM
- k) Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual UMKM

6.2.5 Program Prioritas pada Pilar Tematik

Program prioritas pengembangan Tematik Daerah (Pengembangan TIK) yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif berwawasan lingkungan berbasis potensi unggulan daerah, antara lain dengan melakukan dukungan kepada 4 program lainnya (ekosistem, klaster industri, jaringan inovasi, dan teknopreneur), misalnya:

- a) Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan validitas basis data tentang TIK (minimal sesuai dengan *statistics ITU-UN*)
- b) Mengaktifkan website dan optimalisasi pemanfaatannya
- c) Menyusun dokumen kebijakan terkait pengembangan TIK
- d) Menyusun dan implementasi dokumen perencanaan pengembangan TIK (masterplan smartcity dan SPBE)
- e) Membentuk dan penguatan kelembagaan pengelola TIK (SPBE, dan Smart City)
- f) Meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK
- g) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga Litbangjirap terkait dengan TIK secara berkesinambungan
- h) Meningkatkan dokumentasi dan kualitas kerjasama dengan komunitas yang ada
- i) Meningkatkan kolaborasi pengembangan TIK
- j) Meningkatkan kemampuan SDM pengelola TIK di bidang TIK
- k) Meningkatkan koordinasi dan koherensi kebijakan/ program TIK dg provinsi dan K/L pusat
- l) Meningkatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang berstandar

BAB VII

RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

7.1 Pilar Ekosistem Inovasi

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Satu Data Kota Pekalongan, dilengkapi dengan data inovasi bisnis	Program Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Data inovasi bisnis yang terintegrasi	Sosialisasi konten dan ruang lingkup data	Update data	Update data	Update data	Tersedia satu data Kota Pekalongan, dilengkapi dengan data inovasi bisnis	Bappeda Diskominfo
	Program Pengelolaan data dan informasi statistik		Sosialisasi integrasi data	Integrasi data	Integrasi data	Integrasi data		Bappeda Diskominfo
Memfungsikan sistem perizinan bisnis/investasi terpadu yang cepat dan dapat diakses secara online untuk seluruh perijinan khususnya terkait pengembangan ekonomi kreatif	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Sistem perijinan online	Penyelenggaraan OSS Inisiasi proses pengembangan Mall Pelayanan Publik	Penyelenggaraan OSS Adanya legalitas Mall Pelayanan Publik	Penyelenggaraan OSS Berdirinya Mall Pelayanan Publik	Penyelenggaraan OSS Berfungsinya Mall Pelayanan Publik	Perijinan online terkait pengembangan ekonomi kreatif berfungsi dengan baik	DPMPTSP Bappeda Setda
		Jumlah sosialisasi perijinan terkait pengembangan ekonomi kreatif		Sosialisasi perijinan terkait pengembangan ekonomi kreatif (1x)	Sosialisasi perijinan terkait pengembangan ekonomi kreatif (1x)	Sosialisasi perijinan terkait pengembangan ekonomi kreatif (1x)		DPMPTSP
Mensosialisasikan Insentif/pembiayaan kreativitas keinovasian	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perda insentif dan disinsentif	Tersusunnya dan terbentuknya Perda tentang insentif kreativitas keinovasian	Sosialisasi insentif kreativitas keinovasian	Sosialisasi insentif kreativitas keinovasian	Sosialisasi insentif kreativitas keinovasian	Ada pihak yang memanfaatkan insentif	DPMPTSP Bappeda

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Membentuk Komunitas Kreatif yang ter-registrasi	Penyelenggaraan Komunikasi Publik Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah komunitas terregistrasi	Sosialisasi dan registrasi komunitas	Pembinaan komunitas	Pembinaan komunitas	Pembinaan komunitas	Komunitas terdata/ terregistrasi dan ada pembinaan	Diskominfo
Mengarusutamakan Penguatan SIDA yang sejalan dengan Dokumen RPJMD sehingga dapat dilaksanakan	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah sosialisasi dan Monev	Sosialisasi Roadmap 2021-2025 SIDA dan hubungannya dengan RPJMD	Monev Roadmap SIDA	Monev Roadmap SIDA	Monev Roadmap SIDA	Penguatan SIDA dapat diimplementasikan	Bappeda
Melakukan pengukuran Investasi Iptekin (%)	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Hasil perhitungan Nilai Investasi Iptekin	Hasil perhitungan Nilai Investasi Iptekin	Hasil perhitungan Nilai Investasi Iptekin	Hasil perhitungan Nilai Investasi Iptekin	Hasil perhitungan Nilai Investasi Iptekin	Nilai investasi Iptekin dapat dihitung tiap tahun	Bappeda BKD
Membangun ruang publik kreatif di Kota Pekalongan sebagai peningkatan dari taman/RTH yang ada (kelembagaan, fungsi co working space, dan fasilitas TIK)	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang Infrastruktur perkotaan	Infrastruktur RPK, kelembagaan, fasilitas TIK, dan fungsi co working	Satu RPK	Dua RPK	Dua RPK	Dua RPK	Terdapat tujuh RPK yang sudah berfungsi, terhubung dengan komunitas, dan mempunyai agenda kegiatan tahunan	Dinas PUPR Bappeda
Memfungsikan kelembagaan sistem inovasi serta menyusun SOP tim koordinasi	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	SOP Timkor dan Pokja Penguatan SIDA	Menyusun SOP Rapat Paripurna dan Pokja Penguatan	Rapat Paripurna dan Pokja Penguatan SIDA	Rapat Paripurna dan Pokja Penguatan SIDA	Rapat Paripurna dan Pokja Penguatan SIDA	Timkor dan Pokja Penguatan SIDA berfungsi dengan baik	Bappeda

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rapat-rapat Timkor dan Pokja Penguatan SIDA	SIDA					

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Memperkuat kelembagaan tim koordinasi dan daya dukung Iptekin dari lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Iptek strategis daerah dan industri						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Koordinasi Penta Helix (ABGCM) melalui pertemuan formal dan informal	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah pertemuan	Membentuk forum (melibatkan Penta Helix (ABGCM)) sesuai kebutuhan	Pertemuan Penta Helix (ABGCM)	Pertemuan Penta Helix (ABGCM)	Pertemuan Penta Helix (ABGCM)	Koordinasi Penta Helix (ABGCM) melalui pertemuan formal berlangsung baik	Bappeda
Mewujudkan Inovasi Perguruan Tinggi (PT) dan/atau lembaga litbang non PT di daerah	Program Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Pekalongan	Jumlah inisiasi awal inovasi	Sosialisasi PT tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Sosialisasi PT tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Sosialisasi PT tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Sosialisasi PT tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Terjadi inisiasi awal inovasi perguruan tinggi di bidang ekonomi kreatif	

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, hasil litbangyasa						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dan skala kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah	Tingkat Lokal : 2 kerja sama Tingkat Regional : 2 kerja sama Tingkat Nasional : 2 kerja sama	Tingkat Lokal : 2 kerja sama Tingkat Regional : 2 kerja sama Tingkat Nasional : 2 kerja sama Tingkat Internasional : 1 kerja sama.	Tingkat Lokal : 1 kerja sama Tingkat Regional : 3 kerja sama Tingkat Nasional : 3 kerja sama	Tingkat Lokal : 1 kerja sama Tingkat Regional : 3 kerja sama Tingkat Nasional : 3 kerja sama Tingkat Internasional : 1 kerja sama.	Tingkat Lokal: 6 kerja sama (akumulatif) Tingkat Regional : 10 kerja sama (akumulatif) Tingkat Nasional : 10 kerja sama (akumulatif) Tingkat Internasional: 2 kerja sama. (akumulatif)	

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan menengah, aparat Pemkot, dan Masyarakat						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Peningkatan kapasitas sistem inovasi daerah aparat Pemkot melalui workshop	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah program	Mengadakan program pelatihan	Mengadakan program pelatihan	Mengadakan program pelatihan	Mengadakan program pelatihan	Kapasitas ASN tentang SIDA meningkat	BKPPD
Menyelenggarakan apresiasi inovasi pemuda untuk berbagai kategori	Program Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Pekalongan	Jumlah apresiasi inovasi pemuda	Penilaian dan pemberian apresiasi	Penilaian dan pemberian apresiasi	Penilaian dan pemberian apresiasi	Penilaian dan pemberian apresiasi	Terwujudnya apresiasi inovasi pemuda tahunan	Bappeda

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan menengah, aparat Pemkot, dan Masyarakat						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan inovasi OPD terutama terkait ekonomi kreatif	Program Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Pekalongan	Jumlah inisiasi awal inovasi	Sosialisasi OPD tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Sosialisasi OPD tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Sosialisasi OPD tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Sosialisasi OPD tentang inovasi di bidang ekonomi kreatif	Terjadi inisiasi awal inovasi OPD di bidang ekonomi kreatif	Bappeda
Mewujudkan Inovasi OPD yang diimplementasikan 100%	Program Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Pekalongan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	80% hasil inovasi diimplementasikan	85% hasil inovasi diimplementasikan	90% hasil inovasi diimplementasikan	95% hasil inovasi diimplementasikan	Hampir 100% hasil inovasi diimplementasikan	Bappeda
Mewujudkan muatan pelajaran kewirausahaan di SMK/SMA		Jumlah SMK/SMA dengan muatan pelajaran kewirausahaan	1 SMK/SMA	2 SMK/SMA	2 SMK/SMA	2 SMK/SMA	7 SMK/SMA dengan muatan pelajaran kewirausahaan	Disdik Disdagkop UKM

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Memperkuat kerjasama antar daerah dan antar daerah dengan pusat						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Membangun kerjasama antar daerah	Proram Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah kerjasama	Kajian kebutuhan dan potensi kerjasama kab/kota (1x)	Implementasi kerjasama 1 kab/ kota (1x)	Implementasi kerjasama 1 kab/ kota (1x)	Implementasi kerjasama 1 kab/ kota (1x)	Terwujudnya kerjasama antar kab/kota	Setda
Membangun kerjasama dengan pusat	Proram Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah kerjasama	Kajian kebutuhan dan potensi kerjasama kementerian/ LPNK/ perguruan tinggi (1x)	Implementasi kerjasama kementerian / LPNK/perguruan tinggi (3x)	Implementasi kerjasama kementerian / LPNK/perguruan tinggi (3x)	Implementasi kerjasama kementerian / LPNK/perguruan tinggi (3x)	Terwujudnya kerjasama kementerian/LPNK /perguruan tinggi	Setda

Strategi		: Penguatan Ekosistem Inovasi						
Arah Kebijakan		: Melakukan Penyelarasan dengan perkembangan global terkait isu standar, Kekayaan Intelektual (KI), dll						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung jawab/ OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pelaksanaan program lingkungan dalam mewujudkan green economy		Jumlah Program adipura/Program sumberdaya dan konservasi lingkungan/Program pengelolaan sampah ramah lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	
		Jumlah sertifikasi ISO 14001 yang diperoleh oleh OPD		1 (RSUD)	2 (Puskesmas)	2 (Puskesmas)	5 Penerima sertifikasi ISO 14001 (1 RSUD Bendan, 4 Puskesmas setiap Kecamatan)	
		Jumlah keikutsertaan dalam forum internasional bidang lingkungan	1	1	1	1	Keikutsertaan dalam forum internasional bidang lingkungan rutin setiap tahun	
		Jumlah penggunaan energi alternatif	Biogas	Biogas Sel surya (PJU)	Biogas Sel surya (PJU)	Biogas Sel surya (PJU)	Pemanfaat energi alternatif meningkat	
Peningkatan manajemen mutu OPD		Jumlah sertifikasi ISO 9001 yang diperoleh OPD	1	1	1	1	27 OPD memiliki ISO 9001 (kondisi awal 10 OPD)	Disdagkop UKM Setda BKPPD
Memfungsikan sentra KI dan meningkatkan KI (Paten, Desain, Indikasi Geografis dll) di Kota Pekalongan		Jumlah paten/desain/indikasi geografis	1	1	1	1	Meningkatnya paten, desain, indikasi geografis dll	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

7.2 Pilar Kluster Industri

Strategi		: Penguatan Kluster Industri						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi Dan Bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mengembangkan Database dan Sistem Informasi Kluster Industri Kreatif	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pengembangan Database dan Sistem Informasi Kluster Industri Kreatif	15% capaian. Sinkronisasi data kluster batik dan kuliner olahan ikan antar OPD terkait, untuk menampilkan data yang sama. Antara lain Data jumlah unit usaha tiap kluster, Data jumlah tenaga kerja tiap kluster, Data nilai produksi tiap kluster, Data persebaran wilayah kluster.	30% capaian. Pembuatan Sistem Informasi berupa Website untuk menampilkan data kluster industri kreatif. Website dapat menampilkan infografis yang menarik dan interaktif.	50% capaian. Website dapat menampilkan Peta persebaran wilayah kluster industri kreatif batik, yang mencakup lokasi sentra industri, pasar batik, kampung wisata batik, sentra kuliner ikan, dan Pusat Inovasi atau Museum Batik.	75% capaian. Website menyediakan fitur Forum Online untuk diskusi mengenai kluster industri kreatif. Layanan Website dapat diakses pada aplikasi mobile berbasis Android atau iOS.	100% capaian. Kota Pekalongan memiliki Website industri kreatif, yang terkoneksi dengan website Marketplace Digital industri kreatif.	Dinperinaker
Mengembangkan Marketplace Digital untuk Produk Industri Kreatif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Fitur Promosi dan Pemasaran pada Website Marketplace Digital dan Layanan Cyber UMKM	15% capaian Peningkatan Fitur. Website didesain secara interaktif untuk mempermudah UMKM Batik memasarkan produknya.	30% capaian Peningkatan Fitur. Website menyediakan link menuju toko online milik UMKM Batik, baik melalui Lokapasar Batik ataupun Toko Online.	50% capaian Peningkatan Fitur. Website menyediakan fitur pembelian langsung di website (layanan e-commerce), sebagai pengembangan dari Lokapasar Batik.	75% capaian Peningkatan Fitur. Website menyediakan Forum Konsultasi Pemasaran Digital bagi UMKM.	100% capaian Peningkatan Fitur. Pekalongan telah memiliki satu website yang mengintegrasikan marketplace digital dan	Dindagkop UKM

Strategi		: Penguatan Klaster Industri						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi Dan Bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab / OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Layanan Cyber UMKM. Website dikelola oleh tenaga profesional, tidak tergantung Pemda.	
Mengembangkan Marketplace Digital untuk Produk Industri Kreatif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memanfaatkan Website Marketplace Digital untuk memasarkan produknya	10 UMKM Batik telah memanfaatkan Website Marketplace Digital 10 UMKM Batik telah diberikan pelatihan pemasaran digital.	20 UMKM Batik batik telah memanfaatkan Website Marketplace Digital 20 UMKM Batik telah diberikan pelatihan pemasaran digital.	30 UMKM Batik telah memanfaatkan Website Marketplace Digital 30 UMKM Batik telah diberikan pelatihan pemasaran digital.	40 UMKM Batik telah memanfaatkan Website Marketplace Digital 40 UMKM Batik telah diberikan pelatihan pemasaran digital.	50 UMKM Batik telah memanfaatkan Website Marketplace Digital 50 UMKM Batik telah diberikan pelatihan pemasaran digital.	Dindagkop UKM
Melakukan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif	10% lokasi pusat aktivitas klaster industri kreatif sudah dilakukan Pengembangan dan Revitalisasi	25% lokasi pusat aktivitas klaster industri kreatif sudah dilakukan Pengembangan dan Revitalisasi	50% lokasi pusat aktivitas klaster industri kreatif sudah dilakukan Pengembangan dan Revitalisasi	75% lokasi pusat aktivitas klaster industri kreatif sudah dilakukan Pengembangan dan Revitalisasi	100% lokasi pusat aktivitas klaster industri kreatif sudah dilakukan Pengembangan dan Revitalisasi	Bappeda

Strategi		: Penguatan Kluster Industri						
Arah Kebijakan		: Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (Iptekin)/atau penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagai sumber Iptekin bagi pengembangan kluster	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah forum diskusi koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan lembaga litbang	1 FGD pemetaan peran serta Perguruan Tinggi dan lembaga litbang dalam memperkuat rantai nilai kluster	1 FGD pemetaan peran serta Perguruan Tinggi dan lembaga litbang dalam memperkuat rantai nilai kluster	1 FGD penyusunan usulan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga litbang lain yang potensial bagi penguatan rantai nilai kluster	1 FGD penyampaian usulan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga litbang lain yang potensial bagi penguatan rantai nilai kluster	1 FGD evaluasi hasil kerja sama Iptekin dengan Perguruan Tinggi dan lembaga litbang	Bappeda
Meningkatkan keterlibatan asosiasi bisnis dan komunitas bagi pengembangan kluster	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah forum pertemuan sebagai sarana bagi asosiasi bisnis dan komunitas untuk menyampaikan masukan terkait pengembangan kluster	1 Forum pertemuan, Hasil pelaksanaan pertemuan dimasukkan ke website agar dapat diakses oleh publik.	1 Forum pertemuan	2 Forum pertemuan	2 Forum pertemuan	2 Forum pertemuan	Bappeda

Strategi		: Penguatan Kluster Industri						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kemandirian UMKM Batik untuk menjual produk di pasaran ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelatihan Ekspor yang diikuti UMKM Batik melalui kerja sama dengan PPEI Kemendag.	10 UMKM Batik mengikuti 8 sesi pelatihan ekspor sesuai silabus program diklat PPEI Kemendag.	15 UMKM Batik mengikuti 8 sesi pelatihan ekspor sesuai silabus program diklat PPEI Kemendag.	20 UMKM Batik mengikuti 8 sesi pelatihan ekspor sesuai silabus program diklat PPEI Kemendag.	25 UMKM Batik mengikuti 8 sesi pelatihan ekspor sesuai silabus program diklat PPEI Kemendag.	30 UMKM Batik mengikuti 8 sesi pelatihan ekspor sesuai silabus program diklat PPEI Kemendag.	Dindagkop UKM
Meningkatkan Kemandirian UMKM Batik untuk menjual produk di pasaran ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah pertemuan dan kerja sama yang dilakukan untuk membuka akses pemasaran ekspor.	1 Forum Kerja sama dengan Free Trade Agreement (FTA) Center Kemendag RI (misalnya FTA Center Semarang).	1 Forum Diskusi yang mengundang stakeholders terkait pemasaran ekspor	1 Forum Diskusi perancangan strategi pemasaran melalui ekspor	1 Forum Diskusi perancangan strategi pemasaran melalui ekspor	1 Forum Diskusi untuk Evaluasi Progress pelaksanaan pemasaran melalui ekspor.	Dindagkop UKM
Mendorong Kerja Sama untuk Pembangunan Material Center dan Sistem Pengadaan Bahan Baku Batik	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah pertemuan dalam rangka kerja sama pengadaan bahan baku batik.	1 Forum Kerja Sama dengan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, penyedia jasa logistik, perbankan, koperasi, dan UMKM.	1 Forum Diskusi untuk memetakan Model Bisnis pengadaan bahan baku batik dan peran setiap stakeholders.	1 Forum Diskusi membahas pengelolaan dan kelembagaan Material Center dan Rencana Bisnis.	1 Forum Diskusi untuk Sosialisasi Sistem Pengadaan Bahan Baku Batik.	1 Forum Diskusi untuk Evaluasi Penerapan Sistem Pengadaan dan Material Center Bahan Baku Batik.	Dinperinaker

Strategi		: Penguatan Klaster Industri						
Arah Kebijakan		: Mendorong Budaya Inovasi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Memperkuat branding dan kerja sama bisnis di bidang industri batik	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Capaian untuk Upaya Penguatan Branding dan Kerja Sama Bisnis	15% capaian, melalui pelaksanaan forum diskusi oleh Pokja Klaster Industri Kreatif untuk merancang upaya penguatan branding produk batik dan kerja sama bisnis.	30% capaian, melalui Pengumpulan Testimoni kualitas batik dari pelaku usaha atau pengunjung/pembeli pada setiap event pameran.	50% capaian, Testimoni kualitas batik dibuat sebagai materi promosi yang menarik, baik untuk brosur, standing banner, maupun materi promosi digital di website dan media sosial.	75% capaian, Kerja sama bisnis yang terjadi selama event pameran atau temu bisnis didokumentasikan sebagai bahan untuk pembuatan materi promosi.	100% capaian. Seluruh testimoni dan kerja sama bisnis ditampilkan dalam media yang mudah diakses oleh publik.	Dindagkop UKM
Memperkuat branding dan kerja sama bisnis di bidang industri batik	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah pameran dan temu bisnis yang dirancang efektif dalam memperkuat kerja sama bisnis untuk produk batik	5 pameran dan temu bisnis	5 pameran dan temu bisnis	5 pameran dan temu bisnis	5 pameran dan temu bisnis	5 pameran dan temu bisnis	Dindagkop UKM
Mengembangkan kreasi masakan olahan ikan yang unik dan bernilai jual tinggi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah event lomba kreasi masakan olahan ikan	1 event lomba kreasi masakan olahan ikan	1 event lomba kreasi masakan olahan ikan	1 event lomba kreasi masakan olahan ikan	2 event lomba kreasi masakan olahan ikan	2 event lomba kreasi masakan olahan ikan	Dinparbudpora
Meningkatkan kapasitas SDM pengrajin batik sesuai standar SKKNI	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengrajin	1 Pelatihan Perancangan Motif Batik	1 Pelatihan Perancangan Motif Batik	1 Pelatihan Perancangan Motif Batik	1 Pelatihan Perancangan Motif Batik	1 Pelatihan Perancangan Motif Batik	Dinperinaker

Strategi		: Penguatan Klaster Industri							
Arah Kebijakan		: Mendorong Budaya Inovasi							
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		batik sesuai standar SKKNI, bekerjasama dengan LSPro BBKB Kemenperin	1 Pelatihan Pembuatan Batik Cap 1 Pelatihan Pembuatan Batik Tulis 1 Pelatihan Pewarnaan Batik 1 Pelatihan Pembuatan Canting	1 Pelatihan Pembuatan Batik Cap 1 Pelatihan Pembuatan Batik Tulis 1 Pelatihan Pewarnaan Batik 1 Pelatihan Pembuatan Canting	1 Pelatihan Pembuatan Batik Cap 1 Pelatihan Pembuatan Batik Tulis 1 Pelatihan Pewarnaan Batik 1 Pelatihan Pembuatan Canting	1 Pelatihan Pembuatan Batik Cap 1 Pelatihan Pembuatan Batik Tulis 1 Pelatihan Pewarnaan Batik 1 Pelatihan Pembuatan Canting	1 Pelatihan Pembuatan Batik Cap 1 Pelatihan Pembuatan Batik Tulis 1 Pelatihan Pewarnaan Batik 1 Pelatihan Pembuatan Canting	1 Pelatihan Pembuatan Batik Cap 1 Pelatihan Pembuatan Batik Tulis 1 Pelatihan Pewarnaan Batik 1 Pelatihan Pembuatan Canting	
Meningkatkan kapasitas SDM pemasaran digital produk batik	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pembuatan konten promosi batik dan pengelolaan website untuk pemasaran	2 kali pelatihan Pembuatan konten foto dan video untuk promosi produk batik 2 kali pelatihan desain website (desain user interface dan user experience)	2 kali pelatihan Pembuatan konten foto dan video untuk promosi produk batik 2 kali pelatihan desain website (desain user interface dan user experience)	2 kali pelatihan Pembuatan konten foto dan video untuk promosi produk batik 2 kali pelatihan pengelolaan website dan media sosial untuk pemasaran produk	2 kali pelatihan Pembuatan konten foto dan video untuk promosi produk batik 2 kali pelatihan pengelolaan website dan media sosial untuk pemasaran produk	2 kali pelatihan Pembuatan konten foto dan video untuk promosi produk batik 2 kali pelatihan pengelolaan website dan media sosial untuk pemasaran produk	Dinparbudpora	

Strategi		: Penguatan Klaster Industri						
Arah Kebijakan		: Mendorong Budaya Inovasi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kapasitas pelaku usaha kuliner olahan ikan dalam memenuhi standar halal dan standar produk pangan SPP-IRT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah pelaku usaha kuliner olahan ikan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pemenuhan standar halal	15 Pelaku usaha kuliner olahan ikan didampingi oleh Pemda dan Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan persyaratan sertifikasi halal MUI/Kemenag dan Sistem Jaminan Halal (SJH).	5 Pelaku usaha dapat melengkapi seluruh persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal MUI/Kemenag.	10 Pelaku usaha dapat melengkapi seluruh persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal MUI/Kemenag	15 Pelaku usaha dapat mempromosikan produk atau layanan yang sudah berstandar halal untuk meningkatkan nilai tambah produk, misalnya melalui poster/brosur, dan media sosial.	15 Pelaku usaha dapat mempromosikan produk atau layanan yang sudah berstandar halal untuk meningkatkan nilai tambah produk, misalnya melalui poster/brosur, dan media sosial.	Dindagkop UKM
Meningkatkan Kapasitas pelaku usaha kuliner olahan ikan dalam memenuhi standar halal dan standar produk pangan SPP-IRT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah pelaku usaha kuliner olahan ikan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan pemenuhan standar produk pangan SPP-IRT	5 Pelaku usaha kuliner olahan ikan memperoleh SPP-IRT	5 Pelaku usaha kuliner olahan ikan memperoleh SPP-IRT	5 Pelaku usaha kuliner olahan ikan memperoleh SPP-IRT	5 Pelaku usaha kuliner olahan ikan memperoleh SPP-IRT	5 Pelaku usaha kuliner olahan ikan memperoleh SPP-IRT	Dindagkop UKM

Strategi		: Penguatan Kluster Industri						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan peran pokja kluster dalam penguatan rantai nilai kluster industri kreatif	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Forum Diskusi Kelitbangan yang membahas Kebijakan terkait Kluster Industri	1 Forum Diskusi Sosialisasi Perda RPIK	1 Forum Diskusi Inisiasi Perwal mengenai teknis pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 untuk mengatasi kendala penyediaan bahan baku.	1 Forum Diskusi Inisiasi Pembaharuan Keputusan Walikota mengenai penetapan Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan			Dinperinaker
Meningkatkan peran pokja kluster dalam penguatan rantai nilai kluster industri kreatif	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah pertemuan FGD Koordinasi Kelitbangan Pokja untuk menyelesaikan permasalahan rantai nilai kluster	1 kali pertemuan membahas tren produk batik yang digemari oleh pasar saat ini 1 kali pertemuan untuk membahas kerja sama bisnis penyediaan bahan baku batik antara pemasok bahan baku, logistik, dan pengrajin batik.	1 kali pertemuan membahas strategi peningkatan kualitas produk batik agar dapat bersaing 1 kali pertemuan untuk membahas kerja sama bisnis penyediaan bahan baku pemasok bahan baku, logistik, dan pengrajin batik.	1 kali pertemuan membahas strategi peningkatan kualitas produk batik agar dapat bersaing 1 kali pertemuan membahas pemanfaatan Material Center bahan baku batik.	1 kali pertemuan membahas strategi promosi batik yang efektif, baik secara offline melalui pameran, maupun secara online di website dan media sosial.	1 kali pertemuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas produk batik yang sudah dilaksanakan	Dinperinaker

Strategi		: Penguatan Kluster Industri						
Arah Kebijakan		: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan pemanfaatan marketplace global untuk pemasaran batik	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang memanfaatkan marketplace global (etsy.com, amazon.com, alibaba.com, dll)	5 UMKM telah memanfaatkan marketplace global untuk pemasaran	10 UMKM telah memanfaatkan marketplace global untuk pemasaran	15 UMKM telah memanfaatkan marketplace global untuk pemasaran	20 UMKM telah memanfaatkan marketplace global untuk pemasaran	25 UMKM telah memanfaatkan marketplace global untuk pemasaran	Dindagkop UKM
Memperkuat branding produk batik melalui pendampingan HKI Merk dengan Labelisasi Batikmark “Batik Indonesia”.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk UMKM yang didampingi untuk mengajukan HKI melalui Labelisasi Batikmark “Batik Indonesia”.	10% produk UMKM didampingi untuk mengajukan HKI	25% produk UMKM didampingi untuk mengajukan HKI	50% produk UMKM didampingi untuk mengajukan HKI	75% produk UMKM didampingi untuk mengajukan HKI	100% produk UMKM didampingi untuk mengajukan HKI	Dinperinaker
Meningkatkan pemenuhan SKKNI agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasaran global	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase SDM pengrajin batik/canting yang tersertifikasi pada 5 kategori kompetensi (melalui Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi)	10% SDM pengrajin batik sudah tersertifikasi SKKNI	25% SDM pengrajin batik sudah tersertifikasi SKKNI	50% SDM pengrajin batik sudah tersertifikasi SKKNI	75% SDM pengrajin batik sudah tersertifikasi SKKNI	100% SDM pengrajin batik sudah tersertifikasi SKKNI	Dinperinaker

Strategi		: Penguatan Kluster Industri						
Arah Kebijakan		: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mengembangkan produk unggulan yang ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase UMKM yang sudah menerapkan standar produksi bersih, berdasarkan hasil audit Penerapan Produksi Bersih.	10% UMKM sudah menerapkan standar produksi bersih	25% UMKM sudah menerapkan standar produksi bersih	50% UMKM sudah menerapkan standar produksi bersih	75% UMKM sudah menerapkan standar produksi bersih	100% UMKM sudah menerapkan standar produksi bersih	Dinperinaker
Membuat konten promosi terkait pemenuhan standar untuk memberi nilai tambah di pasar global	Program Pengembangan UMKM	Jumlah konten promosi yang ditampilkan di website dan media sosial	1 konten promosi mengenai pemenuhan SKKNI, HKI, dan ramah lingkungan	1 konten promosi mengenai pemenuhan SKKNI, HKI, dan ramah lingkungan	1 konten promosi mengenai pemenuhan SKKNI, HKI, dan ramah lingkungan	1 konten promosi mengenai pemenuhan SKKNI, HKI, dan ramah lingkungan	1 konten promosi mengenai pemenuhan SKKNI, HKI, dan ramah lingkungan	Dindagkop UKM

7.3 Pilar Jaringan Inovasi

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menyusun Studi Kelayakan, Masterplan dan Detail Engineering Design Pusat Inovasi Budaya Batik (PIBB)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dokumen Studi Kelayakan PIBB	Tersusunnya Studi Kelayakan PIBB	Implementasi Studi Kelayakan PIBB	-	-	-	Bappeda

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menyusun Rencana Aksi Technopark Perikanan Pekalongan	Program Pengembangan Pengolahan Perikanan	Dokumen Rencana Aksi TP Perikanan Pekalongan	Tersusunnya Rencana Aksi TP Perikanan Pekalongan	Implementasi Rencana Aksi TP Perikanan Pekalongan	Implementasi Rencana Aksi TP Perikanan Pekalongan	Implementasi Rencana Aksi TP Perikanan Pekalongan	Implementasi Rencana Aksi TP Perikanan Pekalongan	DKP
Menyusun Rencana Aksi Museum Batik	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Dokumen Rencana Aksi Museum Batik	Tersusunnya Rencana Aksi Museum Batik	Implementasi Rencana Aksi TP Museum Batik	Implementasi Rencana Aksi TP Museum Batik	Implementasi Rencana Aksi TP Museum Batik	Implementasi Rencana Aksi TP Museum Batik	Disparbudpora
Membentuk lembaga pengelola Pusat Inovasi Budaya Batik	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Industri Kota	Lembaga pengelola PIBB terbentuk	Ada Lembaga Pengelola PIBB	Lembaga Pengelola PIBB berfungsi	Lembaga Pengelola PIBB berfungsi	Lembaga Pengelola PIBB berfungsi	Lembaga Pengelola PIBB berfungsi	Dinas Perindustrian dan TK
Membangun Pusat Inovasi Budaya Batik	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Industri Kota	PIBB terbangun	Pembangunan PIBB	Pembangunan PIBB	PIBB berfungsi	PIBB berfungsi	PIBB berfungsi	Dinas Perindustrian dan TK
Pengembangan Sarana Prasarana TP Pekalongan	Program Pembangunan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung/ Bangunan	Sarana Prasarana TP Pekalongan terbangun	Pembangunan Sarana Prasarana TP Pekalongan	Pembangunan Sarana Prasarana TP Pekalongan	Sarana Prasarana TP Pekalongan berfungsi	Sarana Prasarana TP Pekalongan berfungsi	Sarana Prasarana TP Pekalongan berfungsi	DKP
Pengembangan Sarana Prasarana Museum Batik	Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Sarana Prasarana Museum Batik terbangun	Pembangunan Sarana Prasarana Museum Batik	Pembangunan Sarana Prasarana Museum Batik	Sarana Prasarana Museum Batik berfungsi	Sarana Prasarana Museum Batik berfungsi	Sarana Prasarana Museum Batik berfungsi	Disparbudpora
Penyelenggaraan layanan di TP Pekalongan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan	Layanan intermediasi teknologi,	Adanya Layanan intermediasi	Adanya Layanan intermediasi teknologi,	Adanya Layanan intermediasi	Adanya Layanan intermediasi	Adanya Layanan intermediasi	DKP

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bantuan APBD, APBD Provinsi, APBN	Bantuan APBD, APBD Provinsi, APBN	Bantuan APBD, APBD Provinsi, APBN	Bantuan APBD, APBD Provinsi, APBN	Bantuan APBD, APBD Provinsi, APBN	Bantuan APBD, APBD Provinsi, APBN	
Penyelenggaraan layanan di Museum Batik	Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Adanya Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Adanya Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Adanya Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Adanya Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Adanya Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Disparbudpora
Penyelenggaraan layanan di Pusat Inovasi Budaya Batik	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Industri Kota	Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	-	Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Layanan intermediasi teknologi, konsultasi HKI, fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan	Dinas Perindustrian dan TK
Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan tentang ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kajian Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	Disparbudpora

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Pekalongan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen	Bappeda

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Memperkuat kelembagaan tim koordinasi dan daya dukung Iptekin dari Lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Iptek strategis daerah dan industri						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengembangan SDM Pengelola Technopark	Program Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah training SDM (tingkat lokal, regional, nasional, internasional) 2021-2025 : Tingkat Lokal, Regional, Nasional kali kali kali kali kali	DKP
Pengembangan SDM Pengelola Museum Batik	Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah training SDM (tingkat lokal, regional, nasional, internasional) kali kali kali kali kali	Disparbudpora
Pengembangan SDM Pengelola PIBB	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana	Jumlah training SDM (tingkat lokal, regional, kali kali kali kali kali	Dinas Perindustrian dan TK

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Memperkuat kelembagaan tim koordinasi dan daya dukung Iptekin dari Lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Iptek strategis daerah dan industri						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	nasional, internasional)						
Pemanfaatan hasil penelitian dari universitas, lembaga penelitian dan komunitas oleh Technopark	Program Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pemanfaatan hasil penelitian Universitas, lembaga penelitian dan komunitas yang dimanfaatkan oleh Technopark	2	2	2	2	2	DKP
Pemanfaatan hasil penelitian dari universitas, lembaga penelitian dan komunitas oleh Museum Batik	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pemanfaatan hasil penelitian Universitas, lembaga penelitian dan komunitas yang dimanfaatkan oleh Museum Batik						Disparbudpora
Pemanfaatan hasil penelitian dari universitas, lembaga penelitian dan komunitas oleh PIBB	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pemanfaatan hasil penelitian Universitas, lembaga penelitian dan komunitas						Dinas Perindustrian dan TK

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Memperkuat kelembagaan tim koordinasi dan daya dukung Iptekin dari Lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Iptek strategis daerah dan industri						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		yang dimanfaatkan oleh PIBB						

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkandifusi inovasi, hasil litbangyasa						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerjasama Technopark dengan K/L, Perguruan Tinggi, lembaga IPTEKIN dan pelaku bisnis terkait pengembangan, ekonomi kreatif	Program Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kerjasama skala lokal	2 kali	2 kali	2 kali	2kali	2 kali	DKP
		Jumlah kerjasama skala regional	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1kali	
		Jumlah kerjasama skala nasional	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
		Jumlah kerjasama skala internasional kali kali kali kali kali	Belum
Kerjasama Museum Batik dengan K/L, Perguruan Tinggi,	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah kerjasama skala lokal kali kali kali kali kali	Disparbudpora

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, hasil litbangyasa						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
lembaga IPTEKIN dan pelaku bisnis terkait pengembangan, ekonomi kreatif	Manusia Permuseuman							
		Jumlah kerjasama skala regional kali kali kali kali kali	
		Jumlah kerjasama skala nasional kali kali kali kali kali	
		Jumlah kerjasama skala internasional kali kali kali kali kali	
Kerjasama PIBB dengan K/L, Perguruan Tinggi, lembaga IPTEKIN dan pelaku bisnis terkait pengembangan, ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kerjasama skala lokal kali kali kali kali kali	Dinas Perindustrian dan TK
		Jumlah kerjasama skala regional kali kali kali kali kali	
		Jumlah kerjasama skala nasional kali kali kali kali kali	
		Jumlah kerjasama skala internasional kali kali kali kali kali	

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Mendorong budaya inovasi di lingkungan Pendidikan menengah, aparat Pemkab dan Masyarakat.						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pembelajaran inovasi kepada masyarakat dan komunitas ekonomi kreatif (Technopark)	Program Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan terkait pengolahan ikan	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	DKP
Pembelajaran inovasi kepada masyarakat dan komunitas ekonomi kreatif (Museum Batik)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan terkait "Kriya" (batik) kali kali kali kali kali	Disparbudpora
Pembelajaran inovasi kepada masyarakat dan komunitas ekonomi kreatif	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelatihan terkait "Kriya" (batik) kali kali kali kali kali	Dinas Perindustrian dan TK
Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di Technopark	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Para Pelaku sub sektor Ekonomi Kreatif (Kuliner) Masyarakat yang dibina	5 orang	5 orang	5 orang	5 . orang	5 orang	DKP
Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di Museum Batik	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Para Pelaku sub sektor Ekonomi Kreatif (Kriya) Masyarakat yang dibina orang orang orang orang orang	Disparbudpora

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Mendorong budaya inovasi di lingkungan Pendidikan menengah, aparat Pemkab dan Masyarakat.						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di PIBB	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha baru yang mengikuti pelatihan orang orang orang orang orang	Dinas Perindustrian dan TK

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerjasama antar daerah/dengan pusat terkait pengembangan Technopark, Museum Batik, PIBB dan Ekonomi Kreatif	Program Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama skala lokal kali kali kali kali kali	Setda
	Program Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama skala Regional kali kali kali kali kali	
	Program Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama skala Nasional kali kali kali kali kali	
	Program Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah kerjasama skala Internasional kali kali kali kali kali	

Strategi		: Pengembangan Jaringan inovasi						
Arah Kebijakan		: Melakukan Penyelarasan dengan perkembangan global						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Menyelenggarakan/ mengikuti forum di tingkat Internasional khususnya terkait lingkungan	Program peningkatan kerjasama Internasional	Jumlah penyelenggaraan/ mengikuti forum tingkat internasional kali kali kali kali kali	DKP Belum
	Program peningkatan kerjasama Internasional	Jumlah penyelenggaraan/ mengikuti forum tingkat internasional kali kali kali kali kali	Disparbudpora
	Program peningkatan kerjasama Internasional	Jumlah penyelenggaraan/ mengikuti forum tingkat internasional kali kali kali kali kali	Dinas Perindustrian dan TK

7.4 Pilar Teknopreneur

Strategi		: Pengembangan Teknopreneur						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pembenahan Data Pelaku UMKM	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Tersedianya system database pelaku UMKM termasuk PPBT	Melakukan kajian Satu Data	Terbangunnya Database pelaku UMKM melalui Satu Data	Terbangunnya Database digital UMKM melalui Satu Data	Terbangunnya database online	Sistem Database online	Dindagkop UMKM
		Jumlah Usaha Mikro yang memiliki izin usaha	2 kali sosialisasi izin usaha	25% tekopreneur punya izin usaha	50%	75%	100%	Dindagkop UMKM

Strategi		: Pengembangan Teknopreneur						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengembangan Inkubator Bisnis	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terbitnya landasan legal pengelolaan inkubator	Naskah Akademis tentang peraturan inkubator daerah	Perwali tentang inkubator daerah	-	-	-	Dinperinaker
		Terbentuknya inkubator baru		1 inkubator	-	-	-	Dinperinaker
		Tersusunnya pengelola incubator		1 pengelola	-	-	-	Dinperinaker
		Terlaitahnya pengelola incubator (kali/tahun)		1 batch pelatihan	-	-	-	"Dinperinaker
Pembenahan Data Pelaku UMKM	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Tersedianya system database pelaku UMKM termasuk PPBT	Melakukan kajian Satu Data	Terbangunnya Database pelaku UMKM melalui Satu Data	Terbangunnya Database digital UMKM melalui Satu Data	Terbangunnya database online	Sistem Database online	Dindagkop UMKM
Pengembangan Sarana dan Prasarana Inkubator	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terpenuhinya sarana dan prasarana inkubator usaha	-	Terpenuhinya sarana dan prasarana inkubator yang lengkap	-	-		Dinperinaker
Pelaksanaan inkubasi bisnis berbasis teknologi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya pra inkubasi	1 kali Talent scouting dan technopreneur camp	1 kali Talent scouting dan technopreneur camp	1 kali Talent scouting dan technopreneur camp	1 kali Talent scouting dan technopreneur camp	1 kali Talent scouting dan technopreneur camp	Dinperinaker
		Terlaksananya proses inkubasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinperinaker
		Jumlah PPBT yang graduate	-	5	5	5	5	Dinperinaker
Pengembangan Insentif Pengembangan Teknopreneur	Program pengembangan umkm	Jumlah UMKM inovatif yang mendapat insentif/kemudahan	10	10	10	10	10	Dindagkop UMKM

Strategi		: Pengembangan Teknopreneur						
Arah Kebijakan		: Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEKIN/atau LITBANGJIRAP serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, khususnya UMKM						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peningkatan SDM pendamping Teknopreneur	Program pengembangan umkm	Jumlah pendamping tekno-preneur	2 orang pegawai pemda	2 orang pegawai pemda	2 orang pegawai pemda	2 orang pegawai pemda	2 orang pegawai pemda	Dindagkop UMKM
			2 orang akademisi	2 orang akademisi	2 orang akademisi	2 orang akademisi	2 orang akademisi	Dindagkop UMKM
			2 orang pelaku bisnis	2 orang pelaku bisnis	2 orang pelaku bisnis	2 orang pelaku bisnis	2 orang pelaku bisnis	Dindagkop UMKM
Peningkatan absorpsi inovasi oleh Teknopreneur	Program pengembangan umkm	Jumlah transfer teknologi melalui pelatihan dan pendampingan teknis tekno-preneur	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Dindagkop UMKM

Strategi		: Pengembangan Teknopreneur						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerjasama untuk pengembangan Teknopreneur	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Kerjasama dengan pemerintah pusat	1	1	1	1	1	Setda
		Jumlah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain	2	2	2	2	2	Setda
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama pelaku tekno-preneur dengan pihak ketiga	1	2	2	2	2	Setda

Strategi		: Pengembangan Teknopreneur						
Arah Kebijakan		: Mendorong Budaya Inovasi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Promosi Kewirausahaan berbasis teknologi	Program pengembangan umkm	Peningkatan jumlah pelaku teknopreneur	10%	10%	10%	10%	10%	Dindagkop
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Sosialisasi inkubator bisnis di perguruan tinggi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinperinaker
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Terselenggaranya Lomba inovasi UMKM pemuda	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Disbudparpora

Strategi		: Pengembangan Teknopreneur						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Identifikasi usaha inovatif berbasis unggulan daerah	Program pengembangan umkm	Jumlah usaha inovatif berbasis unggulan daerah	5	10	10	10	10	Dindagkop UMKM
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Peraturan Walikota atau peraturan daerah sebagai turunan kebijakan nasional tentang pengembangan teknopreneur	-	1	1	1	1	Setda

Strategi		: Pengembangan Teknopreneur						
Arah Kebijakan		: Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengembangan produk ramah lingkungan di UMKM	Program pengembangan umkm	Jumlah sosialisasi ke UMKM tentang produk ramah lingkungan	1	1	1	1	1	Dindagkop UMKM
		Jumlah UMKM yang didampingi tentang produk ramah lingkungan	-	5	10	15	20	Dindagkop UMKM
		Rasio UMKM inovatif yang memiliki standar 14000 (% dari jumlah UMKM)	-	0,01	0,02	0,05	0,05	Dindagkop UMKM
Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual UMKM	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Prosentase Hak Merek milik UMKM dari jumlah palaku UMKM	0,01	0,02	0,02	0,04	0,05	Dinparbudpora
		Prosentase Hak Cipta milik UMKM dari jumlah palaku UMKM	0,01	0,04	0,06	0,07	0,1	Dinparbudpora

7.5 Pilar Tematik Daerah

Strategi		: Mengembangkan Tematik Daerah (Pengembangan TIK)						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis pengembangan TIK						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan validitas basis data tentang TIK (sesuai dengan <i>statistics ITU-UN</i>)	Program Pengelolaan data dan komunikasi publik (2.16.02) Program Litbang daerah (5.05.02)	Data bidang TIK yang terintegrasi	Sosialisasi konten data TIK	Penyusunan dan uji coba instrumen	Pengumpulan dan validasi data	Updating dan penyajian data	Data tersaji di website secara berkelanjutan	Dinkominfo Bappeda
Mengaktifkan website dan optimalisasi pemanfaatannya	Program Pengelolaan aplikasi informasi (2.16.03)	Jumlah website yang aktif dan optimal pemanfaatannya	13	16	20	25	31	Dinkominfo
Menyusun dokumen kebijakan terkait pengembangan TIK	Program Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (5.01.02)	Jumlah Perda, Perwal, dan turunannya	Perda SPBE 1 SOP Smartcity 1	Perwal SPBE 1 Sosialisasi 1	SOP SPBE 1 Sosialisasi 1	Sosialisasi 1	Perda, Perwal, SOP terimplementasi	Bappeda
Menyusun dan implementasi dokumen perencanaan pengembangan TIK (masterplan smartcity dan SPBE)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (5.05.02)	Jumlah masterplan dan jumlah yang terimplementasi	Implementasi masterplan smartcity Tersusun masterplan SPBE	Implementasi masterplan smartcity Implementasi masterplan SPBE	Implementasi masterplan smartcity Implementasi masterplan SPBE	Implementasi masterplan smartcity Implementasi masterplan SPBE	Implementasi masterplan smartcity Implementasi masterplan SPBE	Bappeda
Membentuk dan penguatan kelembagaan pengelola TIK (SPBE, dan Smart City)	Program Pengelolaan aplikasi informasi (2.16.03)	Jumlah lembaga, jumlah penguatan lembaga	Jumlah lembaga 2	Jumlah lembaga 2 Jumlah penguatan lembaga 2	Jumlah lembaga 2 Jumlah penguatan lembaga 2	Jumlah lembaga 2 Jumlah penguatan lembaga 2	Jumlah lembaga 2 Jumlah penguatan lembaga 2	Din Kominfo

Strategi		: Mengembangkan Tematik Daerah (Pengembangan TIK)						
Arah Kebijakan		: Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis pengembangan TIK						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK	Program penyelenggaraan statistik sektoral (2.20.02)	Data kebutuhan perbaikan dan pengadaan infrastruktur TIK % infrastruktur diperbaiki/ diadakan	Data rencana perbaikan dan pengadaan tersusun Perbaikan 10	Perbaikan 25 Pengadaan 10	Perbaikan 45 Pengadaan 40	Perbaikan 70 Pengadaan 70	Perbaikan 100 Pengadaan 100	Din Kominfo

Strategi		: Mengembangkan Tematik Daerah (Pengembangan TIK)						
Arah Kebijakan		: Meningkatkan Kapasitas dan Peran Lembaga Iptekin dalam menangani masalah pengembangan TIK						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga Litbangjirap terkait dengan TIK secara berkesinambungan	Program Pengelolaan aplikasi informasi (2.16.03)	Jumlah kerjasama	1	2	3	4	5	Din Kominfo
Meningkatkan dokumentasi dan kualitas kerjasama dg komunitas yg ada	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (5.05.02)	% komunitas TIK yang teregistrasi Jumlah kerjasama dengan komunitas TIK	10 1	30 2	60 3	70 4	100 5	Bappeda
Meningkatkan kemampuan SDM di bidang TIK	Program pengembangan SDM	Data jumlah SDM bidang TIK dan kebutuhan peningkatan kemampuan di bidang TIK % SDM bidang TIK yang mengikuti Diklat TIK (tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional)	Tersusunnya data jumlah SDM bidang TIK dan kebutuhan peningkatan kemampuan di bidang TIK	10	30	60	100	Din Kominfo

Strategi		: Mengembangkan Tematik Daerah (Pengembangan TIK)						
Arah Kebijakan		: Meningkatkan interaksi antar Lembaga Iptekin dengan Pemda dan Masyarakat dalam menangani masalah pengembangan TIK						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kolaborasi pengembangan TIK	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (5.05.02)	Jumlah program kolaborasi dengan aktor inovasi (ABGCM) untuk pengembangan TIK	1	2	3	4	5	Bappeda

Strategi		: Mengembangkan Tematik Daerah (Pengembangan TIK)						
Arah Kebijakan		: Membangun Budaya Inovasi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kemampuan SDM pengelola TIK	Program pengembangan SDM (5.04.02)	Data jumlah SDM pengelola TIK dan kebutuhan peningkatan kemampuan di bidang TIK % SDM pengelola TIK yang mengikuti Diklat bidang TIK (tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional)	Tersusunnya data jumlah SDM pengelola TIK dan kebutuhan peningkatan kemampuan di bidang TIK	10	30	60	100	Din kominfo

Strategi		: Mengembangkan Tematik Daerah (Pengembangan TIK)						
Arah Kebijakan		: Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan/ koherensi						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan koordinasi dan koherensi program bidang TIK dengan provinsi dan K/L pusat	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (5.05.02)	Data kebutuhan koordinasi dan koherensi program bidang TIK dengan provinsi dan K/L pusat % realisasi koordinasi dan koherensi program bidang TIK dengan provinsi dan K/L pusat	Tersusunnya Data kebutuhan koordinasi dan koherenai program bidang TIK dengan provinsi dan K/L pusat	10	30	60	100	Bappeda

Strategi		: Mengembangkan Tematik Daerah (Pengembangan TIK)						
Arah Kebijakan		: Penyelarasan perkembangan global						
Judul Kegiatan SIDA	Program RPJMD	Indikator Kegiatan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Penanggung Jawab/OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang berstandar	Program Pengelolaan aplikasi informasi (2.16.02)	Data kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang berstandar % realisasi pemenuhan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang berstandar	Tersusunnya a data kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang berstandar	10	30	60	100	Din kominfo

7.6 Ilustrasi Program Kolaborasi/ Cross Cutting melalui Program Pengembangan Kriya Batik dan Kuliner Olahan Ikan

Berdasarkan Bab VII Rencana Aksi Roadmap Penguatan SIDA Kota Pekalongan, ada sebuah agenda/ program kolaborasi yang direncanakan yaitu Pengembangan Kriya Batik dan Kuliner Olahan Ikan.

Untuk mewujudkan SIDA sebagai akselerator tercapainya *Pembangunan Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah*, maka semua agenda / program kolaborasi yang tertuang di Bab VII Roadmap Penguatan SIDA, harus diimplementasikan.

Sebagai ilustrasi Program Kolaborasi/*Cross Cutting Program*, disajikan dalam Gambar 7.1 berikut ini, yaitu Program Pengembangan Kriya Batik dan Kuliner Olahan Ikan :

Program kolaborasi sebenarnya sudah dipraktekkan di daerah dengan sebutan *cross cutting program*. Program *cross cutting* secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh lintas sektoral/ lintas organisasi perangkat daerah (OPD) pada sebuah lokus dan focus yang sama. Program *cross cutting* yang berbasis sistem inovasi daerah (SIDa) Kota Pekalongan, sesuai dengan Roadmap Penguatan SIDa Kota Pekalongan, mengambil tema *Membangun Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah*

Berdasarkan kegiatan masing-masing Pilar Penguatan SIDa tersebut, selanjutnya disesuaikan /dicari padanannya dengan program/ kegiatan yang tercantum di dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2024/ Renstra OPD yang terkait. Implementasi Program kolaborasi/ *cross cutting* ini menuntut komitmen bersama di bawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kota Pekalongan.

BAB VIII

P E N U T U P

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) merupakan sebuah pendekatan pembangunan daerah yang inovatif dan dilakukan secara terfokus, holistik, dan sistematis yang bertujuan untuk membangun daerah inovatif.

Roadmap Penguatan SIDA Kota Pekalongan 2021-2025 disusun dengan mengacu kepada RPJMD 2021-2024. Roadmap Penguatan SIDA merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Fungsi roadmap dalam Penguatan SIDA adalah sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan bagi setiap OPD atau elemen SIDA, sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing. Hal ini digambarkan dalam rencana aksi bagi masing-masing elemen tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 7.

Pengawal pelaksanaan dokumen Roadmap Penguatan SIDA Kota Pekalongan ini adalah Tim Koordinasi Penguatan SIDA. Penyelenggaraan rapat-rapat Tim Koordinasi Penguatan SIDA merupakan kunci bagi konsistensi pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA di Kota Pekalongan.

Keberhasilan penyelenggaraan Penguatan SIDA sangat dipengaruhi oleh dua faktor kunci, yakni: **leadership** (kepemimpinan) dan **komitmen**. Leadership dan komitmen harus hadir di setiap level *stakeholders* sistem inovasi daerah. Jika kedua faktor kunci tersebut tidak berfungsi, maka tidak akan tercapai tujuan dari Penguatan SIDA.

Daftar Pustaka

- Altenburg, Tilman. 2009. 'Building inclusive innovation system in developing countries: Challenge for IS research', in Lundvall, Bengt-Åke; Joseph K. J.; Caminade Cristina; and Vang, Jan. Handbook of Innovation Systems and Developing Countries. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
- Cooke, P. 2002. Regional innovation systems: general findings and some new evidence from biotechnology clusters. *J Technol Transf* 27(1):133–145
- Etzkowitz H, & Leydesdorff, L. 1997. Introduction: universities in the global knowledge economy. In: Etzkowitz H, Leydesdorff L (eds) *Universities and the global knowledge economy: a triple helix of university-industry government relations*. Pinter, London, pp 1–8
- Etzkowitz, H. 2002. *MIT and the rise of entrepreneurial science*. Routledge, London
- Gunasekara, C. 2006. Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems. *J Technol Transf* 31(1):101–113
- Lampiran Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Lundvall, B. (1992). Editor. *National innovation systems : Towards a theory of innovation and interactive learning*. London : Pinter Publisher.
- Lundvall, B., MuCie, P., Gammeltoft, P. (2003). editors. *Putting Africa first: The making of African innovation systems*. Aalborg: Aalborg University Press; p. 1–10.
- Manzini, ST. (2012). The national system of innovation concept: An ontological review and critique. *S Afr J Sci*. 2012;108(9/10), Art. #1038, 7 pages. [http:// dx.doi.org/10.4102/sajs.v108i9/10.1038](http://dx.doi.org/10.4102/sajs.v108i9/10.1038).

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Peraturan Daerah No 5 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pekalongan 2018-2023.

Taufik (2005), Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan, P2KT PUDPKM, Jakarta

Badan Pusat Statistik, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2019.

KUESIONER KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020:

KONDISI SIDA SAAT INI DAN KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Kuisisioner ini merupakan instrument pengumpulan data yang diharapkan dapat menggambarkan **Kondisi SIDA saat ini (kondisi tahun 2020)** dan **Kondisi SIDA yang akan dicapai (Tahun 2025)**. Kesenjangan (gab) antara kondisi SIDA saat ini dengan kondisi SIDA yang akan dicapai nantinya akan diselesaikan dengan merencanakan dan melaksanakan serangkaian program/ kegiatan sesuai indikator-indikator Penguatan SIDA. Substansi tersebut akan dituangkan dalam roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2021-2025.

Substansi dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA Kota Pekalongan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah serta program prioritas kepala daerah dengan Tema Penguatan SIDA: **Pengembangan Ekonomi Kreatif Berwawasan Lingkungan Berbasis Potensi Unggulan Daerah**. Dengan kata lain, roadmap Penguatan SIDA akan menjalankan sebagian program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada focus bidang / tema tersebut di atas. Sehingga program yang termuat di roadmap adalah juga merupakan program RPJMD.

Sistematika kuesioner ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pilar Penguatan SIDA (5 pilar), Kerangka Kebijakan Inovasi (sebanyak 6 KKI), Elemen serta Indikator-indikator pembentuk KKI tersebut.

5 (lima) pilar penguatan SIDA adalah inisiatif strategis atau prakarsa inovatif untuk memperkuat pondasi penguatan sistem inovasi. Prakarsa inovatif akan menjadi program payung dari 6 (enam) agenda atau Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI). Kelima pilar-pilar tersebut adalah:

- *Pilar 1: Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah*, dimaksudkan untuk memperkuat ekosistem (iklim dan lingkungan) yang mendukung tumbuh berkembangnya kreativitas-keinovasian, antara lain melalui perbaikan infra dan suprastruktur inovasi, perbaikan basis data, kualitas pelayanan perizinan bisnis dan inovasi, dll;
- *Pilar 2: Pengembangan Klaster Industri*; pilar ini bertujuan untuk mengembangkan potensi terbaik dan meningkatkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri;
- *Pilar 3: Pengembangan Jaringan Inovasi*; pilar ini bertujuan membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor sistem inovasi, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi dan pembelajaran dari penghasil inovasi (perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha) kepada pengguna inovasi (badan usaha, aparat pemerintah, dan masyarakat);
- *Pilar 4: Pengembangan Teknopreneur*, sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi dan sosial, serta pengembangan budaya inovasi;

- *Pilar 5: Pengembangan Tematik Daerah*, pilar ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendukung implementasi SIDA, seperti: SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik), literasi teknologi informasi dan komunikasi masyarakat dan dunia usaha, serta implementasi smart city.

Adapun keenam KKI tersebut adalah :

3. **KKI 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis**, menggambarkan kondisi dasar yang diperlukan untuk mendukung atau sebagai syarat bisa berkembangnya bisnis dan inovasi. Antara lain terdiri atas reformasi kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin) dan bisnis (termasuk dokumen perencanaan pembangunan, penyederhanaan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan bisnis dan investasi, pengembangan basis data inovasi, infrastruktur dasar inovasi (termasuk laboratorium, pusat pelayanan inovasi, pengembangan inkubator bisnis, ruang publik kreatif), pembiayaan inovasi (termasuk insentif), perlindungan HKI, pengembangan sistem retribusi dan perpajakan, pengawasan persaingan bisnis.
4. **KKI 2: Kelembagaan dan daya dukung Iptekin/atau penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan (litbangjirap) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)**; menggambarkan kelembagaan yang harus dibangun untuk memperkuat sumber penghasil inovasi dan memperkuat pengguna Iptekin, khususnya UMKM. Antara lain terdiri atas pengembangan kelembagaan inovasi (termasuk revitalisasi kelembagaan Iptekin, pengembangan organisasi profesi dan bisnis), pengembangan daya dukung Iptekin (termasuk pengembangan SDM Iptekin, pengembangan teknologi, pengembangan sumber pendanaan Iptekin), pengembangan absorpsi/daya serap Iptekin UMKM (modernisasi UMKM).
5. **KKI 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi adalah keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangjirap); menggambarkan kelembagaan kerjasama antara penghasil dan pengguna.** Antara lain terdiri atas penguatan kelembagaan kolaborasi (termasuk kelembagaan strategis dan program kemitraan strategis inovasi), peningkatan difusi Iptekin dan praktik baik hasil litbangjirap (termasuk diseminasi hasil litbang, peningkatan transaksi bisnis dan non bisnis, pemanfaatan kepakaran bagi pemanfaatan litbang, alih teknologi).
6. **KKI 4: Budaya inovasi.** Menggambarkan kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Antara lain terdiri atas penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan (termasuk pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, kampanye kepedulian inovasi), peningkatan perusahaan pemula berbasis Iptekin (termasuk inkubasi tekno-bisnis, insentif pembiayaan usaha

pemula), bantuan teknis peningkatan kapasitas pelaku bisnis, reformasi bidang publik (termasuk peningkatan kapasitas pelaku kewenangan publik) penguatan kohesi sosial (termasuk pengelolaan teknologi tradisional, inventarisasi dokumen pengetahuan masyarakat)

7. **KKI 5: Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah.** Menggambarkan kondisi fokus pembangunan serta koherensi kebijakan penguatan inovasi. Antara lain terdiri atas koordinasi kebijakan daerah-daerah dan daerah-pusat (termasuk kerjasama antar daerah dan kerjasama antara daerah dan pusat).
8. **KKI 6: Keselarasan dengan perkembangan global.** Menggambarkan kondisi kesiapan dalam menghadapi perkembangan dunia yang menyangkut isu-isu lingkungan, HAM, standar, HKI, dan gender. Antara lain terdiri atas fasilitasi peningkatan standar produk (Measurement, Standard, Testing and Quality), audit teknologi di badan-badan usaha, perbaikan teknologi bisnis, penguatan kerjasama internasional.

Petunjuk Pengisian:

1. Jawaban masing-masing pertanyaan/indicator akan diberikan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai, sehingga keterangan/ jawaban tersebut akan mewakili Kota Pekalongan.
2. Memastikan bahwa kolom 7 (sumber data) sudah sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Pilih salah satu dan atau lebih dari pilihan jawaban, isikan jumlah yang diminta di kolom 4.
4. Berdasarkan pilihan jawaban di kolom 4, tuliskan alasan atau keterangan/ narasi singkat tentang pilihan jawaban tersebut (kolom 5). Sebutkan data pendukung/ bukti sebagai dasar pengisian keterangan/narasi tersebut. Tunjukkan buktinya.
5. Isilah keterangan/ narasi singkat pada kolom 6 (kondisi SIDA yang ingin dicapai), sesuai dokumen perencanaan yang ada dan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya (SDM, keuangan daerah) sampai tahun 2025.
6. Pengisian dilakukan pada file/softcopy kuesioner (**kolom 5 dan 6**) .

OPD/ Institusi:

Nama :

Pilar 1: Penguatan Ekosistem Inovasi

KKI 1: Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan basis data inovasi dan bisnis	Ketersediaan data yang mendukung investasi dan bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil investasi daerah 2. Data UMKM 3. Profil desa/kelurahan 4. Data teknologi tepat guna 5. Data kelompok informasi masyarakat (KIM) 6. Data komunitas kreatif daerah 7. Fasilitas daerah 8. Data lain-lain 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Kominfo
2	Website/ portal daerah	Ketersediaan dan keamtifan website daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya website daerah 2. Adanya pengelola website 3. Adanya contact person aktif yang bisa dihubungi 4. Website aktif yg diupdate minimal seminggu sekali 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Kominfo
3	Dokumen RPJPD	Keberadaan konsep 'sistem inovasi daerah' pada dokumen RPJPD baik yang tercantum dalam Bab misi, tujuan maupun strategi dan kebijakan umum daerah. Mandat ini diamanahkan oleh Peraturan bersama Peraturan bersama Kemeristek dan Kementerian Dalam Negeri No 03/36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tim penyusun RPJPD/ revisi RPJPD 2. Naskah akademis RPJPD/ perubahan RPJPD 3. RPJPD sudah memuat konsep sistem inovasi 4. Konsultasi publik 5. RPJPD sudah di Perdakan 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda
4	Dokumen RPJMD	Keberadaan konsep 'sistem inovasi daerah' pada dokumen RPJMD baik yang tercantum dalam Bab misi, tujuan maupun strategi dan kebijakan umum daerah. Mandat ini diamanahkan oleh Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tim penyusun RPJMD/ revisi RPJMD 2. Naskah akademis RPJMD/ perubahan RPJMD 3. RPJMD sudah memuat konsep sistem inovasi 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
		bersama Peraturan bersama Kemeristek dan Kementerian Dalam Negeri No 03/36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.	4. Konsultasi publik 5. RPJMD sudah di Perdakan			
5	Dokumen Roadmap SIDA	Ketersediaan Roadmap SIDA di daerah sebagai panduan pelaksanaan sistem inovasi. Mandat ini diamanahkan oleh Peraturan bersama Kemeristek dan Kementerian Dalam Negeri No 03/36 tahun 2012 tentang Penguatan sistem inovasi daerah.	1. Ada tim penyusun (Timkor) 2. Pemetaan potensi kondisi SIDA 3. Roadmap SIDA 4. Perbup/Perwal tentang roadmap SIDA			• Bappeda
6	Regulasi insentif bisnis (SK/perda/perwal/perbup insentif)	Seluruh kemudahan dan insentif fiskal maupun nonfiskal yang diberikan daerah untuk pengajuan perijinan dan investasi.	1. Pemetaan jenis insentif bisnis (fiskal dan non fiskal) 2. Rancangan regulasi 3. Ada SK/perbub/perwal terkait insentif			• DPMPTSP • Bappeda
7	Keberadaan Ruang Kreatif	Ruang Kreatif merupakan wahana untuk bertukar ide, membangkitkan kreatifitas, mengembangkan usaha produktif, memfasilitasi aktifitas ekonomi lokal dan mempermudah interaksi sosial. Ruang kreatif dapat berbentuk seperti taman kreatif yang dilengkapi dengan fasilitas internet, hub kreatif center, co-work	1. Adanya ruang publik kreatif (RPK) berupa: gedung/bangunan/lapangan 2. Adanya pengelola 3. Adanya legalitas 4. Adanya kegiatan minimal sebulan sekali			• Dinas PUPR • Bappeda
8	Kelembagaan penguatan SIDA (Tim Koordinasi Penguatan SIDA)	lembaga adhoc yg bertanggungjawab dalam mengawal pelaksanaan penguatan SIDA. Tugas lembaga ini adalah menyusun roadmap SIDA yang mengakomodasi seluruh program dan kegiatan inovasi yang didanai dari APBD kab/kota.	1. Adanya tim koordinasi, pokja, dan sekretariat penguatan SIDA 2. Adanya legalitas timkor, pokja, sekretariat penguatan SIDA (SK bupati/walikota/ SK Sekda) 3. Adanya kegiatan rapat pokja sebulan sekali			• Bappeda

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
			4. Adanya rapat paripurna (pleno) setahun dua kali (di awal dan akhir tahun)			
9	Rasio anggaran Litbangjirap/Iptekin terhadap anggaran belanja daerah (APBD)	Anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan program penelitian dan pengembangan yang tercantum dalam kode urusan, program urusan, Prrogram kegiatan 5 05 02 berdasar pada Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.	Jumlah APBD: Jumlah anggaran Iptekin: Rasio anggaran Iptekin terhadap APBD:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BKD
10	Waktu Pelayanan Perijinan	Jangka waktu pengajuan perijinan yang diperlukan oleh masyarakat dari awal pengajuan hingga diterimanya hasil. Standar waktu pelayanan perijinan berdasarkan pada Perpres Nomor 97 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	Jangka waktu maksimal penyelesaian perijinan (dalam satuan hari):			<ul style="list-style-type: none"> • DPMPPTSP
11	Mall pelayanan publik	Pendirian mall pelayanan publik didaerah sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dan industri dalam melakukan pengajuan ijin maupun investasi yang didasarkan pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Neagra dan Reformasi Birokrasi RI No.23 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan SPIPISE pada daerah 2. Inisiasi proses pengembangan Mall Pelayanan Publik 3. Berdirinya Mall Pelayanan Publik 4. Adanya legalitas Mall Pelayanan Publik 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • DPMPPTSP • Sekretariat Daerah

KKI 2: Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (Iptekin)/atau penelitian pengembangan dan perekayasaan (Litbangjirap) serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, Khususnya UMKM

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020)Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
12	Jumlah perguruan tinggi	Keberadaan perguruan tinggi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah perguruan tinggi:			• Bappeda
13	Jumlah lembaga penelitian di luar universitas	Keberadaan Lembaga penelitian di daerah selain Perguruan tinggi	Jumlah lembaga penelitian:			• Bappeda
14	Jumlah SMK	Jumlah SMK yang memiliki jurusan yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	Jumlah SMK:			• Bappeda
15	Rasio pejabat fungsional Iptekin	Jumlah rasio pegawai dengan jabatan fungsional IPTEKIN (perekayasa, peneliti, perencana, dosen) per 1 juta penduduk di daerah tersebut.	Jumlah pejabat fungsional Iptekin:			• Bappeda • BKPPD
16	Kualitas perguruan tinggi terbaik di kabupaten/kota	Kualitas PT didasarkan dari klaster perguruan tinggi tahun 2019 Kemendikbud (terlampir)	1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Klaster 5	Sebutkan PT dengan klaster paling tinggi		• Bappeda
17	Rasio lulusan universitas terhadap penduduk usia kerja	Perbandingan jumlah penduduk lulusan universitas per penduduk usia kerja (15+ tahun)	Jumlah penduduk lulusan PT:.. Jumlah penduduk usia kerja: .. Rasio:			• Bappeda
18	Rasio guru SLA lulusan S1 terhadap guru SLA	Perbandingan jumlah guru SLA (SMA, MA dan SMK) berpendidikan S1 dengan jumlah guru SLA	Jumlah guru SLA lulusan S1:			• Bappeda
19	Rasio guru SLA terhadap siswa	Perbandingan jumlah guru SLA (SMA, MA dan SMK) dengan jumlah siswa	Jumlah guru SLA:			• Bappeda
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai IPM Kabupaten/kota tahun terakhir	Nilai IPM:			• Bappeda

KKI 3: Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/ Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
21	Jumlah dan skala kerjasama dalam peningkatan ekonomi daerah	Jumlah dan skala kerjasama yang dilakukan daerah terkait pengembangan inovasi dan ekonomi daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerjasama tingkat lokal yg dilakukan: 2. Jumlah kerjasama tingkat regional yg dilakukan: 3. Jumlah kerjasama tingkat nasional yg dilakukan: 4. Jumlah kerjasama tingkat internasional yg dilakukan: 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Sekretariat Daerah

KKI 4: Mendorong Budaya Inovasi

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
22	Kondisi muatan pelajaran kewirausahaan	Masuknya kurikulum wirausaha dalam jenjang SMA/ SMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatan kewirausahaan masuk di mata pelajaran lainnya 2. Ada mata pelajaran kewirausahaan 3. Ada praktik pada mata pelajaran kewirausahaan 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan Koperasi UKM • Dinas Pendidikan
23	Program pelatihan dan pendampingan (pengembangan kualitas SDM)	Adanya program pelatihan dan pendampingan bagi aparat (OPD) untuk mendukung berkembangnya inovasi. Seperti pelatihan dalam evaluasi program daerah yang berkaitan dengan inovasi.	Jumlah program:			<ul style="list-style-type: none"> • BKPPD

24	Jumlah kegiatan apresiasi dan kampanye inovasi/tahun	Jumlah kegiatan apresiasi inovasi yang diterima daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah seperti Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional.	Jumlah apresiasi Iptekin yang pernah diterima:			• Bappeda
25	Jumlah Apresiasi Inovasi yang diselenggarakan oleh daerah	Jumlah kegiatan apresiasi inovasi yang diselenggarakan daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah.	Jumlah kegiatan apresiasi Iptekin:			• Bappeda

KKI 5: Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
26	Kerjasama antar pusat daerah tentang IPTEKIN	Kesesuaian pengembangan inovasi didaerah dengan amanat peraturan bersama Kemenristek dan Kemendagri No 03 dan 36 tahun 2012 tentang penguatan sistem inovasi daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim koordinasi, Pokja, dan sekretariat penguatan SIDA 2. Tersusunnya roadmap penguatan SIDA 3. Roadmap SIDA diadopsi dalam RPJMD 4. Roadmap SIDA diadopsi dalam RPJPD 			• Bappeda

KKI 6: Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
27	Jml program lingkungan	Jumlah program lingkungan dalam skala wilayah seperti green economy dan peningkatan kebersihan untuk meraih adipura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program adipura 2. Program sumberdaya dan konservasi lingkungan 3. Program pengelolaan sampah ramah lingkungan 4. Program lainnya, sebutkan:... 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Sekretariat Daerah

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
28	Sertifikasi ISO 14001	Jumlah sertifikasi ISO 14001 yang diperoleh oleh OPD.	Jumlah OPD: Jumlah OPD yang memperoleh ISO 14001:			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Sekretariat Daerah • BKPPD
29	Keikutsertaan dalam forum international tentang lingkungan	Jumlah keikutsertaan dalam forum international bidang lingkungan	Jumlah seminar/FGD/ Workshop internasional yang pernah diikuti:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Sekretariat Daerah
30	Penggunaan energi alternatif	Penggunaan energi alternatif, seperti: biogas, kincir tenaga angin, mikro hidro, dsb.	1. Jumlah di tingkat komunitas: 2. Jumlah di tingkat desa/ kelurahan: 3. Jumlah di tingkat kecamatan: 4. Jumlah di tingkat kabupaten/ kota:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Sekretariat Daerah
31	sertifikasi ISO 9001	Jumlah sertifikasi ISO 9001 yang diperoleh OPD.	Jumlah OPD yang memperoleh ISO 9001:			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Sekretariat Daerah • BKPPD
32	Aktivitas pelayanan HaKI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah	Jenis pelayanan HaKI yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.	1. Sosialisasi 2. Pelatihan 3. Konsultasi 4. Fasilitasi dalam perolehan HKI			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Sekretariat Daerah
33	Jumlah paten resmi daerah (indikasi geografis)	Jumlah 'indikasi geografis' yang telah terdaftar berdasar UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti contohnya produk ukir jepara, bandeng asap Sidoarjo, Salak Pondoh.	Jumlah paten indikasi geografis yang masih dalam proses pendaftaran: Jumlah paten indikasi geografis yang terdaftar:			<ul style="list-style-type: none"> • D • Sekretariat Daerah

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
34	Regulasi standarisasi Upah UMK/UMR	Regulasi yang mengatur standarisasi upah minimum kabupaten/ kota/ regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim perancang regulasi 2. Draft draft regulasi ketenagakerjaan/ upah 3. Regulasi berupa perda/ perwal/ perbup 			• D
35	Jumlah ASN wanita dengan jenjang pendidikan minimal S1	Salah satu cara untuk melihat kesetaraan gender dalam pemerintahan diperlukan identifikasi terkait keterlibatan perempuan.	<p>Jumlah ASN wanita berpendidikan S1:</p> <p>Jumlah ASN wanita:</p> <p>Jumlah ASN seluruhnya:</p>			• BKPPD

OPD/ Institusi:

Nama :

PILAR 2: PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

KKI 1: Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan basis data pengembangan klaster industry	kumpulan data terkait pengembangan klaster seperti jumlah klaster industri, jumlah pengusaha/ aktor lain yang termasuk dalam klaster, persebaran wilayah klaster.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah klaster industri 2. Data jumlah unit usaha tiap klaster 3. Data jumlah tenaga kerja tiap klaster 4. Data nilai produksi tiap klaster 5. Data persebaran wilayah klaster 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora
2	PUD (Produk Unggulan Daerah)	Adanya pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan berdasarkan kriteria KEMENDAGRI No. 9 tahun 2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpilihnya PUD berdasarkan kriteria yang ditetapkan 2. Adanya OPD yang berwenang menangani PUD 3. Perencanaan PUD jangka panjang masuk ke RPJPD 4. Perencanaan PUD jangka menengah masuk kedalam RPJMD 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora
3	Dokumen RIPID/RIPIK/RPIK	Disusunnya dokumen rancangan induk pengembangan industri daerah berdasarkan kriteria yang ada pada Permenperin No.110 Tahun 2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun dokumen 2. Adanya peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kab/Kota 3. Draft dokumen telah tersusun 4. Sudah dituangkan dalam rancangan Perda 5. Sudah ada Perda tentang dokumen tersebut 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Keberadaan sarana informasi daring unggulan daerah	Penggunaan sistem IT dalam pembentukan klaster. Sistem informasi dapat berbentuk website, medsos,dll.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada sarana informasi daring 2. Terdapat pengelola sarana informasi 3. Terdapat SOP pengelolaan sarana informasi 4. Data yang diberikan update minimal sebulan sekali 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora
5	Keberadaan Pokja pelaku klaster	Pokja pelaku klaster yang dimaksud adalah penanggung jawab yang ditunjuk secara khusus untuk membentuk /mengelola klaster industri. Terdapat 3 bentuk kelembagaan klaster yaitu SKPD, BUMN ,BUMN, Koperasi atau badan usaha atau perorangan yang mengatur pengelolaan klaster.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terbentuk 2. Sudah disahkan dalam bentuk SK (sebutkan nama dan nomor SK) 3. Sudah berjalan dengan efektif (rencana kerja, frekuensi rapat) 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora

KKI 2: Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Inovasi (Iptekin)/atau penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, Khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
6	Jumlah Universitas dan lembaga penelitian yang terlibat dalam pengembangan klaster industri daerah	Tuliskan jumlah universitas/lembaga penelitian baik pemerintah maupun swasta di daerah tersebut yang terlibat dalam pengembangan klaster industri daerah. Kriteria terlibat adalah dengan adanya kegiatan tertentu terkait pengembangan industri di klaster tertentu.	Jumlah Universitas dan lembaga penelitian yang terlibat :			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
7	Jumlah komunitas/asosiasi bisnis yang terkait dengan pengembangan klaster industri daerah	Tuliskan jumlah komunitas/asosiasi bisnis yang terkait dengan pengembangan suatu klaster industri tertentu. Tuliskan jumlah klaster yang ada didaerah tersebut, jenis klaster yang dihitung mengikuti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 5 digit. Kriteria terlibat adalah dengan adanya kegiatan tertentu terkait pengembangan industri di klaster tertentu.	Jumlah komunitas/asosiasi: Jumlah klaster berdasarkan KBLI 5 digit:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora
8	Rasio SDM pokja klaster dengan tingkat pendidikan minimal S1	Perbandingan jumlah SDM pokja klaster yang memiliki tingkat pendidikan minimal S1. Standar yang dipakai menggunakan persentase data penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan min S1 (sekitar 10%)	Total Jumlah SDM Pokja klaster: Jumlah SDM dengan tingkat pendidikan minimal S1:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora

KI 3: Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/ Terbaik dan/ atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
9	Kerjasama antara klaster industri dengan universitas dan Lembaga Litbangjirap	Jumlah dan skala kerjasama antara pengelola klaster dengan Universitas dan Lembaga Litbangjirap dalam upaya pengembangan klaster industri. Kriteria kerjasama adalah dengan adanya kegiatan dalam MoU/Surat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerjasama lokal: 2. Jumlah kerjasama Regional: 3. Jumlah kerjasama Nasional: 4. Jumlah kerjasama 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora

		perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan industri di klaster tertentu.	Internasional:			
10	Jumlah kegiatan yang diadakan sebagai sarana interaksi antar para pelaku bisnis di klaster industri daerah dalam setahun	Kegiatan yang dimaksud contohnya ialah pameran dagang, arena apresiasi inovasi IKM. Kriteria pameran dagang yaitu kegiatan yang diadakan dalam rangkaian event khusus misalnya menyambut ulang tahun daerah, menyambut hari kemerdekaan, dll.	Jumlah kegiatan sarana interaksi :			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora

KKI 4: Mendorong Budaya Inovasi

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
11	Jumlah pertemuan pokja klaster per tahun	Jumlah kegiatan atau pertemuan pokja klaster dalam jangka waktu 1 tahun.	Jumlah Pertemuan:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora
12	Jumlah program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha	Jumlah program pelatihan dan pendampingan pengembangan kelompok usaha dalam rangka pengembangan kualitas SDM dalam jangka waktu 1 tahun.	Jumlah program:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora
13	Jumlah klaster industri	Tuliskan jumlah klaster industri yang ada di daerah dengan jenis klaster dilihat berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2 digit.	Jumlah klaster industri:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpora

KKI 5: Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
14	Koordinasi program kluster dengan pemerintah daerah dan pusat	Menilai program pembangunan industri yang dijalankan sesuai dengan rancangan pembangunan industri provinsi dan nasional sesuai dengan kriteria yang terdapat pada Permenperin No.110 Tahun 2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPIK selaras dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra/RPJMD) 2. RPIK Sudah mengacu pada rancangan pembangunan industri provinsi (RPIP) 3. RPIK Sudah mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional (RIPIN) 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpo ra

KKI 6: Penyeragaman Dengan Perkembangan Global						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
15	Program lingkungan bagi kluster industri daerah	Program lingkungan oleh/untuk kluster industri di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembuatan IPAL komunal 2. Program penyuluhan/sosialisasi konsep ramah lingkungan dalam kluster 3. Program pelatihan konsep ramah lingkungan dalam kluster 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpo ra
16	Program standarisasi produk kluster	Program standarisasi hasil produk yang dihasilkan dalam kluster industri yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi dari pokja 2. Respon dari OPD terkait 3. Adanya program standarisasi 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda, • Disperin Naker • Disdagkop UKM, • Disparbudpo ra

OPD/ Institusi:

Nama :

PILAR 3: PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI

KKI 1: Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan data terkait dengan keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan.	Ketersediaan data terkait dengan keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan.	1. Data fasilitas (sarana prasarana) 2. Data layanan 3. Data pengguna 4. Data kerjasama			<ul style="list-style-type: none"> • Setda • Bappeda • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
2	Adanya website tentang fasilitas/wahana jaringan inovasi	Ketersediaan dan keaktifan website fasilitas/wahana jaringan.	4. Ada website terkait 5. Ada Pengelola website 6. Ada CP yang dapat dihubungi 7. Website diupdate minimal seminggu			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
3	Legalitas pembentukan kelembagaan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Legalitas kelembagaan fasilitas/wahana jaringan inovasi dapat berbentuk SK/Perbup/Perwal. Bentuk kelembagaan dapat berupa Perserikatan/perkumpulan, badan usaha, Unit pelaksana teknis, Badan layanan umum. Indikator legalisasi kelembagaan Didasarkan pada Permendagri no 12 tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta mempertimbangkan peningkatan kelembagaan dari UPTD menjadi BLU berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	9. Pembentukan tim kajian 10. Dokumen kajian akademis kelembagaan 11. Analisis ratio belanja pegawai 12. Konsultasi dengan pimpinan yang lebih tinggi 13. Peraturan bupati/walikota			<ul style="list-style-type: none"> • Setda • Bappeda

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Dokumen rencana induk pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Dokumen rencana induk adalah masterplan pengembangan bagi kelembagaan atau kawasan technopark/pusat inovasi/lembaga intermediasi lainnya dengan fungsi serupa.	4. Tim penyusun rencana induk 5. Pemetaan potensi sumber teknologi dan pengembangan kawasan 6. Dokumen rencana induk			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
5	Dokumen rencana aksi/dokumen kegiatan	Dokumen rencana aksi adalah dokumen yang memuat tentang program dan rencana tindak kawasan/lembaga.	1. Tim penyusun rencana aksi 2. Pemetaan program dan rencana 3. Dokumen rencana aksi			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
6	Keberadaan lembaga pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Lembaga pengelola adalah tim/personal yang mengawal operasionalisasi kegiatan didalam kawasan.	1. Ada tim kajian pembentukan pengelola 2. Ada dokumen kajian pembentukan pengelola 3. Struktur organisasi pengelola 4. Legalisasi tim pengelola			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
7	Jumlah SDM pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi dengan tingkat pendidikan min S1	Kriteria Jumlah SDM pengelola wahana didasarkan pada struktur Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pasal 27 Kabupaten/Kota Kelas A. UPTD digunakan sebagai bentuk umum yang digunakan oleh daerah dalam pembentukan lembaga technopark/pusat inovasi.	Jumlah SDM Pengelola minimal S1: orang			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
8	Rasio anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Perbandingan anggaran pengembangan wahana/kawasan technopark/pusat inovasi terhadap APBD. Dasar penentuan APBD adalah adalah Permendagri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pambangunan dan	Anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi: APBD: Rasio:			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP • Bappeda

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
		Keuangan Daerah dengan urusan pengembangan inovasi dan teknologi.				
9	Sebaran anggaran pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Sebaran anggaran pengembangan wahana jejaring merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal konsep ekonomi berbasis pengetahuan melalui keikursertaan pembiayaan/ pengadaan program terkait dengan kawasan/wahana jejaring inovasi seperti technopark dan pusat inovasi.	Jumlah OPD: Jumlah OPD yang mempunyai program pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi:	(Sebutkan OPD tersebut)		<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP • Bappeda
10	Pembangunan sarana/prasarana	Keberadaan wahana/ kawasan technopark ditandai dengan terbangunnya gedung dan sapras di atas lahan baik milik pemerintah/dimiliki pemerintah daerah/swasta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat 2. Kawasan/gedung 			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
11	Jenis Penyelenggaraan Layanan Fasilitas/Wahana jaringan inovasi	Jenis Penyelenggaraan layanan di fasilitas/wahana jejaring inovasi sebagai salah satu tolak ukur keberfungsian wahana tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan intermediasi teknologi 2. Layanan konsultasi hukum HKI 3. Laboratorium/fasilitas produksi skala terbatas 4. Pendampingan tenant (fasilitasi akses permodalan, pemasaran, legalitas tenant) 5. Penyediaan ruangan tenant 6. Melakukan pelatihan 7. Penyediaan ruangan untuk pelatihan/konferensi/seminar 8. Layanan konsultasi teknis 			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP
12	Keberadaan SOP penggunaan fasilitas	Ketersediaan Standar operasional penggunaan fasilitas di kawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP lisan 2. SOP tertulis 			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP

KKI 2: Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEKIN/atau LITBANGJIRAP serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, khususnya UMKM

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
13	Jumlah universitas ,lembaga penelitian dan Sekolah yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Jumlah universitas/lembaga penelitian baik pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam kegiatan technoprak/pusat inovasi. kriteria kerjasama adalah dengan adanya kegiatan dalam MoU/Surat perjanjian kerjasama. yang beririsan dengan fungsi kawasan technopark/pusat inovasi.	Jumlah universitas dan lembaga penelitian yang terlibat :	(Sebutkan nama Universitas dan Lembaga Penelitian disini)		<ul style="list-style-type: none"> • Setda • Disparbudpo ra • Disperin Naker • DKP • Bappeda
14	Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat dalam pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Jumlah komunitas yang melakukan kerjasama dengan kawasan technoprak/pusat inovasi. kriteria kerjasama komunitas adalah dengan adanya kegiatan dalam MoU/Surat perjanjian kerjasama yang beririsan dengan fungsi kawasan technopark/pusat inovasi.	Jumlah komunitas yang terlibat :	(Sebutkan nama komunitas disini)		<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpo ra • Disperin Naker • DKP
15	Pengembangan SDM Pengelola fasilitas/wahana jaringan inovasi	Pengembangan SDM diidentifikasi dengan Program pengembangan SDM pengelola.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah training SDM terkait fasilitas/wahana jaringan inovasi di tingkat lokal : 2. Jumlah training SDM terkait fasilitas/wahana jaringan inovasi di tingkat provinsi/regional : 3. Jumlah training SDM terkait fasilitas/wahana jaringan inovasi di tingkat nasional : 4. Jumlah training SDM terkait fasilitas/wahana jaringan inovasi di tingkat internasional : 			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpo ra • Disperin Naker • DKP

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
16	Pemanfaatan hasil penelitian dari universitas, lembaga penelitian dan komunitas dalam fasilitas/ wahana jaringan inovasi atau dalam rangka pengembangan fasilitas/ wahana jaringan inovasi	Universitas/lembaga penelitian/komunitas yang terlibat kerjasama dengan technoprak/pusat inovasi yang sudah mendapatkan mitra pengguna. atau Komunitas/wirausaha yang mendapatkan pendampingan dari pihak lain.	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian :			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpo ra • Disperin Naker • DKP • Bappeda

KKI 3: Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
17	Kerjasama pengembangan fasilitas/wahana jaringan inovasi	Jumlah dan Skala kerjasama antar aktor jejaring.	1. Jumlah kerjasama skala lokal : 2. Jumlah kerjasama skala regional : 3. Jumlah kerjasama skala nasional : 4. Jumlah kerjasama skala internasional :			<ul style="list-style-type: none"> • Setda • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP • Bappeda
18	Sebaran difusi inovasi jaringan inovasi	Jumlah inovasi yang sudah diaplikasikan (produk baru yang sudah dihasilkan). Pertanyaan ini berkaitan dengan no 16, standar produk yang dihasilkan minimal sesuai dengan jumlah lembaga yang telah menemukan mitra pengguna.	Jumlah produk yang dihasilkan :			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP • Bappeda

KKI 4: Mendorong Budaya Inovasi

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
19	Budaya berjejaring antar aktor inovasi	Program pelatihan dari technopark fasilitas/wahana jaringan inovasi untuk komunitas/masyarakat dalam 1 tahun.	1. Jumlah pelatihan sesuai komoditas unggulan yang diusung oleh technopark dalam setahun : 2. Jumlah pelatihan berbasis IT dalam setahun : 3. Jumlah pelatihan lainnya yang mendukung perkembangan wilayah dalam setahun :			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP • Bappeda

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
20	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan di fasilitas/wahana jaringan inovasi	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan dalam fasilitas dalam kawasan technopark/pusat inovasi adalah banyaknya pengusaha/start up yang mendapatkan kemudahan pelayanan teknis dan inkubasi.	Jumlah wirausaha yang mendapat pembinaan :			<ul style="list-style-type: none"> • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP

KKI 5: Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
21	Kerjasama antar daerah/dengan pusat terkait fasilitas/wahana jaringan inovasi	Koherensi kebijakan yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat (Nasional).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahana jejaring inovasi sudah terdapat di dalam program perencanaan daerah (Renstra/RPJMD) 2. Mengikuti sosialisasi jaringan/technopark yang diselenggarakan Kemenristek 3. Technopark terdaftar sebagai SPIN technopark 4. Memiliki legalisasi pengelola 5. Memiliki rencana induk 6. Memiliki dokumen rencana aksi 7. Pembangunan sarana prasarana 			<ul style="list-style-type: none"> • Setda • Disparbudpora • Disperin Naker • DKP • Bappeda

KKI 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
22	Positioning wahana jejaring inovasi dengan komunitas internasional	Keikutsertaan pengelola wahana jaringan inovasi (Teknopark, TTO,dsb) terhadap forum international khususnya terkait lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti seminar internasional terkait wahana jaringan inovasi (Technopark, TTO, dsb) 2. Mendaftar menjadi anggota Asosiasi wahana jaringan inovasi (Technopark, TTO, dsb) internasional 3. Menjadi anggota Asosiasi wahana jaringan inovasi (Technopark, TTO, dsb) internasional 4. Menjadi anggota tetap Asosiasi wahana jaringan inovasi (Technopark, TTO, dsb) internasional 	(sebutkan seminar dan nama asosiasi)		<ul style="list-style-type: none"> • Setda • Disparbud pora • Disperin Naker • DKP • Bappeda

OPD/ Institusi:

Nama :

PILAR 4: PENGEMBANGAN TEKNOPRENER

KKI 1: Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan database teknopreneur	Kumpulan data terkait teknopreneur dan/atau UKM inovatif di daerah penilaian meliputi data jumlah perusahaan, tenaga kerja, sektor usaha, besaran omzet, dan data pendukung lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Jumlah Total 2. Data Sektor Usaha 3. Data Omzet 4. Data Tenaga Kerja 5. Data Lainnya, 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Diskominfo
2	Regulasi pengembangan teknopreneur	Proses penyusunan regulasi yang telah/akan disiapkan untuk dijadikan landasan pengembangan teknopreneur di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Perancang Regulasi 2. Draf Rancangan Regulasi Sedang disusun 3. Regulasi sudah dilegalisasi 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM • Setda
3	Legalitas Pendirian dan Pengelolaan Inkubator Bisnis	Proses penyusunan legalitas baik berupa SK/Perwal/Perbup terkait pendirian dan pengelolaan inkubator bisnis baik yang dioperasikan pemerintah daerah atau inkubator lain yang dikelola lembaga non-pemda di daerah tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim Penyusun Legalitas Inkubator 2. Draft legalitas sedang disusun 3. Legalitas telah berlaku (SK/Perwal) 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM • Setda
4	Ketersediaan inkubator bisnis dan kepemilikannya	Ketersediaan inkubator bisnis di daerah tersebut (berdasarkan Permen KUKM No 24 Tahun 2015) beserta jumlahnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milik Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/PTN. Sebanyak: 2. Milik Pemda (OPD, PT Daerah) sejumlah: 3. Milik Dunia Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta) sejumlah: 4. Milik Masyarakat (PT Swasta, Yayasan, LSM) sebanyak: 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM • Disbudpar pora • Distan KP • Disperin Naker

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengelola/manajer inkubator bisnis	Ketersediaan legalitas yang mengatur kelembagaan pengelola/manajer inkubator bisnis di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tim perancang legalitas pengelola 2. Draf legalitas pengelola telah disusun 3. Legalitas pengelola sudah ada dan sudah berjalan 			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Disperin Naker
6	Sarana dan prasarana inkubator	Ketersediaan fasilitas-fasilitas dasar yang perlu disediakan oleh inkubator bisnis untuk menunjang fungsinya dalam memberikan layanan ke tenant inkubasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja tenant 2. Ruang Konsultasi 3. Ruang kerja manajemen 4. Ruang pelatihan 5. Sistem Informasi Daring (online) 6. Ruang lainnya, 			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Disbudpar pora • Disperin Naker
7	Standar penyelenggaraan inkubator sebagai fasilitas penumbuhkembangan teknopreneur	Kelengkapan standar penyelenggaraan inkubasi bisnis di daerah berdasarkan Permen KUKM No 24 tahun 2015 yaitu prainkubasi (menjaring calon wirausaha), inkubasi (kontrak pendampingan tenant), dan pascainkubasi (jejaring alumni).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelayanan pra inkubasi 2. Melakukan layanan inkubasi 3. Melakukan layanan psca inubasi 			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Disperin Naker
8	Persentase alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan teknopreneur	Persentase anggaran APBD (Berdasar lampiran Permendagri no 31 tahun 2016) untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan teknopreneur atau kewirausahaan.	Anggaran program terkait kewirausahaan: Rp			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM
9	Besarnya penyaluran insentif / kemudahan pengembangan teknopreneur	Rasio jumlah UMKM yang menerima insentif fisik (dana dan/atau alat) dari daerah, baik murni dari anggaran pemda atau dari kerja sama dengan pihak lain, terhadap total jumlah UMKM di daerah.	Jumlah UMKM: Jumlah UMKM yang mendapat insentif:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM

KKI 2: Memperkuat Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEKIN/atau LITBANGJIRAP serta Mengembangkan Kemampuan Absorpsi oleh Industri, khususnya UMKM

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Sebaran SDM IPTEKIN / Litbangjirap yg berkontribusi dalam pengembangan teknopreneur daerah	Ketersediaan pejabat fungsional IPTEKIN (peneliti, perekayasa, dosen) yang bertugas dalam pengembangan dan pembinaan teknopreneur di berbagai lembaga daerah terkait.	1. Bappeda/Bapelitbangda 2. OPD lainnya 3. Perguruan Tinggi di daerah 4. Industri di daerah 5. Lembaga swasta lainnya di daerah			<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Disdagkop UKM Disbudparpora Distan KP Disperin Naker
11	Rasio tingkat absorpsi UMKM terhadap hasil litbangjirap pengembangan teknopreneur	Rasio jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi dari perguruan tinggi dan/atau lembaga litbangjirap sebagai nilai tambah proses produksi atau hasil akhir produk yang dipasarkan, terhadap total UMKM di daerah.	Jumlah UMKM: Jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi hasil litbangjirap: Rasio:			<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Disdagkop UKM Disbudparpora Distan KP Disperin Naker

KKI 3: Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik dan/atau Hasil Litbangjirap serta Meningkatkan Pelayanan Berbasis Teknologi

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
12	Sebaran kemitraan strategis teknopreneur	Berbagai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan seperti: (1) peningkatan jumlah teknopreneur daerah, (2) kerjasama inkubasi bisnis dengan wilayah lain atau nasional, atau (3) pelatihan teknopreneur dengan mendatangkan pengajar dari wilayah lain.	1. Dengan Pemda lain 2. Dengan Pemerintah Pusat 3. Dengan industry nasional 4. Dengan PT / Lemlitbang Pusat 5. Dengan Lembaga pendanaan/modal ventura nasional 6. Dengan Institusi internasional			<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Disdagkop UKM Disbudparpora Distan KP Disperin Naker Diskominfo

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
13	Jumlah dan skala interaksi komersialisasi teknologi antara penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur	Jumlah dan skala kerjasama antara para penghasil teknologi/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan teknopreneur (PPBT dan/atau UMKM inovatif) dalam kegiatan hilirisasi hasil teknologi hingga dijual di pasaran (misal: skala internasional berarti hasil inovasi pewarna batik universitas di wilayah X dikomersialkan teknopreneur daerah kemudian dipasarkan hingga ke negara lain).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala local sebanyak..... 2. Skala regional sebanyak..... 3. Skala nasional sebanyak..... 4. Skala internasional sebanyak..... 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM • Disbudparpora • Distan KP • Disperin Naker • Diskominfo

KKI 4: Mendorong Budaya Inovasi						
No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
14	Rasio wirausaha / UMKM terhadap jumlah penduduk daerah tsb	Jumlah wirausaha / UMKM di daerah dibandingkan dengan total jumlah penduduk di daerah pada tahun yang sama.	<p>Jumlah wirausaha (jiwa)</p> <p>Jumlah penduduk (jiwa)</p> <p>Rasio:</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM
15	Program peningkatan iklim kewirausahaan	Pengadaan program-program pendukung technopreneurship seperti techno camp, talent scouting, dan/atau kegiatan lain sejenis yang bertujuan memotivasi dan menjangkau calon wirausaha muda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disosialisasikan di sekolah/kampus PT 2. Telah dilakukan 3. Dilakukan rutin setiap tahun 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM • Disperin Naker

KKI 5: Menumbuhkembangkan dan Memperkuat Keterpaduan (koherensi) Pemajuan Sistem Inovasi						
No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
16	Jumlah usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri unggulan daerah	Rasio jumlah UMKM inovatif yang sektor usahanya mendukung keberadaan klaster unggulan daerah.	Jumlah UMKM inovatif sesuai klaster unggulan daerah:			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Disbudparpora • Disperin Naker
17	Koordinasi antara pemerintah daerah dalam satu regional dan antara pemerintah daerah dengan pusat	Peraturan-peraturan yang diadopsi dan disepakati oleh pemerintah daerah dalam hal pengembangan teknopreneur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU/Permen KUKM No 24 tahun 2015 2. Perda Provinsi/Pergub 3. Perda Kota/Perwal 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM • Disbudparpora • Distan KP • Disperinaker • Diskominfo

KKI 6: Penyeragaman dengan Perkembangan Global						
No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
18	Penerapan label ramah lingkungan pada produk UMKM/PPBT dalam tiga tahun terakhir (2018-2020)	Program pemerintah yang memberikan penyuluhan/ pelatihan/ pendampingan kepada PPBT/UMKM terkait standarisasi produk yang ramah lingkungan (misal: rendah emisi, 100% daur ulang, pewarna alami, pengelolaan limbah, dll).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program sosialisasi/ penyuluhan 2. Program pelatihan teknis 3. Program pendampingan standarisasi produk 			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop UKM • Distan KP • Disperin Naker
19	Rasio jumlah bisnis inovatif yang terstandar ISO 14001	Rasio jumlah UMKM yang telah memiliki standar kualitas internasional (bidang standar apapun, disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing) terhadap total UMKM di daerah.	<p>Jumlah UMKM yang berstandar internasional:</p> <p>Jumlah UMKM:</p> <p>Rasio:</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Disdagkop UKM • Disperin Naker

No	Indikator Elemen KKI	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
20	Rasio kepemilikan kekayaan intelektual oleh para teknopreneur daerah terhadap total UMKM	Jumlah dan jenis kekayaan intelektual yang telah didaftarkan ke Kemenkumham oleh para teknopreneur (PPBT dan UMKM inovatif) di daerah tersebut, dibandingkan dengan jumlah total UMKM di daerah.	Jumlah Paten: Jumlah Merek: Jumlah Desain Industri:			<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disdagkop • UMKM • Disperin • Naker

OPD/ Institusi:
Nama :

PILAR 5: PENGEMBANGAN TEMATIK

KKI 1: Mengembangkan Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketersediaan basis data terkait dengan TIK secara umum, SPBE, dan literasi TIK di masyarakat dan pelaku usaha	Ketersediaan data terkait urgensi kab/kota, seperti potensi TIK untuk mendukung system industri, perijinan dan pelayanan maka data base yang selayaknya tersedia adalah pusat pelayanan TIK di setiap kab/kota, Pilih data/layanan TIK yang tersedia.	Ada / tidaknya data tentang: 1. % individu yg menggunakan HP, 2. % individu yg menggunakan internet, 3. % individu yg menggunakan internet menurut gender, 4. % individu yg menggunakan komputer, 5. % keluarga yg menggunakan HP, 6. % keluarga yg menggunakan komputer, 7. % keluarga yg menggunakan fixphone, 8. % keluarga yg menggunakan TV, 9. % keluarga yg menggunakan Radio 10. % wilayah yang terjangkau internet			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda
2.	Ketersediaan website portal TIK	Ketersediaan website per OPD, updating, dan integrasi antar website	1. Sebagian OPD mempunyai website aktif update minimal 1 bulan sekali 2. Seluruh OPD mempunyai website aktif 3. Sebagian terintegrasi 4. Seluruhnya terintegrasi			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda
3	Regulasi atau landasan hukum/ bentuk kebijakan lainnya terkait dengan pengembangan TIK	Landasan hukum/ bentuk kebijakan lainnya terkait dengan pengembangan TIK, seperti: smart city, SPBE, dan lainnya (termasuk literasi TIK di masyarakat dan pelaku usaha)	1. Inisiasi pengembangan TIK 2. Draft regulasi program pengembangan TIK 3. Perbuo/ perwal terkait pengembangan TIK (program smart city/ SPBE/ lainnya)			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda

No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Masterplan pengembangan TIK	Penyusunan masterplan pengembangan TIK : smart city, SPBE, dan lainnya (literasi TIK di masyarakat dan pelaku usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun masterplan 2. Penentuan framework pengembangan TIK 3. Dokumen masterplan 			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda
5.	Rencana aksi pengembangan TIK	Penyusunan rencana aksi pengembangan TIK: smart city, SPBE, dan lainnya (literasi TIK di masyarakat dan pelaku usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penyusun rencana aksi 2. Proses penyusunan 3. Dokumen rencana aksi 			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda
6	Kelembagaan pengelola pengembangan TIK	Lembaga pengelola TIK: smart city, SPBE, dan lainnya (literasi TIK di masyarakat dan pelaku usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim kajian pengelola TIK daerah 2. Dokumen kajian pengelola TIK 3. Struktur pengelola 4. SK pengelola sistem/ program TIK 			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda
7.	Rasio anggaran untuk pengembangan TIK terhadap	Perbandingan anggaran untuk TIK dengan APBD	<p>Jml anggaran untuk TIK:</p> <p>Jumlah APBD:</p> <p>Rasio:</p>			<ul style="list-style-type: none"> • BKD • Bappeda
8	Pembangunan fisik	Pembangunan infrastruktur fisik smart city, SPBE, dan TIK lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang server dan kontrol 2. Jaringan internet 3. Piranti komputer 4. Command center 			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda

KKI 2: Kelembagaan dan daya dukung Iptekin/Litbangjirap serta kemampuan absorpsi oleh industry khususnya UMKM						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
9	Kelembagaan iptekin/ litbangjirap yg terlibat dalam pengembangan TIK	Jumlah universitas/lembaga penelitian baik pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam kegiatan /program TIK (smart city, SPBE, dan lainnya) kriteria kerjasama adalah dengan adanya MoU/Surat perjanjian kerjasama yang terkait dengan TIK.	Jumlah universitas dan lembaga Litbangjirap yang terlibat:			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda
10	Jumlah lembaga / komunitas dalam pengembangan TIK	Jumlah komunitas yang terlibat dalam pengembangan TIK, kriteria kerjasama adalah dengan adanya MoU/Surat perjanjian kerjasama yang terkait dengan TIK.	Jumlah komunitas yang terlibat:			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda
11	Pengembangan SDM di bidang TIK	Program pengembangan SDM pengelola TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah keikutsertaan training SDM terkait TIK di tingkat lokal: 2. Jumlah keikutsertaan training SDM terkait TIK di tingkat provinsi: 3. Jumlah keikutsertaan training SDM terkait TIK di tingkat nasional: 4. Jumlah keikutsertaan training SDM terkait TIK di tingkat internasional: 			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda • Bagian pemerintahan Setda

KKI 3: Kolaborasi bagi Inovasi dan Difusi Inovasi						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
12	Kolaborasi TIK antara litbangjirap dan pengelola	Jumlah dan skala kolaborasi antar daerah terkait pengembangan TIK	1. Jumlah kolaborasi skala lokal: 2. Jumlah kolaborasi skala provinsi: 3. Jumlah kolaborasi skala nasional: 4. Jumlah kolaborasi skala internasional:			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda

KKI 4: Mendorong Budaya Inovasi						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
13	Jumlah diklat terkait dengan inovasi bagi pengelola	Jumlah diklat inovasi yang dilaksanakan setiap tahun	1. Jumlah diklat sistem inovasi (SI) di tingkat lokal: 2. Jumlah diklat SI di tingkat provinsi: 3. Jumlah diklat SI di tingkat nasional: 4. Jumlah diklat SI di tingkat internasional:			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda

KKI 5: Keterpaduan/ Koherensi Pemajuan Sistem Inovasi di Daerah						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
14	Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat	Peraturan yang diadopsi dan disepakati oleh Pemerintah daerah dalam pengembangan TIK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan pemerintah pusat 2. Peraturan perundangan pemerintah provinsi 3. Peraturan perundangan pemerintah kabupaten/ kota 			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda

KKI 6: Keselarasan dengan Perkembangan Global						
No	Indikator	Penjelasan Indikator	Kriteria Indikator	Kondisi SIDA		Sumber data/ OPD
				Saat Ini (Th 2020) Ket Pendukung/ evidence/ bukti dokumen	Yang Ingin dicapai (Tahun 2025)	
1	2	3	4	5	6	7
15	Jumlah produk yang digunakan sesuai dengan standar	Penggunaan produk TIK sesuai dengan standar internasional (contoh memakai aplikasi software original, menggunakan kabel tanam berbahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan).	Jumlah produk:			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo • Bappeda